

Khairudin  
Yanuaris Yanu Dharmawan



# Jejak Budi & Angka:

**DASAR FILOSOFIS DAN TEORETIS AKUNTANSI PUBLIK  
DALAM BINGKAI PENDIDIKAN**

**EDITOR :**  
Khairudin

Yanuaris Yanu Dharmawan

# Jejak Budi & Angka:

DASAR FILOSOFIS DAN TEORETIS AKUNTANSI PUBLIK  
DALAM BINGKAI PENDIDIKAN

Di balik laporan keuangan yang penuh angka tersembunyi narasi tentang keadilan, kekuasaan, dan nilai-nilai publik. Buku Jejak Budi dan Angka menggugat pandangan sempit terhadap akuntansi publik sebagai sekadar praktik teknis, dan mengajukan pendekatan filosofis yang menempatkan akuntansi sebagai medan etis dan sosial.

Melalui dialog lintas pemikiran-dari Plato, Aristoteles, hingga Nussbaum, dari Habermas hingga Ki Hajar Dewantara-buku ini menyusun kerangka akuntansi sebagai wacana moral yang membentuk (dan dibentuk oleh) tata kelola negara. Ia menelusuri transformasi pendidikan akuntansi dari sekadar penghafalan standar menuju pengembangan civic professionalism, capability ethics, dan keberanian moral.

Ditulis dengan pendekatan interdisipliner, buku ini menawarkan wawasan kritis dan praksis untuk dosen, mahasiswa, pembuat kebijakan, serta siapa pun yang peduli pada transparansi, keadilan fiskal, dan masa depan demokrasi. Ini bukan sekadar buku tentang angka, tapi tentang makna.



✉ [ganeshakreasisemesta@gmail.com](mailto:ganeshakreasisemesta@gmail.com)

🌐 [www.ganeshakreasisemesta.com](http://www.ganeshakreasisemesta.com)

📞 0852 8000 2192

🌟 Anggota IKAPI No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7293-66-4



9 786347 291684

**JEJAK BUDI & ANGKA:  
Dasar Filosofis dan Teoretis Akuntansi Publik  
dalam Bingkai Pendidikan**

**Khairudin  
Yanuaris Yanu Dharmawan**



**PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA**

**JEJAK BUDI & ANGKA:  
Dasar Filosofis dan Teoretis Akuntansi Publik  
dalam Bingkai Pendidikan**

**Penulis** : Khairudin  
Yanuarius Yanu Dharmawan

**Editor** : Khairudin  
Yanuarius Yanu Dharmawan

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Riska Apriliani

**ISBN** : 978-634-7291-68-4

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA,  
AGUSTUS 2025  
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH  
NO. 281/JTE/2024**

**Redaksi:**

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden  
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192  
Surel: ganeshakreasisemesta@gmail.com  
Cetakan Pertama: 2025

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sebagai kontribusi konseptual dan pedagogis dalam membangun akuntansi sektor publik yang tidak hanya tertib prosedural, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial. Berangkat dari kegelisahan akan minimnya pendidikan akuntansi yang menyentuh dimensi nilai, buku ini menelusuri akar etika dalam pendidikan profesi, serta menawarkan pendekatan integratif antara teori, filsafat, dan praktik.

Dengan memadukan pemikiran dari Aristoteles hingga Nussbaum, dari Confucius hingga Ki Hajar Dewantara, buku ini merancang jembatan antara *kebijaksanaan etis* dan *kecakapan teknis*. Melalui narasi reflektif, teori akademik yang kokoh, dan ilustrasi kasus imajiner yang berbasis realitas lokal, buku ini mengajak pembaca untuk melihat akuntansi sebagai medan nilai—bukan sekadar kalkulasi angka.

Tidak hanya memaparkan gagasan, buku ini juga menyertakan elemen transformatif:

1. Studi kasus reflektif di setiap bab tentang dilema auditor, dosen, dan mahasiswa,
2. Subbab transisi konseptual untuk menjembatani teori dan praksis,
3. Lampiran etika dan pedagogi berupa kurikulum mini, matriks moral-teknis, dan kutipan filosofis kontekstual,
4. Roadmap naratif menuju reformasi pendidikan akuntansi publik di Indonesia menjelang 2045.

Dengan pendekatan ini, buku ini tidak sekadar menjadi buku ajar, melainkan juga peta jalan filosofis dan strategis untuk membangun generasi akuntan publik yang berani bersuara demi keadilan fiskal. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang percaya bahwa angka tidak pernah netral, dan bahwa keadilan dimulai dari cara kita mencatat dan melaporkan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PANGGILAN AKAL BUDI - PENDIDIKAN DAN AKUNTANSI SEBAGAI PENJAGA NILAI PUBLIK.....</b>	<b>1</b>
A. Pengantar Etis: Mengapa Kita Butuh Pendidikan yang Mengakar? .....	1
B. Akuntansi dan Pendidikan: Perspektif Filosofis.....	5
<b>BAB 2 DASAR TEORETIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....</b>	<b>11</b>
A. Evolusi Teori Akuntansi: Dari <i>Stewardship</i> ke <i>Value-Based Accounting</i> .....	11
B. Kerangka Institusional: Akuntansi dalam Pemerintahan .....	15
C. Pendidikan Akuntansi: Kurikulum, Kompetensi, dan Kecakapan Moral .....	20
D. Perbandingan Global: Filsafat Keadilan dan Akuntabilitas dalam Pendidikan Akuntansi Publik.....	25
<b>BAB 3 AKUNTANSI DALAM PRAKTIK - LENSE INDONESIA.....</b>	<b>30</b>
A. Potret Praktik Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.....	30
B. Antara Teori dan Kenyataan: Di Mana Pendidikan Berperan?.....	34
<b>BAB 4 MENUJU MASA DEPAN - PENDIDIKAN SEBAGAI PILAR REFORMASI AKUNTANSI PUBLIK.....</b>	<b>42</b>
A. Reformasi Berbasis Pendidikan: Visi Indonesia 2045 .....	42
B. Membangun Ekosistem: Sinergi Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Masyarakat.....	46
C. Konstelasi Filsafat dan Akuntansi: Etika, Keadilan, dan Tanggung Jawab dalam Praktik Keuangan Publik.....	49

D.	Akuntansi dan Filsafat Nusantara: Menyatukan Etika Kolektif dan Praktik Transparansi.....	63
E.	Bahasa Akuntansi dan Kekuasaan: Narasi, Netralitas, dan Representasi yang Menyesatkan .....	69
F.	Pendidikan Akuntansi dan Pancasila: Integrasi Nilai dalam Keputusan Fiskal dan Audit Sosial .....	74
<b>BAB 5</b>	<b>AKUNTANSI PUBLIK SEBAGAI GERAKAN NILAI: AGENDA INTELEKTUAL, INSTITUSIONAL, DAN INTERGENERASIONAL ...</b>	<b>80</b>
A.	Intelektual Organik dalam Dunia Angka: Peran Akademisi dan Mahasiswa .....	80
B.	Membangun Ekosistem Etika: Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat.....	85
C.	Etika Lintas Generasi: Pendidikan untuk Keuangan Negara yang Berkelanjutan .....	93
D.	Menuju Akuntansi Pembebasan: Imaginasi Etis dan Rekonstruksi Sistem .....	99
E.	Manifes Moral Akuntansi Publik: 10 Prinsip untuk Indonesia 2045.....	105
F.	Akuntansi sebagai Bahasa Keadilan: Menulis Ulang Narasi Fiskal.....	111
G.	Estetika dan Spiritualitas dalam Akuntansi Publik .....	118
	<b>EPILOG - MENJAGA ETIKA DI TENGAH SISTEM .....</b>	<b>128</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>135</b>
	<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>141</b>



**JEJAK BUDI & ANGKA:  
Dasar Filosofis dan Teoretis Akuntansi Publik  
dalam Bingkai Pendidikan**

**Khairudin  
Yanuaris Yanu Dharmawan**



# BAB

# 1

## PANGGILAN AKAL BUDI - PENDIDIKAN DAN AKUNTANSI SEBAGAI PENJAGA NILAI PUBLIK

### **A. Pengantar Etis: Mengapa Kita Butuh Pendidikan yang Mengakar?**

Dalam lanskap tata kelola keuangan publik yang semakin kompleks, pendidikan akuntansi tidak dapat lagi diposisikan semata-mata sebagai sarana transfer keahlian teknis. Ia harus dipahami sebagai proyek etis yang menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab publik, mengakar pada nilai-nilai kebajikan, dan membentuk agen-agen perubahan yang tidak hanya mahir menghitung, tetapi juga mampu mempertanyakan “untuk siapa” dan “mengapa” angka-angka itu disusun. Pendidikan akuntansi yang mengakar bukan hanya mencetak lulusan yang patuh terhadap standar pelaporan, tetapi membentuk individu yang sanggup mempertahankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam sistem yang sering kali tidak netral secara moral (McPhail, 2001; Boyce, 2004; Armstrong, 1993).

Di Indonesia, praktik akuntansi sektor publik berada dalam persimpangan antara dua kutub: efisiensi administratif dan akuntabilitas substantif terhadap rakyat. Ketegangan ini mencerminkan persoalan etis yang lebih dalam: apakah sistem pendidikan kita membentuk profesional yang sekadar mematuhi regulasi, atau yang mampu menegakkan etika meski harus berhadapan dengan tekanan struktural? (Neu, 2006; Cooper & Hopper, 2007).

Aristoteles mengajarkan bahwa etika bukan hanya soal mengetahui apa yang benar, tetapi membiasakan diri memilih yang benar dan melakukannya dalam situasi konkret, *hexis*. Pendidikan yang membentuk *phronimos*, manusia bijak dalam praktik, menjadi imperatif bagi akuntansi sektor publik yang bermartabat (Aristotle, 2009). Dalam pengertian ini, pendidikan adalah latihan kebajikan, bukan sekadar penanaman prosedur (Aristotle, 1996; Nataatmadja, 2010).

Namun di sisi lain, Immanuel Kant menegaskan bahwa tindakan etis lahir dari prinsip kategoris: manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Pendidikan akuntansi yang hanya mengarahkan lulusan pada target efisiensi birokratis, tanpa memperhatikan martabat manusia dan konsekuensi sosial dari akuntansi publik, akan mencetak “petugas teknis” alih-alih agen etika. Kant mengingatkan bahwa tindakan etis tidak bergantung pada hasil, tetapi pada niat baik dan penghormatan terhadap hukum moral universal (dikutip dalam Jonas, 1984).

Perbandingan antara Aristoteles dan Kant menggambarkan dua jalur menuju pendidikan etis dalam akuntansi: yang satu berbasis kebiasaan dan kebijaksanaan praktis, yang lain berbasis kewajiban moral universal. Keduanya saling melengkapi dalam menyusun kerangka pendidikan akuntansi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga menjunjung integritas sebagai dasar profesi (Freire, 1970; Nussbaum, 2010).

Sementara itu, Jonas memperluas cakupan etika teknis ke dalam konteks antargenerasi. Ia menekankan bahwa setiap profesi yang menyangkut kebijakan publik harus memikirkan dampak tindakannya terhadap masa depan umat manusia. Dalam konteks ini, akuntansi publik bukan sekadar soal transparansi hari ini, tetapi soal memastikan keberlanjutan keadilan fiskal bagi generasi mendatang. Pendidikan yang mengakar harus menanamkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab antargenerasi dalam logika pengelolaan anggaran negara (Jonas, 1984; Nussbaum, 2011).

OECD (2018) melalui *The Future of Education and Skills 2030* menyebutkan bahwa salah satu kompetensi utama abad ke-21 adalah *ethical and emotional literacy*. Pendidikan tinggi, termasuk di bidang akuntansi, tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang taat aturan, tetapi juga mampu menilai, mengkritisi, dan memutuskan secara etis dalam konteks publik. Di Indonesia, ketimpangan antara opini WTP dan banyaknya temuan BPK mengindikasikan bahwa kepatuhan administratif belum sejalan dengan integritas substantif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023; Broadbent & Guthrie, 1992).

### **Studi Kasus Imajiner**

Bayangkan seorang mahasiswa akuntansi publik yang lulus dengan nilai sempurna, menguasai SAP, PSAK, dan IFRS. Ia ditempatkan di sebuah dinas pendidikan daerah, di mana ia menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOS. Ia melihat bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan formal yang tidak berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Namun karena semua prosedur dipenuhi, laporan itu dianggap sah. Dalam dilema ini, mahasiswa tersebut terjebak antara dua realitas: regulasi yang dipatuhi vs moralitas yang diabaikan.

Pendidikan seperti apa yang seharusnya mempersiapkan mahasiswa tersebut untuk tidak hanya bertanya “Apakah ini sesuai aturan?”, tetapi juga “Apakah ini adil?”, “Siapa yang dirugikan?”, “Apa akibatnya jika saya diam?” Di sinilah pendidikan yang mengakar memainkan peran krusial—membentuk refleksi, bukan hanya kepatuhan (McPhail, 2001; Armstrong, 1993).

Dewey (1938, dalam Bringle & Hatcher, 1996) melihat pendidikan sebagai kehidupan itu sendiri, bukan persiapan menuju kehidupan. Dia menyerukan pendidikan yang kontekstual, reflektif, dan partisipatif. Pendidikan akuntansi yang mengakar adalah yang mengajarkan mahasiswa untuk hidup dalam angka—tetapi juga hidup bersama makna sosial dari angka tersebut (Boyce, 2004).

Lebih jauh lagi, Freire (1970) menyebut bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Ia menolak pendidikan gaya bank (*banking education*), di mana peserta didik dianggap sebagai wadah pasif, dan mengusulkan pendidikan sebagai dialog pembebas. Dalam konteks akuntansi publik, mahasiswa harus ditempatkan sebagai subjek perubahan— yang memahami konteks sosial, politik, dan moral dari angka-angka yang mereka olah (Nussbaum, 2010; Cooper & Hopper, 2007).

### **Perbandingan Konseptual Tambahan**

Bandingkan pandangan Freire yang radikal dan transformatif dengan Nussbaum yang lebih sistematis dalam *capabilities approach*. Keduanya sama-sama mendorong pendidikan untuk melampaui teknis, tetapi Nussbaum menekankan pentingnya membentuk kemampuan substantif: kemampuan untuk berpikir reflektif, membuat penilaian moral, dan bertindak dengan empati dalam sistem demokrasi (Nussbaum, 2011; Freire, 1970).

Confucius menekankan pentingnya *li* (ritual/sopan santun) dan *ren* (kemanusiaan). Baginya, integritas kolektif masyarakat tidak mungkin terjadi tanpa integritas moral dari pemimpinnya. Dia menyebut bahwa pemimpin yang mengutamakan kebajikan akan melahirkan tatanan sosial yang baik. Ini menegaskan bahwa akuntan publik bukan sekadar operator, tetapi bagian dari jaringan etika negara (Confucius, trans. Legge, 1861).

Dalam konteks lokal, Ki Hajar Dewantara menjadi dasar filosofis yang mengakar di Indonesia. Prinsip *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* menggambarkan bahwa pendidikan adalah proses kolektif untuk membentuk watak bangsa (Nataatmadja, 2012). Akuntansi sektor publik, yang berada dalam struktur negara, harus mendasarkan profesionalismenya pada keteladanan, semangat kolektif, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan akuntansi yang mengakar bukan sekadar proyek profesionalisasi, melainkan proyek kebudayaan dan kebajikan publik. Ia berakar dalam tradisi

filosafat kuno dan modern—dari *phronesis* Aristoteles (Aristotle, 2009), *imperatif kategoris* Kant (dalam Jonas, 1984), *tanggung jawab antargenerasi* Jonas (1984), hingga *pembebasan* Freire (1970) dan *kemampuan substantif* Nussbaum (2011). Pendidikan yang demikian akan melahirkan akuntan-akuntan yang tidak hanya terampil dalam mencatat, tetapi juga bijaksana dalam memutuskan; yang tidak hanya patuh pada prosedur, tetapi juga berpihak pada keadilan.

## **B. Akuntansi dan Pendidikan: Perspektif Filosofis**

Akuntansi sering kali didefinisikan secara sempit sebagai kegiatan mencatat dan melaporkan informasi keuangan, dengan fokus pada presisi angka dan kepatuhan terhadap standar teknis. Namun pandangan ini mengabaikan akar filosofis dan peran sosial akuntansi sebagai institusi makna dalam masyarakat. Di balik laporan keuangan negara, tersimpan narasi kolektif tentang siapa yang dihitung, siapa yang diprioritaskan, dan untuk tujuan apa sumber daya publik dialokasikan. Dengan demikian, akuntansi tidak netral secara moral; ia mencerminkan struktur nilai suatu bangsa dan menjadi cermin kebijakan publik (Cooper & Hopper, 2007; Neu, 2006).

Plato menekankan pentingnya *episteme*—pengetahuan yang melampaui dimensi teknis menuju kebijaksanaan etis. Ia membayangkan bahwa pengelolaan negara ideal dilakukan oleh para *philosopher-kings*, yaitu individu yang memahami logika administrasi tetapi juga mendalami makna keadilan. Jika kita terapkan ke dalam konteks kontemporer, maka akuntan publik seharusnya menjadi semacam *philosopher-accountants*—bukan sekadar pelaksana regulasi fiskal, tetapi juga pengawal nilai-nilai publik. Mereka harus memiliki kapasitas untuk mempertanyakan keabsahan moral suatu kebijakan anggaran, dan secara aktif menjaga integritas informasi keuangan dalam ruang demokrasi (Plato, trans. Bloom, 1991).

Aristoteles melanjutkan gagasan ini melalui konsep *phronesis*, atau kebijaksanaan praktis. Berbeda dari *techne*(keterampilan) dan *episteme* (teori), *phronesis* mengacu

pada kemampuan bertindak etis dalam situasi konkret (Aristotle, 2009). Dalam pendidikan akuntansi, *phronesis* dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis kasus, simulasi dilema etika, dan refleksi atas dampak sosial dari praktik pelaporan. Sejalan dengan McPhail (2001), pendidikan akuntansi harus menumbuhkan *moral imagination*, yaitu kemampuan membayangkan akibat sosial dari keputusan teknis yang tampaknya netral.

### **Kontras: Plato vs Foucault**

Jika Plato memimpikan sistem ideal yang dipimpin oleh kebijaksanaan, maka Michel Foucault justru mengingatkan bahwa institusi seperti akuntansi sering kali menjadi bagian dari rejim pengetahuan dan kekuasaan. Dalam *Discipline and Punish* (Foucault, 1977), Foucault menunjukkan bahwa prosedur administratif dapat menciptakan ilusi netralitas sambil mereproduksi relasi dominasi. Angka dalam laporan keuangan bukan hanya representasi realitas, tetapi juga alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi tidak cukup mengajarkan cara menyusun laporan, tetapi harus membekali mahasiswa dengan kritik institusional. Tanpa itu, akuntan berisiko menjadi reproduktor sistem yang timpang.

### **Kasus Imajiner Reflektif**

Bayangkan seorang lulusan akuntansi, bekerja di sekretariat DPRD. Ia diminta menyusun laporan keuangan yang secara teknis benar tetapi menyamarkan kelebihan perjalanan dinas. Ia tahu bahwa jika ia menolak, ia akan dipindahkan. Jika ia mengikuti, laporan tetap lolos audit karena dokumen lengkap.

Seorang lulusan akuntansi tersebut tidak berada di ruang kosong moral. Pendidikan seperti apa yang bisa membekalinya untuk menghadapi dilema ini? Pendidikan yang hanya mengajarkan IFRS tidak cukup. Ia perlu pendidikan yang menanamkan prinsip Kantian bahwa manusia (termasuk dirinya sendiri dan masyarakat yang dirugikan) bukan alat birokrasi (dalam Jonas, 1984). Ia juga perlu kesadaran *phronesis* (Aristotle, 2009) untuk memilih tindakan yang tepat di tengah tekanan struktural. Confucius, dalam *Analects*, menekankan bahwa

pendidikan sejati adalah proses pembentukan karakter moral, bukan sekadar penambahan informasi. Dua konsep utama yang diajukan adalah *li* (ritual dan sopan santun) dan *ren*(kemanusiaan). Dalam konteks akuntansi publik, pelaporan keuangan bukan hanya dokumentasi administrasi, tetapi perwujudan rasa hormat negara terhadap rakyatnya. Laporan yang disusun sembarangan atau manipulatif bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap etika publik (Confucius, trans. Legge, 1861).

Senada dengan ini, Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu yang tidak membawa *maslahah* (kebaikan sosial) adalah ilmu yang berbahaya. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, ia menyatakan bahwa pencarian ilmu harus dikaitkan dengan tanggung jawab moral (Al-Ghazali, 1981; 2004). Maka, pendidikan akuntansi yang hanya mengejar sertifikasi dan efisiensi pasar kerja, tetapi tidak membentuk kesadaran akan tanggung jawab publik, adalah kegagalan besar. Dalam konteks Indonesia, di mana korupsi dan manipulasi laporan keuangan kerap terjadi di level formal yang sah secara dokumen, prinsip *maslahah* dari Al-Ghazali sangat relevan.

### **Perbandingan Timur-Barat: Confucius vs Rawls**

Jika Confucius berangkat dari harmoni dan hierarki moral, John Rawls menawarkan pendekatan modern tentang keadilan fiskal yang berbasis pada prinsip *difference* dan *fair equality of opportunity*. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa distribusi sumber daya publik harus dilakukan sedemikian rupa agar menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung (Rawls, 1971). Pendidikan akuntansi publik dalam negara demokrasi seperti Indonesia harus membekali mahasiswa untuk menilai apakah struktur fiskal (anggaran dan pelaporan) telah memenuhi prinsip keadilan ini. Maka, pertanyaan akuntansi bukan hanya “berapa?”, tetapi “untuk siapa?”

Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia. Prinsip *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* memberi kerangka

etis yang dapat diterapkan dalam pendidikan akuntansi. Dosen akuntansi tidak cukup menjadi pengajar rumus, tetapi harus menjadi teladan integritas. Mahasiswa tidak cukup menjadi pemroses data, tetapi harus menjadi pembangun semangat kolektif dan pelindung nilai-nilai publik (Nataatmadja, 2012). Di tengah pluralitas dan kerentanan birokrasi Indonesia terhadap praktik-praktik koruptif, prinsip Ki Hajar adalah fondasi pedagogis yang tak tergantikan.

### **Nussbaum dan Etika Substantif dalam Akuntansi**

Sebagai pelengkap, Nussbaum (2011) menekankan bahwa pendidikan harus membentuk *capabilities*, kemampuan substantif untuk memilih, menilai, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks akuntansi publik, ini berarti membentuk kemampuan untuk menolak pelaporan fiktif, mempertanyakan logika anggaran yang tidak adil, dan merancang sistem akuntansi yang berpihak pada masyarakat. Pendidikan berbasis kemampuan etis akan jauh lebih tahan terhadap tekanan struktural daripada sekadar kompetensi teknis.

Dengan demikian, relasi antara akuntansi dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari fondasi filosofis yang dalam. Dari Plato hingga Nussbaum, dari Confucius hingga Al-Ghazali, dari Aristoteles hingga Foucault, kita belajar bahwa profesi akuntansi bukanlah ruang netral. Ia adalah medan nilai—nilai tentang siapa yang dihitung, siapa yang disembunyikan, dan untuk siapa sistem fiskal dijalankan. Maka pendidikan akuntansi yang benar adalah pendidikan yang memanusiakan, membebaskan, dan membekali. Bukan hanya untuk memahami angka, tetapi untuk menakar makna dan membela nilai (Freire, 1970; McPhail, 2001; Nussbaum, 2010; 2011).

### **Orientasi Nilai Bab I: Pendidikan dan Akuntansi sebagai Medan Etika**

Bab I membuka fondasi konseptual tentang pendidikan akuntansi bukan sebagai media pengajaran teknis, tetapi sebagai arena pembentukan nilai. Diperkuat oleh pandangan Kant (etika deontologis), Aristoteles (*phronesis*), dan Hans Jonas (etika

tanggung jawab), orientasi nilai dalam bab ini menggarisbawahi bahwa akuntansi publik adalah proyek moral, bukan hanya manajerial. Pendidikan tinggi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus imajiner dan refleksi Ki Hajar Dewantara, memiliki potensi membentuk bukan hanya tenaga kerja, tetapi subjek etis yang sadar akan tanggung jawab publik.

### **“Mengapa Akuntansi Bukan Sekadar Prosedur?”**

#### **1. Dari Prosedur ke Pemaknaan: Awal Perjalanan Etis**

Akuntansi sektor publik di Indonesia sering kali didefinisikan dalam dimensi prosedural: laporan, format, aturan, dan tenggat waktu. Namun sejarah dan filsafat profesi ini menunjukkan bahwa akuntansi selalu lebih dari sekadar mekanisme birokrasi. Ia adalah cerminan dari sistem nilai yang dianut sebuah masyarakat. Apa yang dilaporkan, bagaimana dilaporkan, dan untuk siapa laporan dibuat—semuanya adalah pertanyaan etis, bukan teknis.

Melalui pendekatan awal dalam Bagian I, kita memulai dengan pertanyaan besar: “Apakah kita sedang mencetak pelapor atau penjaga nurani?” Ini adalah pertanyaan dasar yang akan menuntun struktur buku ini: dari penyadaran etis hingga desain pendidikan akuntansi yang transformatif.

#### **2. Prosedur Tanpa Etika: Ilusi Kepatuhan**

Dalam praktik birokrasi, sering kali yang penting adalah “sesuai format.” Maka muncul opini WTP yang tidak sejalan dengan kualitas pelayanan publik. Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh Broadbent dan Guthrie (1992) disebut sebagai kepatuhan simbolik dalam sistem akuntabilitas publik: bentuk kepatuhan administratif yang tampak rapi tetapi miskin makna substantif.

Aristoteles mengingatkan bahwa kebajikan bukan hanya mengetahui yang benar, tetapi melakukan yang benar dalam situasi kompleks (*phronesis*) (Aristotle, 2009). Jika pendidikan hanya melatih mahasiswa untuk “mengisi kolom dengan benar,” maka ia gagal menanamkan kemampuan untuk bertindak benar dalam realitas penuh ambiguitas.

### **3. Pendidikan Sebagai Proyek Etika**

Bagian I telah menyusun landasan mengapa pendidikan akuntansi harus bersifat etis dan reflektif. Seperti dikatakan Freire, pendidikan harus membebaskan—membuka ruang berpikir, bukan sekadar menyampaikan jawaban. Maka pertanyaan mendasar dalam bagian ini bukan “apa yang diajarkan?”, tetapi “untuk siapa kita mendidik?”

Di sinilah titik transisi menuju Bagian II menjadi penting. Setelah membangun fondasi filosofis dan nilai, kita bergerak ke ranah teoretis—bagaimana nilai-nilai itu harus diartikulasikan dalam sistem dan teori akuntansi sektor publik yang hidup.

# BAB 2

## DASAR TEORETIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

### A. Evolusi Teori Akuntansi: Dari *Stewardship* ke *Value-Based Accounting*

Perjalanan historis teori akuntansi publik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan antara negara dan warganya. Sejak masa kolonial, akuntansi telah digunakan sebagai alat kendali administratif, terutama untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan kehendak penguasa pusat, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat sebagai pemilik sah dari sumber daya negara. Dalam paradigma ini, fungsi utama akuntansi adalah sebagai mekanisme *stewardship* – suatu bentuk pertanggungjawaban vertikal dari bawahan kepada atasan, dari pelaksana kepada penguasa fiskal. Sebagaimana diuraikan oleh Anthony (1989), *stewardship accounting* berfokus pada penyampaian informasi yang bersifat retrospektif: bagaimana dana digunakan, apakah sesuai anggaran, dan apakah ada penyimpangan.

Namun pendekatan ini menjadi tidak memadai ketika negara mulai bertransformasi menjadi entitas demokratis yang menekankan peran warga sebagai subjek utama tata kelola. Sejak era reformasi 1998, muncul kesadaran bahwa praktik akuntansi publik harus berkembang dari sekadar kepatuhan administratif menjadi ruang dialog antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas tidak bisa lagi dipahami sebagai *compliance* teknis, tetapi harus dibingkai dalam kerangka pertanggungjawaban moral terhadap warga negara. Maka, teori

*accountability* menjadi kerangka yang lebih relevan, yang tidak hanya menjawab kepada atasan, tetapi kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan fiskal.

Broadbent dan Guthrie (1992) menekankan bahwa akuntansi publik tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik dan harus dilihat sebagai praktik diskursif yang dapat membentuk dan dibentuk oleh kekuasaan. Akuntabilitas yang sejati bersifat reflektif, ia membuka diri terhadap kritik, koreksi, dan evaluasi sosial. Dalam hal ini, akuntansi menjadi arena diskursif, bukan hanya prosedural.

Konsep ini berkembang dalam teori kontemporer menjadi pendekatan *value-based* atau *public value accounting*, sebuah paradigma yang menempatkan nilai sosial sebagai pusat dari sistem akuntansi. Meskipun istilah ini belum mapan dalam literatur Indonesia, semangatnya senada dengan gagasan Habermas (1984) tentang ruang publik yang deliberatif dan partisipatif. Dalam konteks akuntansi, ini berarti bahwa laporan keuangan bukan hanya menginformasikan serapan anggaran, tetapi juga mencerminkan pencapaian nilai seperti keadilan sosial, redistribusi kesejahteraan, dan partisipasi fiskal.

### **Ilustrasi Konseptual: Akuntan dan Nilai Sosial**

Bayangkan seorang akuntan publik menyusun laporan realisasi anggaran program bantuan pangan. Secara teknis, semua anggaran terserap sesuai jadwal. Namun, di lapangan, bantuan tersebut justru menghambat ketahanan pangan lokal dan menyebabkan ketergantungan. Jika akuntansi hanya melihat efisiensi, laporan ini akan dinilai berhasil. Tapi jika pendekatan *public value* diterapkan, laporan harus mengungkap dampak sosial, keberlanjutan, dan penerimaan masyarakat. Inilah transformasi yang ingin dicapai teori ini: dari angka ke makna.

Pendekatan ini sejalan dengan *capability approach* dari Sen (1999), yang menolak reduksi pembangunan pada indikator ekonomi semata. Ia memperkenalkan ide *freedom to achieve well-being*, yaitu kemampuan substantif manusia untuk hidup secara bermartabat. Jika diadopsi dalam akuntansi publik, maka

pertanyaan dasarnya berubah: Apakah anggaran ini memperluas kapabilitas warga? Apakah pelaporan keuangan membantu pengambilan keputusan yang inklusif dan adil?

### **Perbandingan Nilai: Sen vs Bentham**

Dalam hal ini, pemikiran Sen berbeda tajam dari *utilitarianisme* klasik Bentham yang hanya menghitung agregat “kebahagiaan terbesar.” Bagi Sen, keadilan tidak bisa diukur hanya dari total manfaat, tetapi dari distribusi kesempatan yang nyata. Maka, akuntansi publik berbasis nilai tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga *equity* dan *agency*—kemampuan warga untuk berpartisipasi dan menentukan arah kebijakan publik.

Pendekatan nilai publik ini telah diadopsi dalam berbagai sistem pengukuran kinerja negara. Di Inggris, konsep *Value for Money (VfM)* yang semula hanya mencakup *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*, kini ditambah dengan dimensi *equity*—keadilan dalam distribusi manfaat. Indonesia sendiri, melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mulai menerapkan prinsip *performance-based budgeting* dan transparansi berbasis hasil. Namun, tantangan terbesar tetap pada pembentukan kerangka berpikir baru: dari *output* ke *outcome*, dari prosedur ke etika.

### **Akuntansi sebagai Wacana Sosial: Konstruktivisme dan Etika**

Dalam literatur akuntansi kritis, para peneliti seperti Broadbent dan Guthrie (1992) serta Cooper dan Hopper (2007) menekankan pentingnya pendekatan yang menghubungkan antara konteks sosial dan nilai-nilai normatif. Akuntansi tidak boleh direduksi menjadi sekadar praktik teknokratis yang lepas dari pertimbangan etis, tetapi juga tidak cukup jika hanya dipahami sebagai abstraksi ideal yang jauh dari realitas birokrasi. Di sinilah posisi pendidikan menjadi strategis—untuk membentuk akuntan publik yang memahami medan kuasa, kompleksitas sosial, dan tanggung jawab moral dalam kerjanya.

Perubahan cara pandang ini juga mencerminkan pergeseran epistemologis dari positivisme ke konstruktivisme. Jika positivisme memandang akuntansi sebagai cermin realitas yang objektif, maka pendekatan konstruktivis melihat akuntansi sebagai konstruksi sosial, sebuah produk budaya yang merefleksikan nilai, kekuasaan, dan kepentingan. Neu (2006) menunjukkan bahwa ruang publik sering kali dikonstruksi melalui pelaporan akuntansi yang tampak netral, tetapi sebenarnya memilih siapa yang dihitung, siapa yang disembunyikan, dan arah mana yang diprioritaskan oleh kebijakan fiskal. Dengan demikian, laporan keuangan bukanlah cermin semata, tetapi narasi: tentang siapa yang dianggap penting, dan bagaimana sumber daya kolektif dibagikan.

### **Filsafat Klasik dan Tujuan Akuntansi**

Dalam filsafat klasik, transformasi ini sejalan dengan pandangan Plato mengenai *episteme*, pengetahuan sejati yang hanya dicapai jika akal diarahkan pada *the good*. Akuntansi publik yang baik bukanlah yang sekadar benar secara teknis, tetapi yang benar secara etis dan sosial. Aristoteles menambahkan bahwa semua tindakan harus memiliki *telos*, tujuan akhir yang sesuai dengan *eudaimonia*, kehidupan yang baik dalam komunitas yang adil. Jika akuntansi dijalankan tanpa memahami tujuannya, maka ia kehilangan arah dan menjadi pembenar kebijakan apa pun yang disodorkan kekuasaan.

### **Kontras Etis: Aristoteles vs Foucault**

Namun, agar tidak terjebak dalam idealisme semata, kita perlu membaca ulang akuntansi dari sudut pandang Foucault (1978), yang menunjukkan bagaimana sistem-sistem teknis dapat menyamakan kontrol dan kekuasaan. Akuntansi bisa menjadi *micro-physics of power*, alat untuk mengatur populasi secara halus dan sistemik. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi harus memperkenalkan kritik sebagai bagian dari kompetensi dasar, agar akuntan dapat menjadi penjaga etika, bukan pengukuh dominasi.

Dengan demikian, evolusi teori akuntansi sektor publik dari *stewardship* ke *value-based accounting* bukan sekadar perubahan terminologi, tetapi pergeseran epistemik dan moral yang mendalam. Ia mencerminkan perubahan cara pandang: dari akuntansi sebagai instrumen kendali administratif, menuju akuntansi sebagai refleksi nilai publik dan alat etika sosial. Untuk itu, pendidikan akuntansi publik di Indonesia harus menjawab tantangan ini dengan membangun kurikulum yang mengintegrasikan filsafat, etika, dan sensitivitas sosial ke dalam inti pembelajaran. Hanya dengan demikian, profesi akuntan publik akan menjadi benteng nilai dan bukan sekadar pelayan angka.

## **B. Kerangka Institusional: Akuntansi dalam Pemerintahan**

Transformasi tata kelola sektor publik selama beberapa dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari dinamika global mengenai bagaimana negara semestinya dikelola. Dua pendekatan besar mendominasi diskursus internasional: *New Public Management* (NPM) dan *Post-New Public Management* (Post-NPM). Keduanya memberikan pengaruh signifikan terhadap peran, fungsi, dan orientasi sistem akuntansi dalam institusi pemerintahan, termasuk di Indonesia. Namun, keduanya juga merepresentasikan dua corak filsafat kebijakan yang berbeda dalam memaknai hubungan antara negara, birokrasi, dan warga negara.

NPM, yang berkembang sejak akhir 1980-an di negara-negara Anglo-Saxon, lahir dari semangat liberalisme ekonomi yang mengusung efisiensi, kompetisi, dan rasionalitas pasar ke dalam birokrasi negara. Pemerintahan diidealkan bekerja seperti perusahaan: ramping, terukur, dan fokus pada hasil yang terlihat. Dalam paradigma ini, akuntansi berfungsi sebagai *instrument of control*, yang memungkinkan negara mengelola pengeluaran secara efisien dan memastikan pertanggungjawaban teknis. Laporan keuangan bukan lagi alat refleksi sosial, melainkan sistem informasi manajerial yang

mendukung keputusan berbasis angka (Broadbent & Guthrie, 1992).

Namun, pendekatan ini tidak bebas dari kritik. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, penerapan prinsip NPM kerap mengabaikan konteks sosiopolitik dan budaya lokal. Efisiensi yang dipaksakan sering kali mengorbankan aksesibilitas dan keadilan pelayanan. Kesenjangan tanggung jawab muncul ketika layanan publik dialihdayakan ke pihak swasta, tetapi tanpa mekanisme pengawasan yang akuntabel secara sosial. Akuntansi publik pun dikhawatirkan berubah dari penjaga nilai publik menjadi sekadar administrator biaya (Boyce, 2004; Neu, 2006).

Reaksi terhadap kegagalan NPM memunculkan pendekatan *Post-NPM*, yang tidak menolak efisiensi, tetapi menekankan pentingnya transparansi, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, akuntansi diposisikan kembali sebagai *medium governance*—bukan sekadar alat pelaporan, tetapi juga jembatan antara negara dan warga. Transparansi bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi tentang keterbukaan institusional terhadap dialog publik dan pertanggungjawaban etis (Habermas, 1984).

Di Indonesia, gelombang reformasi pasca-1998 menandai transformasi ini. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengubah kerangka akuntansi pemerintahan dari pendekatan kas ke akrual. Hal ini dimaksudkan bukan hanya untuk meningkatkan akurasi, tetapi juga untuk menghadirkan *kebenaran fiskal*—yakni penyajian informasi yang mampu mencerminkan keseluruhan posisi keuangan negara, termasuk aset dan kewajiban jangka panjang. Laporan keuangan menjadi bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak warga untuk tahu.

Freire (1970) dan Nussbaum (2010) memperkuat pandangan bahwa sistem pelaporan keuangan pemerintah harus dilihat sebagai bagian dari arsitektur moral negara: ia harus menyampaikan bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi *mengapa, untuk siapa, dan dengan dampak apa*. Dalam paradigma demokratis, akuntansi publik tidak cukup hanya efisien secara teknis. Ia harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akses publik, dan keadilan fiskal.

### **Ilustrasi Konseptual: Anggaran Desa dan Legitimasi Etis**

Bayangkan laporan realisasi anggaran desa disusun dengan lengkap dan sesuai aturan. Namun warga tidak mengetahui apa yang dilaporkan, karena bahasa laporan tidak komunikatif, dan forum partisipasi hanya formalitas. Secara administratif, desa dinilai berhasil. Tapi secara etis, transparansi belum terwujud. Dalam konteks inilah akuntansi perlu dipahami bukan sebagai produk birokrasi, melainkan sebagai *wacana etika publik*.

Bobbio (1990) menyatakan bahwa *demokrasi tanpa transparansi adalah ilusi*. Dalam sistem demokrasi, hak untuk tahu adalah hak sipil yang fundamental. Maka, pelaporan keuangan negara adalah bentuk pengakuan bahwa kekuasaan fiskal berasal dari rakyat, dan oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Namun transparansi yang dimaksud bukan sekadar keterbukaan dokumen, melainkan *literasi fiskal*—kemampuan masyarakat untuk membaca, memahami, dan menilai laporan keuangan negara secara kritis. Dalam konteks ini, pendidikan akuntansi publik harus membekali mahasiswa bukan hanya dengan kompetensi SAP atau PSAK, tetapi juga dengan *transparency literacy*: kemampuan untuk mengenali struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik angka.

Konsep *social audit* menjadi salah satu instrumen strategis dalam pendekatan ini. Berbeda dari audit teknis, *social audit* membuka ruang bagi warga untuk mengevaluasi apakah anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, ini membutuhkan bahasa akuntansi yang

inklusif, metode pelaporan yang komunikatif, dan keterbukaan pemerintah terhadap umpan balik.

Dalam filsafat klasik, ide tentang keterbukaan dan kesetaraan dalam pemerintahan sudah dirumuskan dalam gagasan *isonomia* oleh Herodotus—sebuah konsep yang menekankan kesamaan akses terhadap hukum dan informasi sebagai fondasi demokrasi. Sementara dalam filsafat modern, Habermas (1984) menekankan pentingnya *ruang publik* (*public sphere*) sebagai tempat di mana argumen rasional disampaikan secara terbuka, dan di mana legitimasi kekuasaan diperoleh melalui diskursus. Akuntansi, dalam kerangka ini, adalah *tindakan komunikatif*—ia menghubungkan negara dan rakyat dalam medium yang dapat diverifikasi, diperdebatkan, dan dikoreksi.

### **Perbandingan Filosofis: Habermas vs Hayek**

Sementara Habermas (1984) melihat akuntansi sebagai bagian dari *ruang publik deliberatif*, yakni instrumen komunikasi yang memungkinkan warga negara terlibat dalam proses pembentukan opini dan kehendak kolektif, Hayek (1944) lebih menekankan efisiensi sistemik dan peringatan terhadap bahaya intervensi negara yang berlebihan dalam sistem ekonomi. Bagi Hayek, mekanisme pasar adalah sistem informasi yang paling efisien, dan terlalu banyak birokrasi atau regulasi justru menghambat kebebasan individu dan inovasi.

Perbedaan paradigma ini sangat penting dalam konteks Indonesia: apakah laporan keuangan publik diarahkan untuk memperkuat efisiensi fiskal sesuai logika pasar, ataukah untuk memperluas partisipasi warga dalam pengambilan keputusan anggaran dan evaluasi kebijakan? Ketegangan antara keduanya tidak harus dilihat sebagai pertentangan biner, tetapi sebagai dialektika yang produktif—di mana pendidikan akuntansi harus menempatkan kedua kutub ini sebagai ruang refleksi kritis dan pengembangan kapasitas etis mahasiswa.

Dengan demikian, kerangka institusional akuntansi publik tidak bisa dipisahkan dari dinamika ideologi, filsafat politik, dan tuntutan etis masyarakat. Akuntansi bukan sekadar

praktik pencatatan, tetapi bagian dari struktur komunikasi negara. Broadbent dan Guthrie (1992) menunjukkan bahwa perubahan akuntansi sektor publik selalu terkait erat dengan transformasi nilai dan kekuasaan.

Reformasi sistem akuntansi di Indonesia adalah reformasi moral dan demokratis, yang menuntut adanya transformasi dalam cara kita mendidik, menyusun kebijakan, dan memahami akuntabilitas.

Pendidikan akuntansi sektor publik harus merespons hal ini dengan menciptakan kurikulum yang menyatukan prinsip *governance*, teori *deliberasi publik*, dan keterampilan komunikasi fiskal. Hanya dengan demikian, akuntan masa depan akan mampu menjembatani dunia angka dan dunia nilai; dunia birokrasi dan dunia rakyat.

### **Studi Kasus Reflektif-Dilema Auditor Desa dan Kepentingan “Warga”**

Seorang auditor internal dari inspektorat kabupaten tengah melakukan audit keuangan desa dalam program pembangunan jalan lingkungan. Ia menemukan bahwa sebagian dana digunakan untuk pengadaan barang yang tidak tercantum dalam RAB, seperti sembako bagi warga, yang dibeli menggunakan dana pembangunan fisik. Kepala desa membenarkan penggunaan dana tersebut, sambil berkata, “Ini semua demi warga, yang penting masyarakat senang.”

Auditor itu bingung. Di satu sisi, ia melihat manfaat langsung yang dirasakan warga. Namun di sisi lain, jelas terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Jika dilaporkan sesuai aturan, kemungkinan besar kepala desa akan dimintai pertanggungjawaban dan konflik sosial bisa muncul. Namun jika diloloskan, integritasnya sebagai auditor dipertaruhkan.

#### **Pertanyaan Reflektif:**

1. Apakah “untuk rakyat” bisa menjadi alasan membenarkan pelanggaran anggaran?
2. Bagaimana auditor seharusnya bertindak tanpa merusak harmoni sosial tetapi tetap menjaga akuntabilitas?

3. Pendidikan seperti apa yang bisa membekali auditor desa untuk menghadapi dilema seperti ini?

### **C. Pendidikan Akuntansi: Kurikulum, Kompetensi, dan Kecakapan Moral**

Pendidikan akuntansi sektor publik menghadapi tantangan multidimensi dalam menjawab kebutuhan zaman. Ia berada dalam tekanan ganda: di satu sisi, tuntutan efisiensi dan standar teknis yang semakin kompleks – dari SAP hingga PSAK berbasis akrual; di sisi lain, kegelisahan moral akibat defisit kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan akuntansi tidak dapat diposisikan hanya sebagai media transfer kompetensi teknis. Ia adalah arena pembentukan *subjek etis*, yaitu profesional yang mampu menavigasi dilema antara struktur birokrasi dan mandat moral pelayanan publik.

Dalam konteks ini, kurikulum akuntansi tidak boleh terjebak dalam dikotomi antara teori dan praktik. Ia harus bergerak melampaui pendekatan *instrumentalist*, dan menjelma menjadi ekosistem pendidikan yang membentuk keterampilan teknis sekaligus *kebijaksanaan etis*, kemampuan untuk bertindak berdasarkan penilaian moral dalam menghadapi kompleksitas sosial.

#### **Perbandingan Konseptual: Kompetensi vs Kapabilitas**

Pendidikan berbasis *outcome-based education* (OBE) memang telah menjadi acuan utama dalam reformasi kurikulum akuntansi di berbagai universitas di Indonesia. Ia berorientasi pada capaian belajar yang terukur, misalnya: menyusun laporan keuangan berbasis akrual, menganalisis APBN/APBD, atau menguasai perangkat audit berbasis risiko. Namun jika capaian ini tidak dibingkai dalam nilai moral, ia hanya akan menghasilkan teknokrat yang efisien tetapi etis-buta. Seperti dikritik oleh Armstrong (1993), pendidikan yang berfokus hanya pada keterampilan teknis rawan melahirkan “profesional amoral”, mereka yang patuh pada sistem, tetapi tidak mampu menilai keadilan sistem itu sendiri.

Dalam filsafat pendidikan modern, Nussbaum (2010) membedakan antara *competency* dan *capability*. Kompetensi merujuk pada kemampuan teknis-fungsional, sementara kapabilitas adalah kapasitas untuk bertindak berdasarkan nilai. Dalam *capability approach*, pendidikan tidak hanya mengajarkan *apa* yang bisa dilakukan, tetapi juga membentuk *mengapa* dan *untuk siapa* hal itu dilakukan. Dalam konteks akuntansi, ini berarti membangun *reasoned judgment*, kemampuan untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan publik, keberpihakan sosial, dan keberanian moral.

### **Refleksi Kritis: Apakah Kurikulum Kita Mendidik untuk Mengabdikan?**

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah mulai menyisipkan mata kuliah etika profesi atau pendidikan antikorupsi dalam program studi akuntansi. Namun, masih banyak tantangan: kurikulum padat, evaluasi berbasis hafalan, dan tenaga pendidik yang berasal dari latar belakang teknis murni, sehingga belum terlatih dalam pengajaran etika publik. Dalam kondisi ini, etika menjadi tambahan kosmetik, bukan elemen struktural.

Lebih ironis lagi, mahasiswa sering kali diajarkan “apa yang benar secara prosedural,” tetapi tidak dibekali dengan keberanian untuk menantang sistem yang secara substansial tidak adil. Hal ini memperlihatkan adanya *defisit refleksi*, yang justru berlawanan dengan tujuan pendidikan sebagai wahana pembebasan. Maka, pendidikan akuntansi publik harus dikembalikan pada fungsinya sebagai *medium pemanusiaan*, bukan hanya pabrik sertifikasi.

### **Studi Kritis: Accounting Ethics Education dan Norma Kultural**

Jackling et al. (2007) dalam risetnya menunjukkan bahwa integrasi etika ke dalam kurikulum akuntansi secara signifikan memperkuat kepekaan mahasiswa terhadap konflik kepentingan dan ketegangan moral dalam profesi. Namun mereka juga mencatat bahwa keberhasilan pendidikan etika sangat bergantung pada metodologi pengajaran. Ceramah satu arah tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah *refleksi naratif*,

*simulasi kasus nyata*, dan *forum diskusi terbuka* yang memperbolehkan mahasiswa bergumul secara sadar dengan dilema etis.

IFAC melalui IES 4 juga menegaskan bahwa pendidikan akuntansi tidak lengkap tanpa komponen nilai-nilai profesional: kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan berbasis integritas. Namun pengintegrasian standar ini dalam konteks Indonesia harus memperhatikan dimensi budaya: nilai gotong royong, rasa malu, dan kekuatan komunitas lokal harus dijadikan basis pembelajaran etika publik.

### **Perspektif Arete dan al-insān al-fāḍil**

Dalam pandangan Aristoteles, pendidikan adalah proses pembentukan *arete*, kebajikan moral yang diwujudkan melalui *habituasi*. Kebajikan tidak diajarkan melalui teori, tetapi melalui latihan bertindak benar, refleksi, dan keteladanan. Maka evaluasi dalam pendidikan akuntansi seharusnya tidak berhenti pada ujian tertulis, tetapi mencakup penilaian terhadap keputusan moral yang diambil mahasiswa dalam simulasi kebijakan fiskal, audit etis, atau studi kasus konflik anggaran.

Sementara itu, dalam filsafat Islam klasik, Al-Farabi menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk *al-insān al-fāḍil*—manusia utama yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkomitmen terhadap kemaslahatan sosial. Ilmu akuntansi dalam hal ini harus diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan distribusi, bukan sekadar sistem untuk menghitung angka-angka administratif. Pendidikan yang demikian tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi *pengabdi nilai*.

### **Ki Hajar Dewantara dan Emansipasi Akuntansi**

Dalam konteks Indonesia, warisan Ki Hajar Dewantara sangat relevan. Pendidikan baginya bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses *memerdekakan manusia* dari ketakutan, ketidaktahuan, dan ketundukan. Prinsip *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* adalah model kepemimpinan etis yang sangat kontekstual untuk profesi akuntansi publik. Dosen akuntansi publik harus menjadi

teladan integritas; mahasiswa harus dibimbing untuk menjadi pemimpin sosial yang mengabdikan pada kebenaran.

### **Ilustrasi Reflektif: Mahasiswa dan Dilema Audit Desa**

Bayangkan seorang mahasiswa magang di desa terpencil. Ia diminta membantu membuat laporan keuangan desa yang sebenarnya telah dimanipulasi. Kepala desa mengatakan bahwa semua dana digunakan untuk “kepentingan bersama” dan meminta mahasiswa untuk tidak banyak bertanya. Mahasiswa ini tidak tahu harus menolak atau mengikuti. Pendidikan seperti apa yang bisa membekalinya untuk memahami bahwa “kepentingan bersama” tidak bisa menjadi alasan untuk menutupi pelanggaran prosedur dan moral? Ia membutuhkan *phronesis*, kebijaksanaan praktis untuk bertindak benar dalam ketidakpastian.

Pendidikan akuntansi publik yang ideal bukan hanya membentuk profesional yang cekatan menyusun laporan, tetapi juga manusia yang *tajam secara moral, jernih dalam pertimbangan etis, dan berani menyuarkan nilai publik*. Pendidikan ini bukan sekadar pengajaran sistem, tetapi proses *pembentukan watak sosial* yang sanggup melampaui sistem ketika sistem itu gagal menjunjung keadilan.

Dengan mengintegrasikan filsafat, etika, dan pemahaman kritis ke dalam kurikulum akuntansi publik, kita tidak hanya memperkuat keahlian teknis generasi baru, tetapi juga memperluas imajinasi etis mereka untuk membayangkan sistem keuangan negara yang lebih adil, transparan, dan manusiawi.

### **Studi Kasus Reflektif: Dosen Akuntansi dan Tekanan Etika Akademik**

Dr. Ratna, dosen akuntansi publik di sebuah universitas negeri terkemuka, telah mengajar selama 12 tahun. Dalam kelas Etika Profesi Akuntansi, ia selalu memulai kuliah dengan studi kasus dilematis, dari skandal Enron hingga penyimpangan laporan keuangan desa. Ia percaya bahwa tanpa pengajaran etika yang hidup, mahasiswa hanya akan menjadi ahli angka tanpa hati.

Namun pada suatu rapat kurikulum, ia dipanggil oleh ketua program studi.

“Bu Ratna, tolong sesuaikan bobot materi etika. Mahasiswa mengeluh. Katanya tidak relevan dengan SKD CPNS dan tidak keluar di UTS/UTS. Kita ingin nilai bagus, jangan bebani mereka dengan teori moral.”

Ratna terdiam. Ia memahami realitas. Banyak mahasiswa datang dari keluarga pas-pasan. Mereka mengejar pekerjaan yang menjanjikan. Namun Ratna gelisah: jika ia menuruti saran itu, berarti ia mengkhianati panggilan intelektualnya. Ia bukan sekadar pengajar, tetapi *pendidik nurani publik*.

Suatu hari, ia bertanya pada mahasiswanya di tengah diskusi kasus:

“Jika kalian menemukan kepala desa memalsukan laporan karena terpaksa membantu rakyatnya, apa yang kalian lakukan?”

Kelas hening. Seorang mahasiswa menjawab, “Yang penting sesuai prosedur, Bu. Kalau tidak, kita bisa disalahkan.”

Ratna sadar, mereka hanya mengulang apa yang sistem tanamkan.

### **Refleksi Etis dan Filosofis**

Kasus ini mencerminkan kritik Freire tentang *pendidikan gaya bank*: mahasiswa hanya menyerap informasi tanpa diberi ruang berpikir kritis. Pendidikan menjadi alat reproduksi sistem, bukan perubahan sosial.

Ratna menghadapi dilema antara menjadi *intelektual organik*, yang setia pada nilai keadilan, atau *intelektual tradisional* yang tunduk pada sistem. Dalam etika Kantian, tindakan benar harus didasarkan pada niat yang baik dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara dalam perspektif Nussbaum, pengajaran etika adalah pembentukan *capabilities* mahasiswa untuk menjadi warga demokratis yang etis, bukan teknokrat pasif.

#### **D. Perbandingan Global: Filsafat Keadilan dan Akuntabilitas dalam Pendidikan Akuntansi Publik**

Praktik dan pendidikan akuntansi sektor publik tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa; ia senantiasa dibentuk dan dipengaruhi oleh kerangka filosofis, historis, serta institusional suatu bangsa. Di banyak negara dengan reputasi tata kelola tinggi, prinsip keadilan dan akuntabilitas fiskal tidak semata dimaknai dalam aspek teknis, tetapi sebagai refleksi nilai-nilai moral dan sosial yang telah mengakar dalam kebudayaan dan filsafat pemerintahan mereka. Bab ini mengkaji bagaimana sistem pendidikan akuntansi publik di Finlandia, Denmark, Jepang, dan Jerman memanifestasikan prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana Indonesia dapat memetik pelajaran dari pendekatan global ini.

##### **Finlandia: Pendidikan Akuntansi dan Etika Sosial dalam Negara Kesejahteraan**

Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan egaliter dan pendekatan pelayanan publik berbasis kepercayaan sosial. Pendidikan akuntansi di Finlandia tidak hanya berfokus pada teknikalitas, tetapi mengintegrasikan pembelajaran berbasis nilai publik dan etika kebijakan. Modul-modul seperti *ethics in public management* dan *social accountability* menjadi bagian integral dari kurikulum universitas seperti University of Helsinki dan Aalto University School of Business. Pendekatan ini selaras dengan model negara kesejahteraan Nordik yang berakar pada filsafat egalitarianisme. Rawls (1971), melalui prinsip *fair equality of opportunity* dan *difference principle*, menjadi rujukan implisit bagi sistem distribusi fiskal mereka. Transparansi fiskal bukan sekadar indikator administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak sosial warga untuk mengetahui dan menilai bagaimana uang publik digunakan.

##### **Denmark: Akuntabilitas sebagai Civic Trust**

Di Denmark, akuntabilitas publik bertumpu pada konsep *civic trust*—kepercayaan warga terhadap pemerintah yang dibangun melalui partisipasi dan keterbukaan. Kurikulum

akuntansi publik di Copenhagen Business School, misalnya, mencakup pembelajaran tentang akuntansi partisipatif, komunikasi fiskal publik, dan audit sosial berbasis komunitas. Mahasiswa dilatih untuk membaca laporan keuangan sebagai dokumen politik dan moral, bukan hanya finansial. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan pemikiran Young (2000) mengenai demokrasi komunikatif, di mana suara dari berbagai kelompok sosial, termasuk yang termarginalkan, harus terlibat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan fiskal. *Civic republicanism* menjadi dasar filsafat politik yang menggerakkan sistem fiskal Denmark: bahwa warga negara bukan hanya penerima layanan, tetapi juga mitra deliberatif dalam menentukan arah pengeluaran negara.

### **Jepang: Keseimbangan antara Hierarki dan Etika Kolektif**

Sistem pendidikan akuntansi publik di Jepang mencerminkan keterpaduan antara struktur birokratis yang hierarkis dan nilai-nilai etika kolektif yang bersumber dari filsafat Konfusianisme. Konsep *giri* (kewajiban moral) dan *on* (utang budi) membentuk fondasi hubungan profesional dan loyalitas institusional. Pendidikan akuntansi di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) mengintegrasikan pelatihan *etika pelayanan publik* dalam bentuk simulasi konflik kepentingan dan pengambilan keputusan berbasis moral.

Filsafat Konfusius, melalui konsep *li* (ritual moral) dan *ren* (kemanusiaan), mengajarkan bahwa tata kelola yang baik harus dimulai dari integritas personal dan harmoni sosial (Confucius, trans. Legge, 1861). Di Jepang, prinsip transparansi fiskal cenderung difokuskan pada integritas internal dan kestabilan prosedural, alih-alih tekanan eksternal dari publik.

### **Jerman: Akuntansi sebagai Rasionalitas Legal dan Etika Institusional**

Jerman menawarkan model di mana akuntansi publik dikembangkan dalam kerangka *Rechtsstaat*, negara hukum yang menjadikan regulasi bukan sekadar instrumen teknis, tetapi ekspresi kehendak moral negara. Pendidikan akuntansi publik di universitas seperti Humboldt University atau Universität

Leipzig menekankan integrasi hukum fiskal dan filosofi etika profesi. Mahasiswa mempelajari teori konstitusi fiskal, hak sosial warga, dan audit berbasis prinsip *Rechenschaftspflicht* (kewajiban pertanggungjawaban).

Tradisi Kantian berpengaruh kuat dalam sistem ini. Immanuel Kant (1993) menegaskan bahwa moralitas publik harus dibangun atas dasar *imperatif kategoris*, yakni bahwa setiap tindakan harus dapat dijadikan prinsip universal. Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintah bukan hanya laporan administratif, tetapi perwujudan komitmen negara terhadap keadilan dan penghormatan atas martabat warganya.

**Tabel 2.1** Komparasi Filosofis dan Implikasi bagi Indonesia

Negara	Fokus Etika Fiskal	Karakter Pendidikan Akuntansi Publik	Filsafat Dominan
Finlandia	Pemerataan dan kepercayaan sosial	Etika sosial, manajemen nilai publik	Kesejahteraan universal, Rawlsian
Denmark	Partisipasi warga	Akuntansi partisipatif dan audit sosial	Civic republicanism, deliberatif
Jepang	Tanggung jawab moral dan prosedural	Etika kolektif, kesetiaan birokratis	Konfusianisme
Jerman	Kepatuhan hukum dan mandat sosial	Integrasi hukum dan akuntansi, rasionalitas legal	Kantianisme dan etika institusional

Indonesia dapat belajar dari berbagai model ini. Dari Finlandia dan Denmark, kita belajar bahwa keadilan fiskal tumbuh dari partisipasi aktif dan budaya transparansi sosial. Dari Jepang, kita belajar tentang pentingnya integritas birokrasi yang dibentuk melalui pendidikan nilai dan loyalitas kolektif. Dari Jerman, kita belajar bahwa laporan keuangan bukan hanya

alat manajemen fiskal, melainkan ekspresi legal dan etis dari mandat konstitusi negara.

Dengan memperluas cakrawala pendidikan akuntansi publik ke tataran global, kita dapat membayangkan sistem yang tidak hanya tertib dalam format, tetapi adil dalam substansi. Filsafat publik di balik sistem fiskal menentukan wajah etika akuntansi di lapangan. Maka, Indonesia perlu merancang pendidikan akuntansi yang menggabungkan kekayaan lokal dan nilai-nilai global: pendidikan yang melampaui rumus, menyentuh moralitas, dan menjadikan laporan keuangan sebagai dokumen politik, sosial, dan filosofis.

## **Konstruksi Argumentatif Bab II: Akuntansi sebagai Sistem Nilai Publik**

Bab II membangun argumen bahwa teori akuntansi tidak pernah netral. Evolusi dari *stewardship* ke *value-based accounting* menjadi bukti bahwa praktik pencatatan anggaran adalah wujud dari sistem kepercayaan tentang hubungan antara negara dan warga. Dalam hal ini, akuntansi diposisikan sebagai medium reflektif yang mengartikulasikan relasi kekuasaan, partisipasi, dan nilai sosial (Roberts, 1991; Moore, 1995).

Lebih lanjut, Sen (1999) menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kebebasan substantif (*capability approach*), di mana keadilan bukan hanya diukur dari efisiensi prosedural, melainkan dari kemampuan warga untuk hidup secara bermakna. Dengan mengaitkan pemikiran ketiganya, bagian ini menyusun argumen bahwa akuntansi yang adil adalah yang berfokus pada *capability expansion*, bukan sekadar efisiensi teknokratis.

Filsafat menjadi basis argumentatif, dan pendidikan menjadi alat pembentuk kesadaran kritis untuk membaca angka sebagai representasi nilai.

### **“Dari Angka ke Makna: Akuntansi sebagai Wacana Sosial”**

#### **1. Laporan Keuangan Sebagai Narasi Sosial**

Apa yang kita sebut sebagai laporan keuangan sesungguhnya adalah narasi. Ia bukan sekadar angka, tetapi cerita tentang apa yang diprioritaskan, siapa yang

diperhatikan, dan siapa yang diabaikan. Dalam konteks ini, akuntansi harus dilihat sebagai tindakan sosial, bukan semata prosedur birokratis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Broadbent dan Guthrie (1992), akuntansi publik telah mengalami pergeseran makna dari alat administratif menuju ruang wacana yang mencerminkan prioritas sosial dan politik suatu negara. Neu (2006) juga menunjukkan bahwa informasi akuntansi tidak pernah netral; ia berkontribusi dalam membentuk ruang publik dan legitimasi kebijakan negara. Maka, pertanyaan kita berubah dari “berapa pengeluaran desa?” menjadi “untuk siapa anggaran itu digunakan?” dan “mengapa masyarakat tidak merasa dampaknya?”

## **2. Teori Akuntansi Bukan Netral**

Teori akuntansi yang kita kenal, *stewardship*, *value-based accounting*, *public value*, semuanya adalah refleksi dari nilai tertentu. Pemilihan satu kerangka dibanding lainnya menunjukkan prioritas ideologis. Maka teori bukanlah “alat netral”, tetapi wacana politik dan sosial yang membingkai bagaimana kita melihat negara dan warga negara.

Di sinilah pentingnya pendidikan akuntansi yang membuka ruang interpretatif. Mahasiswa harus belajar membedakan antara angka sebagai data, dan angka sebagai representasi nilai sosial.

## **3. Menuju Teori yang Memanusiakan**

Dengan menyadari bahwa teori bukan sekadar alat, tetapi panduan tindakan moral, maka pendidikan akuntansi harus mulai memperkenalkan teori sebagai medan etika. Kita tidak sekadar memilih pendekatan berbasis output, tetapi mengajukan pendekatan berbasis outcome sosial, partisipasi warga, dan keberpihakan pada kelompok marjinal.

Transisi ini mengantarkan kita ke Bagian III, di mana teori dan nilai diuji dalam realitas Indonesia: praktik birokrasi, ketimpangan sosial, dan disonansi antara aturan.

# BAB 3

## AKUNTANSI DALAM PRAKTIK - LENSE INDONESIA

### A. Potret Praktik Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Praktik akuntansi sektor publik di Indonesia, meskipun telah mengalami reformasi substansial sejak awal 2000-an, masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta penguatan kelembagaan audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menciptakan kerangka formal bagi akuntabilitas keuangan negara. Salah satu tonggak teknisnya adalah adopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang bertujuan untuk menciptakan transparansi fiskal yang utuh. Namun demikian, keberhasilan normatif ini belum sepenuhnya mewujudkan dalam praktik substantif, terutama di tingkat lokal.

Setiap tahun, BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang menunjukkan peningkatan jumlah entitas pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun peningkatan ini tidak linier dengan perbaikan integritas tata kelola. Dalam IHPS I Tahun 2023, misalnya, BPK tetap mencatat lebih dari 11.000 temuan ketidaksesuaian keuangan senilai Rp18,19 triliun yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (BPK RI, 2023). Fakta ini menunjukkan paradoks akut: kepatuhan administratif meningkat, tetapi substansi akuntabilitas tidak membaik secara merata.

## **Ritualisme Akuntansi dan Simbolisasi Akuntabilitas**

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Power (1997) sebagai "*rituals of verification*", praktik audit dan pelaporan yang cenderung menjadi ritual tahunan, di mana proses dokumentasi lebih penting daripada makna etis di baliknya. Dalam model ini, akuntansi publik dipersempit menjadi sistem justifikasi formal, bukan instrumen evaluatif, apalagi transformasional.

Dalam praktik birokrasi Indonesia, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kerap menjadi agenda teknis yang diburu tenggat. Penyusunannya sering dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan), tanpa keterlibatan mendalam dari aparat internal. Hal ini menciptakan *decoupling*, pemutusan antara proses dan kepemilikan, yang memperlemah makna akuntansi sebagai tindakan publik. Dalam banyak kasus, laporan menjadi "panggung formalitas" yang menjauh dari refleksi atas realitas pelayanan publik.

## **Ilustrasi Reflektif: Ketika WTP Tidak Bermakna**

Suatu daerah mendapat opini WTP lima tahun berturut-turut. Namun di lapangan, pembangunan jalan mangkrak, distribusi bansos lambat, dan pengaduan masyarakat meningkat. Laporan keuangan disusun rapi, dokumen lengkap, dan pengeluaran sesuai pagu. Tapi ketika ditanyakan "Apakah akuntansi di sini telah mewujudkan keadilan sosial?", jawabannya tidak jelas. Ini adalah pertanyaan yang tidak muncul dari akuntansi teknis, tetapi dari *etika profesi dan tanggung jawab publik*.

## **Kelembagaan yang Lemah: APIP dan Ilusi Independensi**

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), termasuk BPKP dan Inspektorat Jenderal, telah diperkuat secara regulatif. Namun dalam praktiknya, banyak dari mereka terjebak dalam subordinasi administratif. Dalam banyak kasus, keterbatasan kapasitas SDM, tekanan politik, dan lemahnya dukungan teknologi informasi menyebabkan audit internal berfungsi lebih sebagai legalisasi prosedural daripada mekanisme korektif.

Otoritas APIP belum cukup kuat untuk menantang keputusan struktural yang keliru. Audit pun kehilangan daya intervensinya, berubah menjadi bagian dari legitimasi birokrasi, bukan etika publik (lihat Broadbent & Guthrie, 1992).

### **Budaya Organisasi: High Power Distance dan Anti-Kritik**

Dalam studi lintas budaya, Hofstede (1980) mengidentifikasi Indonesia sebagai negara dengan karakteristik budaya *high power distance*—yakni struktur sosial dan organisasi yang sangat hierarkis, di mana kewenangan tidak mudah dipertanyakan. Dalam konteks ini, angka dan laporan keuangan sering kali tidak digunakan untuk membuka ruang dialog atau evaluasi publik, tetapi untuk mempertahankan citra formal dan ketertiban administratif. Kritik terhadap laporan keuangan kerap dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan kontribusi konstruktif.

Dalam kerangka ini, akuntansi berubah menjadi simbol kekuasaan, bukan alat partisipasi. Informasi keuangan tidak disusun untuk warga, melainkan untuk atasan. Maka tidak mengherankan jika laporan keuangan jarang dibaca oleh publik, dan pelatihan literasi fiskal untuk warga hampir tidak dikenal. Hal ini mempertegas pentingnya mengembangkan sistem akuntansi publik yang menempatkan transparansi dan partisipasi warga sebagai tujuan, bukan hanya legalitas prosedural.

### **Foucault dan Disiplin Tanpa Refleksi**

Foucault (1977) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari *rejim kekuasaan* yang bekerja melalui mekanisme disipliner, yaitu sistem administratif yang menciptakan kontrol lewat prosedur, aturan, dan norma yang tampak netral namun pada dasarnya mempertahankan struktur dominasi. Dalam kerangka ini, laporan keuangan bukan sekadar alat transparansi, melainkan bentuk kontrol yang bekerja melalui citra keteraturan dan kepatuhan.

Laporan keuangan yang tampak objektif dan profesional dapat menyembunyikan ketiadaan refleksi dan partisipasi. Akuntansi, dalam pengertian Foucault, tidak netral: ia menjadi

bagian dari “disiplin” birokratis yang mereproduksi kekuasaan dalam bentuk yang tersembunyi. Di sinilah pentingnya pendidikan akuntansi yang mengajarkan kritik institusional, bukan sekadar teknis penyusunan laporan.

Kritik ini beresonansi dengan temuan dalam literatur akuntansi kritis yang menyatakan bahwa sistem pelaporan kerap tidak mencerminkan praktik substantif, tetapi lebih fokus pada pencitraan administratif (lihat Broadbent & Guthrie, 1992). Dalam konteks ini, *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) menjadi tujuan prosedural itu sendiri, bukan refleksi dari transformasi nilai atau perbaikan pelayanan publik.

### **Transformasi Naratif: Laporan Keuangan sebagai Wacana Moral**

Pergeseran paradigma diperlukan. Laporan keuangan harus dipahami bukan hanya sebagai produk teknis, tetapi sebagai narasi politik dan etika, tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya melalui alokasi sumber daya. Broadbent dan Guthrie (1992) menunjukkan bahwa sistem akuntansi publik memainkan peran penting dalam melegitimasi kebijakan dan struktur kekuasaan, serta perlu dikaji secara kritis agar tidak menjadi sekadar alat teknokratis yang membungkam suara publik.

Dalam hal ini, Neu (2006) menegaskan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi sosial yang signifikan: ia dapat digunakan untuk membuka atau justru menutup ruang publik. Akuntansi harus menjadi instrumen untuk menilai keadilan, legitimasi, dan partisipasi dalam kebijakan publik, bukan sekadar alat teknis pengukur efisiensi administratif.

Untuk itu, pendidikan dan pelatihan akuntansi publik tidak boleh hanya fokus pada peningkatan kapasitas penyusunan dokumen. Ia harus membangun kesadaran bahwa pelaporan keuangan adalah tindakan sosial-politik yang memiliki konsekuensi langsung pada kepercayaan publik. Pelatihan berbasis studi kasus, penggunaan sistem pengawasan digital seperti SIMWAS, dan integrasi pendekatan reflektif dalam pembelajaran dapat menjadi langkah awal.

Namun demikian, reformasi yang diperlukan bersifat struktural: bagaimana membentuk budaya baru, bukan sekadar keterampilan baru. Tantangan utama akuntansi sektor publik di Indonesia bukan semata teknis, tetapi kultural, struktural, dan epistemik. Kita tidak sedang kekurangan aturan, tetapi kekurangan ruang refleksi.

Pelaporan keuangan tidak boleh lagi menjadi instrumen justifikasi prosedural, tetapi harus menjadi cermin etis bagi tata kelola negara. Pendidikan menjadi medan strategis untuk menanamkan pemahaman baru tentang akuntansi sebagai etika sosial, bukan sekadar teknik administrasi. Hanya dengan demikian, profesi ini dapat kembali pada akar moralnya: menjaga, bukan menyembunyikan; mengabdikan, bukan mengamankan kekuasaan.

## **B. Antara Teori dan Kenyataan: Di Mana Pendidikan Berperan?**

Dalam sistem pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia, terdapat jurang yang semakin menganga antara pengetahuan akademik dan praktik birokrasi. Mahasiswa akuntansi publik diajarkan kerangka seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS), akuntansi manajemen, dan sistem informasi akuntansi dengan pendekatan preskriptif, ideal, rasional, dan teknokratis. Namun ketika mereka memasuki dunia kerja, terutama di institusi pemerintahan, mereka dihadapkan pada kenyataan yang jauh berbeda: pelaporan keuangan yang diburu tenggat, ketidakterbukaan anggaran, struktur organisasi yang kaku, dan sistem audit yang lebih berfungsi sebagai formalitas.

### **Epistemic Dissonance dan Realitas Birokrasi**

Kesenjangan antara teori yang diajarkan di ruang kuliah dan realitas praktik birokrasi publik menciptakan kondisi yang dapat disebut sebagai *epistemic dissonance*, bentrokan antara pengetahuan normatif dengan pengalaman empiris. Lulusan program akuntansi sektor publik kerap mengalami keterasingan kognitif ketika sistem yang mereka pelajari tentang akuntabilitas, keadilan fiskal, dan transparansi tidak selaras

dengan praktik lapangan yang bersifat formalistik dan prosedural semata.

Seperti dikemukakan oleh Freire (1970), kondisi ini merupakan bentuk dari *false consciousness*, kesadaran palsu yang muncul ketika pendidikan gagal menghubungkan teori dengan kenyataan sosial. Pendidikan dalam bentuk ini tidak membebaskan, melainkan menundukkan; tidak membentuk kesadaran, tetapi memperpanjang keterasingan.

Dalam kerangka ini, pendidikan akuntansi yang hanya berfokus pada keterampilan teknis, menyusun laporan, memastikan kesesuaian format, memenuhi standar audit, tetapi mengabaikan makna sosial dan moral dari pelaporan keuangan, justru memperkuat ketidakadilan yang tersembunyi di balik angka. Mahasiswa diajarkan *bagaimana* menyusun laporan, tetapi tidak diajak bertanya *untuk siapa* laporan itu ditulis, *siapa yang tidak dihitung*, dan *siapa yang dirugikan* oleh narasi fiskal yang tidak imparsial.

Kurikulum semacam ini berisiko menghasilkan profesional yang patuh terhadap sistem, tetapi gagal melihat struktur ketidakadilan yang disamarkan oleh prosedur. Oleh karena itu, transformasi pendidikan harus diarahkan pada penyatuan antara penguasaan teknis dan kesadaran etis, antara keterampilan profesional dan keberpihakan sosial.

### **Intelektual Organik: Pendidikan sebagai Arena Perlawanan**

Dalam *Prison Notebooks*, Gramsci (1971) membedakan antara *intelektual tradisional*, yang fungsinya mereproduksi hegemoni dominan, dan *intelektual organik*, yang tumbuh dari realitas sosial dan berjuang bersama kelas yang tertindas. Dalam konteks akuntansi publik, dosen dan akademisi tidak cukup hanya mengajarkan standar dan regulasi. Mereka perlu mengambil posisi sebagai intelektual organik: menjadikan kurikulum, riset, dan pengabdian masyarakat sebagai medium untuk membongkar praktik pelaporan yang timpang, serta membangun kesadaran bahwa akuntabilitas fiskal adalah hak rakyat, bukan semata kewajiban prosedural.

Namun tantangannya besar. Sebagaimana dikemukakan oleh McPhail (2001), pendidikan etika dalam akuntansi kerap kali gagal membangun dimensi kemanusiaan profesi. Alih-alih membentuk refleksi kritis, banyak kurikulum terjebak pada pengulangan teknis dan kepatuhan formal. Akibatnya, lulusan akuntansi lebih akrab dengan format laporan dibandingkan realitas sosial dari angka yang mereka susun. Hal ini menghambat terciptanya keberpihakan etis terhadap masyarakat yang terdampak oleh keputusan fiskal negara.

Pendidikan akuntansi yang transformatif harus menyerap dinamika sosial-politik birokrasi lokal, dan menjadikan ruang kelas sebagai ruang pembentukan keberanian moral. Di sinilah peran dosen menjadi krusial: bukan sebagai teknokrat penyampai prosedur, tetapi sebagai penggerak kesadaran kritis yang membekali mahasiswa untuk bertanya, menggugat, dan mengambil sikap atas realitas ketimpangan fiskal yang mereka hadapi.

### **Pendidikan sebagai Rekonstruksi Sosial**

Dewey (1938) menekankan bahwa pendidikan yang bermakna harus berangkat dari pengalaman hidup nyata. Ia menolak pendidikan yang hanya bersifat *banking model*, di mana pengetahuan ditransfer dari guru ke siswa secara satu arah, dan menganjurkan pendidikan sebagai proses rekonstruktif, di mana pengalaman direfleksikan untuk menciptakan tindakan sosial yang lebih adil. Maka, institusi pendidikan tinggi akuntansi harus menjadi laboratorium etika publik, bukan sekadar tempat pelatihan tenaga kerja. Mahasiswa perlu diajak untuk *melihat angka sebagai tindakan moral*, bukan sekadar sebagai hasil kalkulasi.

### **Konsep Civic Professionalism dan Kurikulum Transformatif**

Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, pendekatan kurikulum perlu bergerak ke arah *civic professionalism*, yakni profesionalisme yang berakar pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi publik. Ini menggeser fokus pendidikan akuntansi dari sekadar pelatihan

teknis menjadi pembentukan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.

Beberapa pendekatan pedagogis yang mendukung arah ini antara lain:

1. **Problem-Based Learning (PBL):** Pembelajaran berbasis studi kasus nyata dari laporan keuangan daerah untuk melatih mahasiswa mengenali kompleksitas dunia nyata.
2. **Critical Accounting Pedagogy:** Mengajak mahasiswa mengkaji dimensi politik, sosial, dan etika dari praktik akuntansi melalui pendekatan kritis. Sebagaimana dikemukakan oleh Boyce (2004), pendidikan akuntansi harus membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh sistem akuntansi yang ada.
3. **Project-Based Learning:** Kolaborasi antara mahasiswa dan komunitas lokal, misalnya dalam menyusun anggaran partisipatif atau melakukan *social audit*, agar mahasiswa memahami bahwa laporan keuangan bukan hanya angka, melainkan juga narasi tentang keadilan.

McPhail (2001) juga menekankan pentingnya *moral imagination* dalam pendidikan akuntansi, kemampuan membayangkan konsekuensi sosial dari keputusan teknis. Dengan menggabungkan pendekatan ini, pendidikan akuntansi dapat membentuk lulusan yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk bertindak adil dalam sistem yang kompleks.

### **Ilustrasi Reflektif: Mahasiswa dan Audit Anggaran Desa**

Bayangkan seorang mahasiswa magang di desa yang sedang menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa. Ia menemukan adanya pengeluaran yang tidak didukung bukti kuat, tetapi perangkat desa bersikeras bahwa dana itu “tetap untuk kepentingan masyarakat.” Mahasiswa ini kebingungan, apakah ia harus diam, mengikuti prosedur, atau mempertanyakan sistem? Jika pendidikan hanya membekalinya dengan SAP dan PSAK, ia tidak akan tahu apa yang harus

dilakukan. Namun jika ia dilatih dengan *reasoned judgment*, ia bisa mengevaluasi pilihan berdasarkan etika publik.

### **Sinergi Praktis: Menghubungkan Akademik dan Kelembagaan Negara**

Untuk memperkuat peran pendidikan sebagai penghubung antara teori dan kenyataan, dibutuhkan sinergi antara universitas dan lembaga negara. Kolaborasi dapat berbentuk:

1. Riset kebijakan fiskal berbasis bukti bersama BPKP atau Kemenkeu.
2. Audit partisipatif berbasis mahasiswa bersama Inspektorat.
3. Pengabdian masyarakat berbasis *community-based budgeting* di desa.

Model ini sejalan dengan pendekatan *community-based accountability*, yang mengaitkan pendidikan dengan advokasi fiskal partisipatif dan membentuk mahasiswa sebagai *pemikir-partisipator* dalam sistem keuangan negara.

### **Pendidikan sebagai Proyek Demokrasi**

Nussbaum (2010) menekankan bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu berpikir kritis dan bertindak berdasarkan nilai. Pendidikan akuntansi publik harus menjawab kebutuhan ini. Ia harus mencetak profesional yang tidak hanya mampu membuat laporan WTP, tetapi juga mampu bertanya: *apakah laporan ini adil? Apakah anggaran ini inklusif? Siapa yang dilibatkan dalam prosesnya?*

Kesenjangan antara teori dan kenyataan dalam pendidikan akuntansi publik bukan hanya masalah teknis, melainkan tantangan etis dan politik. Ia menuntut pembaruan epistemologis dan pedagogis. Pendidikan tidak bisa lagi terjebak dalam pencetakan teknisi administratif; ia harus menjadi *proyek emansipasi*, tempat mahasiswa dilatih menjadi warga yang berpikir dan bertindak untuk publik.

Dalam dunia yang dibanjiri angka, pendidikan akuntansi yang baik tidak hanya mengajarkan cara menghitung, tetapi juga *apa yang layak dihitung, siapa yang dihitung, dan mengapa hal itu penting untuk keadilan sosial.*

### **Refleksi Kontekstual Bab III: Praktik, Ketimpangan, dan Disonansi Epistemik**

Bab III menyajikan refleksi mendalam tentang realitas akuntansi sektor publik di Indonesia. Di balik opini WTP, tersembunyi ritualisme administratif yang mengaburkan substansi keadilan fiskal. Dengan mengacu pada Hofstede (1980), terlihat bagaimana budaya *high power distance* di Indonesia menciptakan hierarki yang menghambat kritik dan refleksi dalam pelaporan keuangan. Dalam struktur ini, laporan keuangan sering kali tidak menjadi alat komunikasi publik, tetapi menjadi simbol loyalitas birokratik.

Sementara itu, Foucault (1978) menyebut fenomena ini sebagai *microphysics of power*, di mana kekuasaan bekerja secara halus melalui prosedur dan mekanisme pengawasan yang tidak selalu dipertanyakan. Akuntansi dalam kerangka ini bisa menjadi alat kontrol sosial, bukan pembebasan.

Dalam kondisi tersebut, pendidikan akuntansi harus merespons disonansi epistemik antara teori ideal dan praktik nyata. Mahasiswa perlu dibekali dengan *literasi etika fiscal*, kemampuan membaca, menilai, dan mengkritisi pelaporan keuangan sebagai produk politik dan moral, bukan hanya teknis. Penggunaan simulasi konflik kepentingan, studi kasus akuntansi partisipatif, dan refleksi dilematis perlu menjadi bagian integral kurikulum.

Tujuan pendidikan akuntansi sektor publik bukan hanya mencetak pelapor yang mahir mengisi format, tetapi penyaksi yang peka, dan pengubah sistem yang memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan keadilan fiskal di ruang-ruang yang kerap menormalkan ketimpangan.

## **“Ketika Laporan Tak Mewakili Kenyataan: Refleksi atas Praktik Indonesia”**

### **1. Antara Dokumen dan Realitas**

Di banyak pemerintah daerah, laporan keuangan lengkap, tertib, dan sesuai aturan. Namun di lapangan, sekolah rusak, pelayanan kesehatan tidak memadai, dan distribusi bantuan tersendat. Di sinilah kita menyaksikan fenomena *decoupling*, pemutusan antara simbol administratif dan kenyataan sosial.

Bagian ini membuka mata bahwa akuntansi publik di Indonesia berada di tengah disonansi epistemik: antara yang diajarkan di ruang kelas dan yang terjadi di ruang birokrasi. Di sinilah pendidikan akuntansi diuji: apakah ia mencetak pelapor sistem atau pengubah sistem?

### **2. Akuntansi dan Kekuasaan**

Dengan menggunakan lensa Foucault dan Hofstede, kita melihat bagaimana laporan keuangan dapat menjadi alat pelanggaran kekuasaan. Ketika kritik dibungkam, ketika angka digunakan untuk membenarkan keputusan yang tidak adil, maka akuntansi berhenti menjadi alat demokrasi, dan berubah menjadi mekanisme kontrol.

Dalam konteks ini, pendidikan akuntansi harus melahirkan *warga professional*, bukan hanya ahli teknis, tetapi juga *intelektual organik* (Gramsci) yang mampu mendampingi masyarakat dalam menuntut akuntabilitas yang bermakna.

### **3. Menuju Ruang Belajar yang Berani Bertanya**

Kurikulum akuntansi publik harus membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan mendasar:

- a. *Siapa yang tidak masuk dalam laporan ini?*
- b. *Apa yang dilaporkan, dan apa yang disembunyikan?*
- c. *Apa dampak sosial dari pembungkaman etika dalam laporan fiskal?*

Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantarkan kita ke Bagian IV: bagaimana membangun sistem pendidikan akuntansi yang membebaskan, memberdayakan, dan menjawab tantangan masa depan secara sistemik.

# BAB 4

## MENUJU MASA DEPAN - PENDIDIKAN SEBAGAI PILAR REFORMASI AKUNTANSI PUBLIK

### A. Reformasi Berbasis Pendidikan: Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia Emas 2045 memproyeksikan lahirnya sebuah bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut, dua fondasi utama diidentifikasi: *good governance* dan *human capital development*. Di antara dua fondasi ini, pendidikan akuntansi publik berada pada posisi strategis yang unik, ia menjadi penghubung antara pengembangan manusia dan penguatan sistem. Akuntansi bukan hanya alat teknis untuk mengelola anggaran, tetapi juga medan moral untuk menguji komitmen negara terhadap keadilan sosial dan transparansi.

Namun, dalam realitas implementasinya, pendidikan akuntansi publik belum diposisikan sebagai simpul strategis pembangunan sistemik. Pendidikan masih dipahami sebagai mekanisme produksi keterampilan teknis, bukan sebagai proses pembentukan *ethos profesi* yang mampu memperkuat kualitas tata kelola publik. Padahal, sebagaimana diuraikan oleh Sen (1999), pembangunan sejati bukanlah akumulasi sumber daya, melainkan perluasan kebebasan substantif warga negara. Dalam konteks akuntansi, kebebasan substantif itu mencakup kemampuan untuk *memahami, mengawasi, dan memengaruhi keputusan fiskal* yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

## **Literasi Fiskal sebagai Pendidikan Kewargaan**

Maka, pendidikan akuntansi publik tidak boleh berhenti pada transfer kompetensi. Ia harus menjadi *ruang pembentukan kesadaran kritis* tentang makna keuangan negara. Public financial literacy harus menjadi bagian integral dari *civic education*, pendidikan kewargaan yang menjadikan akuntansi sebagai bahasa rakyat, bukan sekadar bahasa teknokrat. Literasi fiskal yang demikian bukan hanya soal memahami pos belanja dan pendapatan, tetapi tentang menyadari *relasi kekuasaan* di balik alokasi anggaran. Mahasiswa akuntansi harus menyadari bahwa setiap baris dalam APBN atau APBD adalah representasi dari keputusan politik: siapa yang didahulukan, siapa yang dikorbankan, dan untuk siapa sistem fiskal bekerja.

## **Habitus Teknis vs Habitus Etis: Pendidikan dan Pembentukan Disposisi**

Bourdieu (1977) menjelaskan bahwa pendidikan adalah arena pembentukan *habitus*, struktur disposisi yang membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang dalam dunia sosial. Jika pendidikan akuntansi hanya menekankan presisi teknis, maka ia akan membentuk *habitus teknokratis*: lulusan yang sangat mahir dalam format, tetapi tumpul dalam menilai keadilan. Reformasi berbasis regulasi pun akan gagal jika dihadapi oleh aktor birokrasi yang secara mental terbiasa dengan *kebenaran administratif*, bukan *kebenaran substantif*. Oleh sebab itu, pendidikan harus menjadi ruang internalisasi nilai, bukan hanya menghafalan aturan.

## **Freire dan Pendidikan Anti-Korupsi yang Hidup**

Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi tidak cukup jika diwujudkan dalam bentuk seminar, poster, atau modul hafalan. Freire (1970) mengingatkan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan memenjarakan. Ia menolak konsep *banking education*, di mana pengetahuan ditanamkan seperti uang dalam rekening siswa, dan mendukung pendidikan sebagai *practice of freedom*: ruang dialogis di mana kesadaran kritis tumbuh dari pengalaman. Pendidikan akuntansi publik harus menanamkan integritas melalui metode yang hidup: studi

kasus dilema nyata, audit sosial berbasis komunitas, hingga refleksi etika dalam simulasi keputusan anggaran.

### **Etika dan Praktik: Pengajaran Akuntansi sebagai Wacana Sosial**

Pelatihan etika dalam pendidikan akuntansi akan efektif hanya jika mahasiswa diajak mengalami dan merenungkan dilema moral secara langsung, bukan sekadar mendengarkan teori. McPhail (2001) menekankan bahwa salah satu tujuan utama pendidikan etika dalam akuntansi adalah *rehumanising the profession*, membangkitkan kembali kesadaran akan sisi kemanusiaan profesi akuntan yang sering dikaburkan oleh rutinitas teknis. Maka, metode simulasi, studi lapangan, dan diskusi kasus nyata menjadi penting untuk membentuk keterlibatan emosional dan intelektual mahasiswa.

Dalam kerangka ini, akuntansi perlu diajarkan sebagai wacana sosial yang sarat nilai, bukan sekadar sistem pelaporan teknis. Hopwood (1987) menunjukkan bahwa akuntansi tidak netral, ia membentuk, sekaligus dibentuk oleh, relasi kekuasaan, budaya, dan politik. Dalam laporan keuangan, kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga representasi dari keputusan sosial: siapa yang dianggap penting, siapa yang diabaikan, dan bagaimana distribusi sumber daya ditentukan.

Cooper & Hopper (2007) menegaskan bahwa pendekatan kritis dalam pendidikan akuntansi sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mempertanyakan asumsi, struktur institusional, dan dampak sosial dari praktik akuntansi. Dengan demikian, pendidikan akuntansi publik harus membuka ruang reflektif yang memungkinkan mahasiswa untuk melihat angka sebagai representasi moral dan politik, serta membentuk kemampuan mereka dalam menilai dan bertindak berdasarkan etika publik.

### **Plato, Aristoteles, dan Pendidikan sebagai Jalan Menuju Negara Adil**

Filsafat klasik memberikan kerangka normatif yang kuat. Plato menekankan bahwa pendidikan sejati adalah proses *membimbing jiwa menuju kebaikan tertinggi (to kalon)*. Ia tidak bisa

diserahkan pada pasar atau prosedur, tetapi harus diarahkan pada pencarian keadilan dan kebenaran dalam kehidupan publik. Aristoteles menambahkan bahwa pendidikan adalah fondasi *eudaimonia*, kehidupan yang bermakna dan berkeutamaan. Dalam konteks akuntansi publik, ini berarti membentuk profesional yang memiliki *phronesis*, kebijaksanaan praktis untuk memilih yang benar dalam ketidakpastian sistem.

### **Ilustrasi Konseptual: Mahasiswa dan Disonansi Etika Pelaporan Anggaran**

Bayangkan seorang mahasiswa praktik di kantor pemerintahan daerah. Ia menemukan bahwa dana bantuan sosial disalurkan melalui organisasi masyarakat yang tidak kredibel, tetapi secara administratif memenuhi syarat. Ia diajarkan untuk menilai laporan berdasarkan kepatuhan, tetapi ia melihat bahwa kepatuhan ini menyembunyikan ketidakadilan. Jika ia tidak dibekali dengan *reasoned judgment*, ia hanya akan diam dan melanjutkan prosedur. Namun jika ia diajarkan *refleksi etis*, ia akan bertanya: *apakah prosedur ini benar dalam konteks keadilan sosial?*

Reformasi birokrasi tidak dimulai dari peraturan, tetapi dari pendidikan. Pendidikan akuntansi publik harus membentuk *manusia yang memahami angka sebagai keputusan etis*, bukan sekadar laporan teknis. Visi Indonesia 2045 tidak akan tercapai jika lembaga pendidikan hanya menjadi tempat produksi teknokrat. Ia harus menjadi *medan pembentukan integritas kolektif*, tempat di mana keberanian moral, nalar kritis, dan kesetiaan pada nilai publik ditanamkan secara sistemik.

Pendidikan akuntansi publik, pada akhirnya, adalah fondasi dari sistem fiskal yang adil. Ia bukan sekadar ruang belajar, tetapi arena pembentukan masa depan bangsa: siapa yang akan menghitung, siapa yang akan diawasi, dan siapa yang akan dijaga oleh sistem keuangan negara. Jika pendidikan gagal di sini, maka reformasi hanya akan berakhir sebagai retorika; tetapi jika pendidikan berhasil, maka Indonesia 2045 akan berdiri di atas akuntabilitas yang bernurani.

## **B. Membangun Ekosistem: Sinergi Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Masyarakat**

Reformasi akuntansi sektor publik tidak dapat berjalan secara terisolasi dalam ruang-ruang administratif negara atau hanya melalui revisi kurikulum dalam batas dinding kampus. Reformasi ini harus ditopang oleh *ekosistem kolaboratif* yang menghubungkan pengetahuan akademik, pengalaman kelembagaan, dan partisipasi sosial. Di sinilah urgensi membangun infrastruktur kelembagaan yang melampaui logika sector, menyatukan kampus, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam satu visi: menjadikan akuntansi publik sebagai medium keadilan fiskal dan partisipasi demokratis.

### **Triple Helix dan Akuntansi sebagai Praktik Sosial**

Konsep *Triple Helix* yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menawarkan kerangka dinamis bagi interaksi tiga aktor utama dalam inovasi sosial: universitas, pemerintah, dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan komunitas sipil). Dalam konteks akuntansi publik, Triple Helix bukan sekadar platform kolaboratif, tetapi *struktur normative* untuk mendistribusikan tanggung jawab akuntabilitas secara horizontal, bukan hierarkis. Artinya, praktik akuntansi publik harus berpindah dari model birokratik terpusat ke arah sistem yang reflektif, deliberatif, dan terhubung dengan dinamika lokal.

### **Universitas: Dari Pusat Produksi Pengetahuan ke Lokomotif Etika Sosial**

Sebagai pilar pertama dalam Triple Helix, universitas memiliki mandat epistemologis dan moral. Namun, di banyak kampus, kurikulum akuntansi masih disusun dengan kerangka korporatis dan jarang mengakomodasi konteks sektor publik, apalagi dinamika keuangan daerah. Herawati dan Susanto (2020) mencatat ketimpangan antara apa yang diajarkan di ruang kelas dengan kebutuhan faktual pengelolaan APBD. Akibatnya, lulusan sering gagap menghadapi problem real di lapangan.

Universitas tidak cukup menjadi tempat pelatihan teknis, tetapi harus menjadi *lokomotif etika sosial* yang menghubungkan mahasiswa dengan praktik pengelolaan keuangan yang berpihak pada rakyat. Relevansi lokal, refleksi moral, dan keterlibatan langsung mahasiswa dalam pengawasan anggaran harus menjadi orientasi kurikulum.

### **Pemerintah: Ruang Praktik, Mitra Reflektif**

Pemerintah, sebagai pilar kedua, tidak hanya berfungsi sebagai pemberi kerja atau pelaksana kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai mitra reflektif dalam pendidikan. Melalui lembaga seperti BPKP, Kementerian Keuangan, Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawasan lainnya, pemerintah dapat membuka ruang belajar transformatif bagi mahasiswa melalui:

1. Riset kebijakan fiskal berbasis data;
2. Ko-kreasi sistem informasi keuangan (SIPKD, SAKTI);
3. Pendidikan berkelanjutan bagi aparatur daerah dalam model *lifelong learning*.

Kolaborasi ini tidak boleh bersifat simbolik. Kementerian PAN-RB dapat mendorong regulasi yang memfasilitasi kerja sama antara universitas dan instansi publik dalam bentuk *pembelajaran berbasis proyek*, bukan hanya *kerja praktik observasional*. Dalam model ini, mahasiswa tidak sekadar melihat, tetapi *ikut membentuk* proses akuntabilitas.

### **Masyarakat: Medan Konkret Etika Akuntansi**

Pilar ketiga dari Triple Helix adalah masyarakat, yang meliputi LSM, komunitas desa, serta pelaku usaha sosial. Di sinilah akuntansi publik menemukan uji realitasnya: apakah laporan keuangan negara mencerminkan kebutuhan masyarakat? Apakah kebijakan fiskal membuka ruang partisipasi, atau hanya mempertahankan hierarki?

Melalui pendekatan *service learning* (Bringle & Hatcher, 1996), mahasiswa dapat dilibatkan langsung dalam:

1. Audit sosial anggaran desa;
2. Penyusunan laporan pertanggungjawaban organisasi masyarakat;

### 3. Pelatihan literasi fiskal berbasis komunitas.

Pengalaman ini tidak hanya memperkuat keterampilan, tetapi juga membentuk *kesadaran kewargaan*, bahwa menjadi akuntan publik berarti menjadi penjaga suara publik dalam sistem keuangan negara.

#### **Tiga Strategi Konkret Membangun Ekosistem Sinergis:**

##### **1. Penguatan PPL dan Magang Berbasis Proyek Sosial**

Mahasiswa dilibatkan dalam penyusunan dan evaluasi laporan keuangan nyata: memperbaiki laporan desa, menyusun RKA berbasis gender, atau mengembangkan *dashboard transparansi*. Penekanan diberikan pada aspek etika, keberpihakan sosial, dan keterlibatan partisipatif.

##### **2. Kolaborasi Riset Akademik-Regulatorik**

Universitas dan lembaga seperti BPKP, BPK, KPK bekerja bersama menyusun kajian berbasis data tentang inefisiensi fiskal, analisis temuan audit berulang, atau reformasi kebijakan pelaporan akrual yang lebih humanistik.

##### **3. Forum Nasional Pendidikan Akuntansi Publik**

Platform ini mempertemukan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk membahas kurikulum nasional, kode etik, dan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan filsafat publik dan akuntabilitas berbasis keadilan.

#### **Aristoteles dan Demokrasi Partisipatif**

Aristoteles menekankan bahwa komunitas yang baik adalah yang memungkinkan warganya untuk bertindak secara deliberatif dan setara dalam pengambilan keputusan. Akuntansi publik partisipatif dan kolaboratif bukan sekadar inovasi administratif, tetapi realisasi dari *civic virtue*—yakni keutamaan yang lahir dari keterlibatan aktif dalam urusan publik. Young (2000) memperkuat hal ini melalui gagasan *communicative democracy*, yang menyatakan bahwa keadilan hanya mungkin terwujud jika berbagai suara, termasuk yang marginal, memiliki ruang dalam diskursus fiskal.

## **Ethical Infrastructure: Bukan Hanya Individu, Tapi Sistem**

Treviño et al. (1998) menekankan pentingnya *ethical infrastructure*, yakni sistem nilai, budaya, dan struktur yang menopang integritas bukan sebagai pilihan personal, tetapi sebagai kewajiban sistemik. Dalam konteks akuntansi publik, infrastruktur ini hanya bisa dibangun jika pendidikan, regulasi, dan praktik terhubung secara dialogis.

Membangun ekosistem pendidikan akuntansi publik berbasis sinergi Triple Helix adalah prasyarat bagi reformasi yang berakar. Ia mengubah pendidikan dari tempat belajar menjadi ruang transformasi sosial. Ia mengubah pemerintah dari aktor dominan menjadi mitra reflektif. Dan ia mengubah masyarakat dari penerima laporan menjadi partisipan aktif dalam penyusunan dan pengawasan anggaran negara.

Dalam sistem semacam ini, akuntansi tidak lagi menjadi simbol kekuasaan, melainkan menjadi *bahasa keadilan*. Mahasiswa tidak hanya diajarkan cara mencatat, tetapi diajak untuk *menafsirkan dan memperjuangkan nilai* di balik setiap angka. Inilah bentuk tertinggi dari pendidikan yang mengabdikan pada demokrasi fiskal dan keberlanjutan sosial.

## **C. Konstelasi Filsafat dan Akuntansi: Etika, Keadilan, dan Tanggung Jawab dalam Praktik Keuangan Publik**

Dalam praktik akuntansi sektor publik, angka-angka tidak pernah benar-benar netral. Mereka membawa nilai, menunjukkan pilihan, dan menandai arah moral dari sebuah keputusan fiskal. Oleh karena itu, akuntansi tidak bisa dipahami hanya sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai medan etika. Bab ini menyajikan sebuah sintesis lintas tradisi filosofis, Barat dan Timur, yang dapat memperkaya kerangka berpikir etis dalam pendidikan dan praktik akuntansi publik di Indonesia.

### **1. Etika Deontologis: Kant dan Imperatif Moral Profesi**

Dalam filsafat moral Immanuel Kant, tindakan etis tidak bergantung pada hasil atau konsekuensi, melainkan pada niat dan kewajiban yang melekat dalam tindakan itu sendiri. Kant (1993) menegaskan bahwa prinsip moral

tertinggi adalah *imperatif kategoris*, yakni prinsip yang berlaku universal tanpa syarat: “Bertindaklah hanya menurut asas yang melalui kehendakmu dapat sekaligus menjadi hukum universal.” Dalam ranah akuntansi sektor publik, prinsip ini mengandung implikasi yang sangat mendalam.

Profesi akuntansi tidak bisa sekadar dibimbing oleh perhitungan untung-rugi atau loyalitas kepada atasan. Dalam logika deontologis, tindakan seperti memanipulasi laporan anggaran atau menyembunyikan temuan audit, walaupun mungkin menguntungkan institusi dalam jangka pendek atau melindungi karier pelaku, tetap tidak dapat dibenarkan secara moral. Sebab, tindakan tersebut tidak dapat dijadikan prinsip umum yang layak dijalankan oleh semua orang tanpa merusak tatanan kepercayaan publik.

Kant juga menyatakan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata alat untuk mencapai tujuan lain (*treat humanity... always at the same time as an end, never merely as a means*). Dalam konteks akuntansi publik, ini berarti bahwa masyarakat sebagai pemilik sah anggaran negara tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek laporan statistik atau indikator kinerja. Akuntan publik berkewajiban menyusun informasi keuangan dengan jujur karena menghargai martabat manusia yang berhak atas informasi yang benar.

Etika deontologis menawarkan fondasi filosofis yang kuat bagi pembangunan *ethical backbone* dalam pendidikan akuntansi. Di tengah tekanan struktural yang sering dihadapi birokrat fiscal, baik dari segi target realisasi, permintaan politis, hingga konflik kepentingan, pendekatan Kantian menjadi penegasan bahwa integritas bukanlah pilihan pragmatis, melainkan kewajiban moral yang tidak bisa dikompromikan.

Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran etika dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia disebabkan oleh hilangnya kesadaran ini. Manipulasi laporan pertanggung-jawaban, penyamaran belanja fiktif, atau

pembiaran terhadap kesalahan pembukuan seringkali dilandasi oleh logika “semua orang juga melakukannya”, atau “atasan saya menyuruh”. Di sinilah prinsip Kantian menjadi ujian: apakah seorang profesional masih dapat memilih untuk *berkata tidak*, bahkan dalam situasi yang merugikan secara pribadi.

Nilai imperatif moral ini juga selaras dengan pendekatan *moral courage* dalam pendidikan etika profesi, sebagaimana dikembangkan dalam studi-studi etika terapan oleh Armstrong (1993) dan Shapiro (2013), yang mendorong agar kurikulum akuntansi tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teknis dan kode etik formal, tetapi juga dengan keberanian untuk bertindak berdasarkan prinsip moral meski menghadapi tekanan eksternal.

Oleh karena itu, integrasi etika deontologis dalam kurikulum akuntansi publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis: ia menciptakan aktor-aktor profesional yang memiliki komitmen terhadap kebenaran, yang dapat menjadi penyeimbang dalam sistem birokrasi yang belum sepenuhnya bersih. Kant, dalam hal ini, bukan hanya seorang pemikir moral, tetapi mentor diam-diam bagi setiap akuntan publik yang menolak untuk tunduk pada kompromi yang merusak martabat profesi.

## **2. Utilitarianisme: Bentham dan Manfaat Terbesar**

Bentham mengembangkan prinsip utilitas (1789). Ia menyatakan bahwa “the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation.” Dengan kata lain, nilai moral suatu tindakan diukur dari sejauh mana tindakan tersebut mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Ini adalah kerangka moral yang berakar pada konsekuensi, bukan pada niat atau kewajiban.

Dalam konteks akuntansi publik, utilitarianisme membuka jalan bagi logika evaluatif berbasis dampak. Anggaran tidak cukup dinilai berdasarkan kepatuhan prosedural atau ketepatan format pelaporan, melainkan

harus diukur dari sejauh mana kebijakan fiskal menghasilkan manfaat riil yang dirasakan masyarakat. Apakah pengeluaran belanja infrastruktur berdampak pada mobilitas warga miskin? Apakah efisiensi anggaran berujung pada perbaikan layanan dasar, atau justru mengorbankan jaring pengaman sosial?

Utilitarianisme dalam bentuknya yang normatif telah memberi inspirasi pada model *cost-benefit analysis* dan pendekatan *value for money* dalam audit sektor publik. Bahkan dalam sistem akuntansi berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), prinsip-prinsip evaluasi berbasis manfaat dan outcome merupakan turunan dari etika utilitarian. Sistem ini mendorong institusi negara untuk tidak hanya sekadar “menghabiskan anggaran”, tetapi menjelaskan sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan kesejahteraan publik yang nyata.

Namun demikian, seperti yang juga dicatat oleh John Stuart Mill, murid dan pengembang teori Bentham, pendekatan utilitarian memiliki risiko inheren: ia dapat menjustifikasi pengorbanan hak minoritas atas nama kepentingan mayoritas. Misalnya, penghapusan subsidi transportasi untuk komunitas terpencil dapat dianggap efisien secara fiskal karena menghemat anggaran, namun secara etis menjadi persoalan jika kebijakan itu mengabaikan hak mobilitas kelompok yang sangat membutuhkannya.

Dalam praktik akuntansi publik, bias ini tampak dalam keputusan penganggaran yang terlalu mengandalkan ukuran agregat seperti PDB per kapita, atau capaian indikator pembangunan yang tidak disertai pembacaan atas ketimpangan internal. Seperti yang dikritisi oleh Sen (1999), pendekatan semacam ini dapat mengaburkan fakta bahwa “average gains” dapat menutupi “individual deprivations.” Maka, pertanyaan penting bagi akuntan publik adalah: apakah laporan keuangan yang “terlihat baik” menyembunyikan penderitaan yang tidak dihitung?

Dalam filsafat Timur, prinsip keseimbangan dan harmoni sering kali menjadi korektif terhadap pendekatan utilitarian yang terlalu kuantitatif. Misalnya, dalam ajaran Konfusianisme, ukuran kebajikan bukan hanya dari akibat terbesar, tetapi dari *ren* (kemurahan hati) dan *li* (kepatutan), nilai yang tidak selalu dapat dihitung, tetapi menjadi landasan legitimasi moral. Dalam budaya Jawa pun dikenal konsep “tepa selira”, empati terhadap sesama, yang sering kali bertentangan dengan logika kalkulatif murni.

Oleh karena itu, dalam pendidikan akuntansi publik, prinsip utilitarian dapat diajarkan bukan sebagai model eksklusif, tetapi sebagai kerangka evaluasi yang memerlukan koreksi etis dari perspektif keadilan dan partisipasi. Mahasiswa harus mampu membaca laporan keuangan tidak hanya dari sisi total manfaat, tetapi juga dari sebarannya, siapa yang menerima, siapa yang tertinggal, dan apakah kebijakan fiskal yang diambil benar-benar membahagiakan rakyat, atau hanya sekadar memenuhi angka-angka.

Dalam semangat Bentham, audit dan pelaporan publik memang harus ditujukan untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar. Namun dalam semangat Sen, Mill, dan bahkan filsafat moral klasik, kebahagiaan itu harus dipastikan tidak dibangun di atas pengorbanan yang tak terdengar dari mereka yang tidak dihitung.

### **3. Etika Tanggung Jawab: Hans Jonas dan Generasi Mendatang**

Dalam era di mana keputusan publik diambil dengan orientasi jangka pendek, berpacu pada serapan anggaran dan target kinerja tahunan, Jonas mengajukan kritik yang fundamental. Jonas (1984) menyatakan bahwa prinsip moral baru bagi zaman modern bukan lagi sekadar apa yang adil atau bermanfaat hari ini, tetapi apakah tindakan kita hari ini dapat menjamin kelangsungan hidup dan martabat umat manusia di masa depan. Ia menyebutnya *das Prinzip Verantwortung*, prinsip tanggung jawab.

Berbeda dengan etika tradisional yang menekankan hubungan antarindividu di masa kini, etika Jonas memperluas cakupan etika ke generasi yang belum lahir. Dalam konteks akuntansi publik, pemikiran ini menantang logika kebijakan fiskal yang semata-mata mengejar keberhasilan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial, lingkungan, dan antargenerasi. Pertanyaan moral dalam etika Jonas bukan hanya "Apakah tindakan ini benar?", tetapi "Apakah dunia tetap layak dihuni setelah tindakan ini dilakukan?"

Dalam praktik penganggaran daerah, misalnya, pengelolaan Dana Desa kerap dikendalikan oleh logika "habiskan dana agar tidak dikurangi tahun depan". Hal ini sering mendorong belanja modal yang seremonial atau tidak berkelanjutan, seperti pembangunan fisik yang mengabaikan kualitas, perawatan, dan manfaat jangka panjang. Dalam kerangka Jonas, tindakan ini merupakan pelanggaran moral terhadap tanggung jawab antar generasi: mengorbankan masa depan demi pencitraan atau penyerapan anggaran hari ini.

Etika tanggung jawab juga sangat relevan dalam konteks pelaporan keuangan. Laporan yang menyembunyikan utang masa depan, liabilitas lingkungan, atau kewajiban sosial terhadap masyarakat adat adalah bentuk penyangkalan terhadap masa depan. Jonas menekankan bahwa teknologi, dan dalam hal ini, sistem keuangan public, harus diatur oleh etika yang menjamin *survivability* spesies manusia dan integritas ekosistem. Oleh karena itu, transparansi fiskal bukan sekadar akuntabilitas kepada lembaga pemeriksa, tetapi tanggung jawab moral terhadap planet dan generasi berikutnya.

Pemikiran Jonas ini mendapat dukungan dari tradisi etika Timur, seperti dalam falsafah Hindu tentang *Dharma* – tugas moral yang tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga terhadap kesinambungan dunia. Dalam kebudayaan Indonesia, nilai *amanah* dalam Islam, *ngemong*

dalam tradisi Jawa, atau *pangampu* dalam konteks Minangkabau menegaskan bahwa pemegang kuasa adalah penjaga warisan, bukan pemilik mutlak. Ini senafas dengan imperatif Jonas: bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab terhadap masa depan adalah bentuk kezaliman struktural.

Dalam sistem pendidikan akuntansi, integrasi etika tanggung jawab berarti menanamkan kesadaran bahwa penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan adalah bagian dari keberlanjutan moral. Mahasiswa perlu dilatih untuk menilai apakah struktur fiskal hari ini membebani generasi mendatang dengan utang sosial, ketimpangan struktural, atau kerusakan ekologis yang tak dapat dipulihkan.

Sebagai tambahan, etika ini juga memperluas cakupan audit sosial. Tidak cukup menilai efisiensi dan kepatuhan; perlu ada audit terhadap dampak jangka panjang, terhadap *jejak ekologis* kebijakan publik, serta terhadap potensi *intergenerational injustice*. Inilah sebabnya mengapa Jonas menyerukan: "Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life."

Melalui prinsip ini, akuntansi publik ditarik dari wilayah prosedural ke ranah eksistensial. Ia tidak lagi sekadar mencatat transaksi, tetapi turut menjaga dunia agar tetap manusiawi dan layak diwariskan. Maka dari itu, pendidikan akuntansi harus mulai mengajarkan masa depan sebagai medan etis, bukan hanya sebagai angka proyeksi dalam grafik fiskal.

#### **4. Teori Keadilan: John Rawls dan Distribusi yang Adil**

Teori keadilan Rawls (1971) merupakan salah satu sumbangan paling berpengaruh dalam filsafat politik dan moral abad ke-20. Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan sebagai dasar struktur dasar masyarakat. Yang pertama adalah prinsip kebebasan dasar yang setara bagi semua, dan yang kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan

ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung.

Prinsip ini menantang gagasan keadilan sebagai kesetaraan absolut maupun meritokrasi murni. Rawls mengajak kita membayangkan posisi dalam *veil of ignorance*, tirai ketidaktahuan, di mana kita tidak tahu posisi sosial kita di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, orang rasional akan memilih sistem yang menjamin kesejahteraan minimum yang layak bagi semua, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan berada di posisi atas.

Dalam konteks akuntansi publik, prinsip keadilan Rawlsian menuntut perubahan paradigma dalam penyusunan dan evaluasi anggaran negara. Pengalokasian dana pembangunan tidak bisa hanya mengikuti logika jumlah penduduk atau potensi ekonomi daerah semata, tetapi harus mempertimbangkan *relational disadvantage*, siapa yang paling tertinggal dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial. Dalam kerangka ini, laporan keuangan publik harus dilihat bukan hanya sebagai instrumen pelaporan, melainkan sebagai cermin distribusi keadilan sosial.

Evaluasi anggaran dan laporan keuangan semestinya mencakup dimensi redistribusi dan *equity mapping*. Sebagai contoh, dua daerah yang sama-sama memperoleh anggaran pendidikan sebesar Rp100 miliar bisa jadi menunjukkan ketimpangan jika satu wilayah sudah memiliki infrastruktur sekolah yang memadai, sementara wilayah lainnya masih kekurangan guru dan bangunan sekolah. Dengan logika Rawls, pengalokasian yang adil bukanlah yang sama, tetapi yang proporsional berdasarkan kebutuhan dan kerentanan.

Dalam filsafat klasik Timur, prinsip serupa dapat ditemukan dalam ajaran Konfusius tentang *yi* (kebenaran moral) yang menempatkan keadilan sebagai tindakan yang mempertimbangkan konteks sosial dan relasi. Seorang penguasa yang adil menurut Konfusius bukan yang memperlakukan semua orang sama, tetapi yang memberi

lebih kepada yang membutuhkan agar tatanan sosial tetap harmonis (Analects, trans. Legge, 1861). Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan bukan soal kesamaan statistik, tetapi soal kebijaksanaan dalam membagi beban dan manfaat.

Dalam sistem keuangan publik Indonesia, masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan prinsip ini. Laporan keuangan pemerintah sering kali menekankan kepatuhan terhadap peraturan (compliance), pencapaian target output, dan opini WTP dari BPK sebagai indikator utama. Padahal, laporan-laporan tersebut belum tentu mencerminkan keberpihakan fiskal terhadap masyarakat yang paling rentan, seperti kelompok miskin pedesaan, masyarakat adat, atau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Rawls memberi kita alat filosofis untuk melihat bahwa akuntansi publik harus berkembang dari pelaporan teknokratis menjadi pelaporan transformatif. Anggaran negara harus dibaca sebagai pernyataan politik tentang siapa yang dihitung, siapa yang dibela, dan siapa yang dilupakan. Maka, evaluasi keuangan negara seharusnya menempatkan keadilan sebagai variabel eksplisit, bukan asumsi implisit.

Dalam pendidikan akuntansi, integrasi teori Rawls dapat diterapkan melalui studi kasus perbandingan distribusi fiskal antardaerah, pelatihan dalam membaca anggaran berbasis indikator ketimpangan, serta pembelajaran berbasis masalah sosial. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar menyusun laporan keuangan yang akurat, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap keadilan distribusional.

Rawls mengingatkan bahwa keadilan adalah "the first virtue of social institutions." Maka akuntansi publik, sebagai bagian dari institusi sosial, harus diuji bukan hanya dengan audit kepatuhan, tetapi dengan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah struktur anggaran ini memperbaiki posisi

mereka yang paling tertinggal? Jika tidak, maka ia gagal dalam fungsi keadilannya.

## 5. Konsep Kebajikan: Aristoteles dan Phronesis dalam Keputusan Fiskal

Aristoteles (trans. Ross, 2009), mengembangkan kerangka etika yang tidak bertumpu pada hukum eksternal maupun hasil semata, melainkan pada pembentukan karakter internal yang diwujudkan melalui tindakan kebajikan (*arete*). Ia membedakan antara tiga jenis pengetahuan: *episteme* (pengetahuan teoritis), *techne* (keterampilan teknis), dan *phronesis* (kebijaksanaan praktis). Dari ketiganya, *phronesis* dianggap sebagai bentuk paling tinggi dari kebijaksanaan moral, karena ia menggabungkan nalar, pengalaman, dan orientasi pada kebaikan dalam tindakan nyata.

Dalam konteks akuntansi publik, *phronesis* menjadi sangat penting karena pengambilan keputusan fiskal kerap berlangsung dalam situasi yang kompleks, ambigu, dan sarat tekanan politik. Tidak semua dilema keuangan dapat diselesaikan dengan rumus atau regulasi. Misalnya, seorang kepala bagian keuangan di pemerintah daerah mungkin harus memilih antara mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan protokol kota atau memperbaiki infrastruktur sanitasi di daerah kumuh. Kedua pilihan mungkin sama-sama sah secara administratif, tetapi berbeda secara moral. Di sinilah *phronesis* memainkan peran: kemampuan untuk menilai mana yang lebih mendekati keadilan substantif, bukan hanya ketaatan prosedural.

Aristoteles menekankan bahwa *kebajikan moral* dibentuk melalui habituasi, pengulangan tindakan yang benar hingga menjadi bagian dari karakter seseorang. Seorang akuntan yang bertindak jujur bukan karena takut audit, melainkan karena integritas telah menjadi kebiasaan yang melekat, merupakan perwujudan dari *arete*. Dalam etika Aristotelian, kebaikan tidak dapat diajarkan hanya melalui

teori, tetapi harus ditumbuhkan melalui keteladanan, praktik reflektif, dan dialog moral yang berkelanjutan.

Hal ini diperkuat oleh MacIntyre (1981), yang menghidupkan kembali pentingnya etika kebajikan dalam dunia modern. Ia berargumen bahwa profesionalisme tanpa kebajikan adalah bentuk nihilisme etis yang membahayakan masyarakat. Dalam dunia akuntansi, ini berarti bahwa keahlian dalam menyusun laporan atau memahami peraturan perpajakan tidak cukup jika tidak disertai dengan *sense of justice, care for the common good*, dan *moral discernment* dalam menghadapi dilema yang tidak terjangkau oleh standar formal.

Dalam filsafat Timur, konsep *phronesis* memiliki padanan dalam nilai-nilai seperti *pradnyā* dalam tradisi Hindu-Buddha (kebijaksanaan intuitif yang mengarah pada welas asih) atau *kebatinan* dalam tradisi Jawa, yang mengajarkan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mempertimbangkan keseimbangan, rasa, dan kepentingan kolektif. Nilai ini hidup dalam praktik musyawarah, laku batin pengabdian, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan.

Dalam pendidikan akuntansi publik, pendekatan Aristotelian mengharuskan perubahan paradigma dari transfer pengetahuan ke pembentukan karakter. Mahasiswa akuntansi tidak cukup diajarkan cara membaca neraca, tetapi juga harus mengalami pelatihan moral melalui studi kasus kompleks, refleksi etika, dan praktik komunitas yang mendekatkan mereka pada realitas sosial. Metode seperti *ethical deliberation, narrative inquiry*, dan *simulasi dilema kebijakan fiskal* dapat dijadikan alat untuk menumbuhkan *phronesis* sebagai kualitas praktis yang melekat pada profesi.

Penting juga disadari bahwa dalam dunia birokrasi, akuntan publik tidak selalu memiliki ruang bebas untuk bertindak berdasarkan moralitas ideal. Namun justru dalam keterbatasan itulah kebijaksanaan praktis diuji. Seorang profesional yang memiliki *phronesis* tidak akan gegabah

dalam menolak atau menerima perintah, tetapi akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, stabilitas sosial, dan tanggung jawab moral jangka panjang.

Oleh karena itu, menumbuhkan *phronesis* dalam profesi akuntansi berarti melahirkan pelaku publik yang tidak hanya cakap dalam sistem, tetapi juga mampu menavigasi ketegangan antara norma, kepentingan, dan nilai. Pendidikan yang bertumpu pada kebajikan akan menghasilkan akuntan yang bukan hanya terampil, tetapi juga arif: mereka yang tahu kapan harus mengikuti aturan, dan kapan harus bertindak di luar aturan demi menjunjung nilai keadilan.

## 6. Al-Ghazali dan Confucius tentang Kemaslahatan dan Kemanusiaan

Dalam lanskap pemikiran etika Timur, kita menemukan kekayaan konseptual yang menekankan keterhubungan antara ilmu, moralitas, dan kesejahteraan bersama. Dua pemikir yang menonjol dalam hal ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali dari tradisi Islam dan Kongzi (Confucius) dari tradisi Tiongkok. Meskipun berasal dari latar budaya dan keagamaan yang berbeda, keduanya menempatkan nilai kemaslahatan dan kemanusiaan sebagai inti dari kebajikan sosial dan tata kelola yang baik. Pemikiran keduanya menawarkan fondasi moral yang sangat relevan untuk mendingkai ulang peran akuntansi publik dalam konteks Indonesia dan Asia secara umum.

Al-Ghazali, dalam karya monumentalnya *Ihya' 'Ulum al-Din* (rev. Fakhry, 2004), menyatakan bahwa ilmu tidak bernilai tanpa amal, dan amal tidak bermakna tanpa niat yang lurus. Ia membagi ilmu ke dalam dua kategori: *fardhu 'ain* (yang wajib bagi setiap individu) dan *fardhu kifayah* (yang wajib bagi komunitas selama ada yang menunaikannya). Ilmu akuntansi, dalam pandangan ini, termasuk dalam kategori *fardhu kifayah* yang harus dijalankan dengan orientasi pada *maslahah*, yakni kemanfaatan kolektif yang tidak merugikan satu pun kelompok. Al-Ghazali

memperingatkan bahwa ilmu yang digunakan hanya untuk kepentingan duniawi, atau bahkan untuk menipu dan mengakumulasi kekayaan pribadi, akan menjadi beban moral bagi pemiliknya di akhirat.

Dalam konteks akuntansi publik, prinsip *masalah* menuntut agar seluruh proses penganggaran, pelaporan, dan audit dijalankan dengan kesadaran bahwa dana publik adalah amanah, bukan sumber kekuasaan. Maka, akuntan publik tidak cukup hanya memastikan laporan keuangan disusun sesuai SAP, tetapi harus menimbang apakah anggaran itu telah menyejahterakan masyarakat yang paling membutuhkan, atau hanya memperkuat status quo birokrasi.

Sementara itu, Confucius (trans. Legge, 1861) mengajarkan bahwa tata kelola yang baik bertumpu pada dua prinsip utama: *li* dan *ren*. *Li* merujuk pada ritual, tata krama, dan kepatutan dalam interaksi sosial dan kelembagaan. Dalam dunia pemerintahan, *li* mengatur bahwa tindakan seorang pejabat harus senantiasa mempertimbangkan tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan *ren* berarti kemanusiaan, belas kasih, dan empati terhadap sesama. Tanpa *ren*, *li* menjadi formalitas kosong; tanpa *li*, *ren* menjadi tidak terstruktur.

Dalam kerangka ini, akuntansi publik bukanlah aktivitas netral, melainkan bagian dari *li* pemerintahan yang harus dijalankan dengan *ren* sebagai motivasi. Ketika seorang akuntan menyusun laporan anggaran, ia tidak hanya sedang mencatat transaksi, tetapi sedang berpartisipasi dalam proses etis yang memengaruhi nasib banyak orang. Maka tanggung jawabnya tidak hanya kepada pimpinan lembaga atau BPK, tetapi kepada rakyat yang tak pernah membaca laporan itu, namun sangat terpengaruh oleh isinya.

Etika Konfusian ini mengandaikan bahwa pejabat publik, termasuk akuntan, harus memimpin dengan teladan. "Jika seorang pemimpin benar, rakyat tidak akan berani salah," tulis Confucius. Dalam konteks birokrasi keuangan, ini berarti bahwa integritas seorang pengelola anggaran akan

menciptakan kultur keuangan yang etis dalam satuan kerjanya. Budaya disiplin anggaran, keterbukaan informasi, dan partisipasi warga tidak bisa lahir dari prosedur, tetapi dari keteladanan moral yang ditunjukkan dalam tindakan sehari-hari.

Konsep *masalah* Al-Ghazali dan *ren-li* Confucius membuka jalan untuk membangun pendekatan etika profesional yang lebih humanistik dan kontekstual. Alih-alih terjebak pada standar normatif Barat yang kadang tidak sensitif terhadap dimensi relasional dan spiritual dalam masyarakat Asia, filsafat Timur ini menawarkan etika yang lebih terintegrasi: antara kewajiban kepada institusi dan tanggung jawab kepada komunitas.

Dalam pendidikan akuntansi publik, nilai-nilai ini harus dihidupkan melalui pengajaran yang menggabungkan pelatihan teknis dengan dialog filosofis. Mahasiswa perlu diajak merenungkan, misalnya, apa arti kejujuran dalam budaya mereka, bagaimana konsep *amanah* atau *rasa malu* bisa memperkuat transparansi, dan bagaimana cara menghormati masyarakat kecil tanpa menjadikan mereka objek statistik.

Etika yang berakar pada kebudayaan sendiri bukan bentuk resistensi terhadap modernitas, melainkan upaya menjadikan modernitas lebih beradab. Dalam semangat Al-Ghazali dan Confucius, akuntansi publik seharusnya bukan jalan menuju efisiensi administratif semata, tetapi jembatan menuju kemuliaan masyarakat.

### **Etika sebagai Langit di Atas Angka**

Bab ini menegaskan bahwa berbagai aliran filsafat menawarkan prinsip-prinsip etis yang dapat memperkaya praktik akuntansi publik. Kant mengajarkan disiplin moral, Bentham manfaat sosial, Jonas tanggung jawab masa depan, Rawls keadilan distribusi, Aristoteles kebijaksanaan dalam tindakan, dan Al-Ghazali serta Confucius nilai-nilai kemanusiaan dalam laku profesional.

Jika pendidikan akuntansi publik hanya mengajarkan angka, ia akan kehilangan langit nilainya. Tetapi jika ia diajarkan sebagai praktik moral yang menyentuh struktur sosial, maka ia akan menjadi pondasi peradaban fiskal yang adil, reflektif, dan manusiawi.

#### **Agenda Transformatif Bab IV: Pendidikan sebagai Infrastruktur Etika Negara**

Bab IV menempatkan pendidikan sebagai simpul strategis dalam Visi Indonesia 2045. Dengan mengacu pada Bourdieu (*habitus*), Nussbaum (*capabilities*), dan Freire (pendidikan sebagai praksis kebebasan), bagian ini menekankan bahwa pendidikan akuntansi publik harus membentuk *habitus* etis yang reflektif dan transformatif. Mahasiswa tidak hanya belajar cara menghitung APBD, tetapi juga mempertanyakan keadilan di balik alokasinya. Pendidikan menjadi arena pembentukan keberanian moral dan kapabilitas etis, sebuah benteng awal untuk menolak prosedur yang menindas dan merancang pelaporan yang memanusiakan.

#### **D. Akuntansi dan Filsafat Nusantara: Menyatukan Etika Kolektif dan Praktik Transparansi**

Akuntansi publik, dalam perspektif yang lebih luas, tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan pandangan dunia yang hidup dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, praktik keuangan publik tidak hanya berlangsung dalam ruang institusional formal, tetapi juga diwarnai oleh warisan budaya kolektif dan etika sosial yang telah lama berkembang. Filsafat Nusantara, yang termanifestasi dalam ajaran-ajaran seperti gotong royong, musyawarah, rasa malu (*tepo seliro*), dan tanggung jawab kolektif, menawarkan kerangka moral yang relevan untuk membingkai ulang peran akuntansi dalam kehidupan sosial.

##### **1. Akuntansi sebagai Cermin Etika Sosial**

Dalam kebudayaan Nusantara, struktur nilai tidak berakar pada individualisme liberal sebagaimana yang berkembang dalam model ekonomi Barat, melainkan pada etika kolektif yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan

tanggung jawab bersama. Konsep *gotong royong* yang hidup di hampir seluruh pelosok Indonesia bukan hanya bentuk kerja sama fisik, tetapi juga mencerminkan sistem distribusi tanggung jawab dan partisipasi moral yang merata. Gotong royong menuntut keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam menjaga keberlangsungan komunal, dan dalam konteks tata kelola publik, nilai ini mewujudkan dalam bentuk pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan yang melibatkan warga secara aktif.

Di banyak desa di Jawa, misalnya, praktik *rembug warga* dan pembacaan laporan dana desa secara terbuka di balai desa telah lama menjadi bagian dari budaya politik lokal. Studi oleh Yani dan Wahyudi (2020) dalam *Jurnal Sosial Politik Desa* menunjukkan bahwa tradisi musyawarah anggaran di desa-desa di Kabupaten Kulon Progo memperlihatkan model akuntansi deliberatif berbasis budaya lokal. Masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dilaporkan, tetapi juga merasa memiliki informasi tersebut karena dilibatkan secara langsung. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik bukan hanya bersifat vertikal (dari pemerintah ke rakyat), tetapi juga horizontal (antarwarga dalam satu sistem nilai kolektif).

Dalam kerangka filosofis, prinsip-prinsip ini beresonansi dengan gagasan Aristoteles mengenai *ethos* dan *phronesis*. Menurut Aristoteles, kebajikan bukan hanya soal mengetahui yang baik, tetapi *membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dalam praktik*. *Phronesis* atau kebijaksanaan praktis adalah jenis kebijaksanaan yang tidak bersifat teoretis, melainkan yang terasah dalam kehidupan nyata. Dalam konteks akuntansi publik, ini berarti bahwa etika keuangan tidak bisa sekadar menjadi modul mata kuliah, melainkan harus dilatihkan secara berulang melalui proses pelaporan yang transparan, mekanisme evaluatif yang partisipatif, dan pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah.

Etika akuntansi dalam masyarakat Nusantara juga erat kaitannya dengan konsep *rasa malu* (Javanese: *isin*) yang mengandung dimensi moral-spiritual. Seorang pengelola dana publik yang terbukti menyalahgunakan keuangan akan mengalami bukan hanya sanksi hukum, tetapi juga isolasi moral dari komunitas. Sebagaimana dicatat oleh Koentjaraningrat (1985), struktur nilai masyarakat Indonesia bersandar kuat pada *pengendalian sosial informal* melalui norma, rasa, dan simbol. Dalam kerangka ini, praktik akuntansi menjadi instrumen penataan sosial yang menjembatani antara sistem administratif negara dengan nilai-nilai lokal yang hidup dan dihormati.

Hal yang serupa juga ditemukan dalam tradisi Minangkabau, di mana pelaporan keuangan nagari dilakukan secara adat dengan menyebutkan secara lisan kepada semua *urang sumando* dan *mamak kaum*. Sebuah studi oleh Bakar dan Ramli (2019) menyebutkan bahwa pelaporan dana pembangunan dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti semua kalangan, dan kesalahan perhitungan bukan hanya dianggap teknis, tetapi juga moral, karena menyangkut nama baik kaum.

Dengan demikian, akuntansi di dalam konteks Nusantara tidak sekadar dipahami sebagai sistem dokumentasi finansial, tetapi sebagai *panggung etika sosial* yang mempertaruhkan kehormatan bersama. Pelaporan keuangan menjadi sarana untuk menegaskan nilai *kejujuran* (jujur dalam hitungan), *keterbukaan* (buka catatan), dan *kepekaan sosial* (tidak menumpuk dana tanpa memberi dampak).

Pendidikan akuntansi publik di Indonesia perlu mengambil pelajaran dari warisan nilai ini. Modul tentang transparansi fiskal seharusnya disertai dengan pemahaman antropologis atas praktik akuntansi berbasis budaya. Ini tidak hanya akan membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan teknis semata.

## 2. Serat Wedhatama dan Kebijakan Etis

Dalam khazanah sastra Jawa, *Serat Wedhatama* karya Mangkunegara IV merupakan teks klasik yang mengajarkan bahwa kebijakan sejati (*ngelmu*) tidak dapat dipisahkan dari *laku* dan *rasa*, yakni tindakan dan kepekaan batin. Dalam bait-baitnya, Mangkunegara menegaskan bahwa ilmu yang tidak dijalankan dengan laku tidak akan menghasilkan kemuliaan. Pendidikan yang baik adalah yang membentuk budi pekerti, bukan sekadar transfer kognisi. Pandangan ini beresonansi dengan kritik Freire (1970) mengancam model pendidikan “banking” yang hanya memposisikan peserta didik sebagai wadah pasif penerima informasi, bukan sebagai subjek transformasi.

Dalam konteks pendidikan akuntansi publik, pendekatan Wedhatama menggarisbawahi pentingnya menjadikan *ngelmu akuntansi* tidak hanya sebagai penguasaan teknis PSAK atau SAP, tetapi sebagai fondasi untuk bertindak secara etis. Seorang bendahara desa, menurut etika Wedhatama, adalah seorang *ksatria* yang mengemban amanah public, ia bertanggung jawab secara spiritual dan sosial atas kepercayaan komunitas. Oleh sebab itu, kurikulum akuntansi publik perlu melibatkan studi kasus budaya, refleksi nilai-nilai lokal, dan metode evaluasi berbasis pengalaman moral. Nilai-nilai ini diperkuat oleh prinsip *virtue ethics* yang juga dianut Aristoteles, yakni bahwa pendidikan sejati adalah yang membentuk karakter (*ethos*), bukan hanya pikiran (*nous*).

## 3. Bung Hatta dan Etika Ekonomi Rakyat

Mohammad Hatta, dalam kapasitasnya sebagai Bapak Koperasi Indonesia, telah meletakkan dasar konseptual penting bagi akuntansi berbasis rakyat. Dalam pidato pembukaan Kongres Koperasi Indonesia Pertama (1953), Hatta menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab bersama. Ia menyebut bahwa “koperasi bukan hanya alat produksi, tetapi juga alat

pendidikan karakter,” yang mengajarkan akuntabilitas, kesederhanaan, dan transparansi.

Gagasan Hatta sejalan dengan prinsip *justice as fairness* yang diusung Rawls (1971), di mana sistem sosial harus didesain untuk menguntungkan kelompok yang paling lemah. Dalam praktiknya, akuntansi koperasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keterbukaan, setiap laporan keuangan harus dapat dibaca dan dipahami oleh anggota, audit dilakukan secara partisipatif, dan tidak ada dominasi oleh elit internal. Nilai-nilai ini semakin relevan ketika dihubungkan dengan prinsip *capability approach* dari Sen (1999), yang menekankan bahwa sistem fiskal harus memperluas kemampuan masyarakat untuk hidup bermartabat.

Dalam studi oleh Nasution dan Dewi (2018) ditemukan bahwa koperasi yang berbasis pada prinsip demokrasi ekonomi dan pelaporan partisipatif cenderung lebih berkelanjutan secara sosial. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi publik di Indonesia perlu mengambil pelajaran dari praktik koperasi dan menjadikannya sebagai bagian dari pembelajaran etika profesional.

#### 4. Akuntansi dan Nilai Rasa Malu

Dalam antropologi moral masyarakat Indonesia, *rasa malu* merupakan nilai pengontrol yang memiliki kekuatan simbolik yang besar. Berbeda dengan pendekatan hukum modern yang berbasis sanksi legal-formal, rasa malu menjadi mekanisme kontrol sosial yang menekan individu untuk menjaga reputasi di hadapan komunitas. Dalam praktik birokrasi desa, seseorang yang menyalahgunakan dana pembangunan akan dianggap kehilangan muka (*ora nduwe rai*), sebuah stigma sosial yang lebih berat daripada sanksi administratif.

Nilai ini memiliki padanan dengan konsep *li* dan *ren* dalam filsafat Confucius, di mana tata krama dan rasa kemanusiaan dijadikan fondasi tata kelola publik yang etis (Confucius, trans. Legge, 1861). Dalam pendekatan

Konfusian, pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari hasil, tetapi dari keteladanan moral aktor publiknya. Dalam konteks Indonesia, nilai rasa malu dan rasa hormat ini menjadi dasar bagi praktik-praktik audit sosial informal yang berbasis komunitas, seperti *pembacaan terbuka laporan keuangan desa* di balai adat.

Temuan Bringle dan Hatcher (1996) dalam penelitian mereka tentang *service learning* menegaskan bahwa integritas moral lebih efektif dibentuk melalui pengalaman sosial langsung, bukan sekadar melalui teori di ruang kelas. Maka dari itu, kurikulum akuntansi publik yang ingin menanamkan etika harus melibatkan mahasiswa dalam praktik langsung, seperti pendampingan anggaran desa atau pelaporan dana bantuan masyarakat.

## 5. Menuju Pendidikan Akuntansi yang Membumi

Membumikan pendidikan akuntansi berarti mengembalikan praktik belajar ke konteks sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pengajaran PSAK, SAP, atau IPSAS tidak akan cukup membentuk profesional yang etis jika tidak disertai dengan pemahaman akan makna sosial dari pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi publik perlu menggabungkan pendekatan transdisipliner: filsafat etika, antropologi sosial, studi kebijakan fiskal, dan kearifan lokal.

Praktik audit sosial yang berbasis komunitas dapat dijadikan metode pembelajaran: mahasiswa tidak hanya belajar bagaimana menyusun laporan, tetapi juga bagaimana mendengarkan warga, merespons aspirasi, dan mempertimbangkan dampak anggaran terhadap keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Nussbaum (2010) bahwa pendidikan harus menciptakan *capable citizens*, bukan hanya *skilled workers*.

Dengan demikian, pendidikan akuntansi publik yang mengakar pada filsafat Nusantara bukan sekadar pendekatan lokalistik, tetapi merupakan strategi etis untuk menciptakan

sistem fiskal yang berkeadilan, reflektif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

#### **E. Bahasa Akuntansi dan Kekuasaan: Narasi, Netralitas, dan Representasi yang Menyesatkan**

Dalam dunia modern yang dibingkai oleh angka dan prosedur, akuntansi seringkali dipersepsikan sebagai bahasa yang netral, seolah-olah laporan keuangan adalah cerminan objektif dari realitas fiskal. Namun, pandangan ini telah lama dikritik oleh pendekatan-pendekatan kritis dalam studi akuntansi yang menyatakan bahwa bahasa akuntansi bukan hanya alat dokumentasi, melainkan instrumen kekuasaan. Dalam bab ini, akan dibahas secara kritis bagaimana bahasa teknis dalam laporan keuangan bisa menyembunyikan ketimpangan, menyamarkan konflik kepentingan, dan melegitimasi keputusan yang tidak adil secara sosial, namun sah secara prosedural.

##### **1. Bahasa Akuntansi sebagai Konstruksi Sosial**

Laporan keuangan, meskipun tampak tersusun secara objektif melalui angka-angka, sejatinya merupakan hasil konstruksi sosial yang sangat kental dengan narasi dan kepentingan institusional. Setiap angka yang muncul dalam neraca atau laporan laba rugi tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan hasil dari serangkaian keputusan kebijakan akuntansi, klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan yang dipengaruhi oleh kerangka ideologis serta dominasi sistemik dalam organisasi. Dengan kata lain, bahasa akuntansi bukanlah medium yang netral atau transparan secara otomatis; ia adalah bahasa yang disusun untuk mengartikulasikan kenyataan dalam format yang disetujui oleh kekuasaan dominan.

Hopwood (1987) menyatakan bahwa akuntansi harus dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang kompleks dan tidak pernah netral. Menurutnya, sistem akuntansi menciptakan realitas sosial dengan cara menetapkan apa yang penting untuk dicatat, apa yang layak diukur, dan apa

yang dapat diabaikan. Pernyataan ini diperkuat oleh Hines (1988), dalam artikelnya *Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality*, yang secara eksplisit menyatakan bahwa "accounting does not reflect reality, it creates reality". Dengan kata lain, akuntansi tidak menggambarkan kenyataan sebagaimana adanya, melainkan membentuk versi realitas yang secara politis dan institusional dapat diterima.

Ketika pemerintah melaporkan bahwa "belanja sosial meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya", informasi tersebut tampak positif secara numerik, namun menyimpan banyak ketidakjelasan: apakah kenaikan itu merata di seluruh wilayah? Apakah kelompok marginal turut menerima manfaat? Apakah kenaikan tersebut cukup untuk mengimbangi inflasi atau kebutuhan riil masyarakat? Semua pertanyaan ini tersembunyi di balik konstruksi kalimat yang teknokratik. Bahasa anggaran dalam hal ini meniru gaya bahasa statistik birokratis yang meminimalisir makna sosial dan menghindari narasi konflik.

Habermas (1984) menjelaskan bahwa dominasi institusional terjadi ketika bahasa direduksi menjadi instrumen manipulasi teknis dan kehilangan dimensi komunikatif yang sejati. Dalam sistem fiskal, laporan keuangan menjadi sarana yang tidak hanya mendefinisikan hasil kebijakan, tetapi juga menstabilkan persepsi publik terhadap legitimasi penguasa. Hal ini serupa dengan konsep Foucault tentang "regime of truth" (1980), yaitu bahwa setiap masyarakat menciptakan sistem kebenaran yang didukung oleh institusi, prosedur, dan narasi yang mengatur apa yang dianggap valid. Dalam konteks akuntansi publik, angka-angka keuangan menjadi "kebenaran resmi" yang jarang dipertanyakan.

Secara historis, Plato (trans. Bloom, 1991) telah mengingatkan tentang bahaya "the noble lie", kebohongan mulia yang digunakan penguasa untuk mempertahankan stabilitas sosial. Jika angka-angka dalam laporan keuangan

digunakan untuk menciptakan ilusi keberhasilan tanpa mengungkap penderitaan struktural yang tersembunyi, maka bahasa akuntansi telah menjadi bentuk modern dari "noble lie" tersebut. Ini juga beririsan dengan kritik modern dari Bourdieu, yang melihat bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan simbolik yang membentuk struktur sosial melalui dominasi makna (Bourdieu, 1991).

Dengan demikian, pendidikan akuntansi tidak dapat lagi diajarkan sebagai pembelajaran format dan prosedur semata. Mahasiswa harus dibekali kesadaran kritis untuk membaca bahwa setiap angka adalah hasil dari konstruksi sosial yang mencerminkan struktur kuasa, nilai dominan, dan narasi politik tertentu. Literasi ini penting agar akuntan publik tidak hanya menjadi pencatat, tetapi juga penyaksi sosial yang sadar akan makna yang mereka bantu bentuk.

## 2. Netralitas Bahasa sebagai Strategi Kekuasaan

Dalam konteks pelaporan keuangan publik, bahasa teknis yang digunakan sering kali dikonstruksi untuk tampil netral, padahal mengandung bias ideologis yang kuat. Istilah-istilah seperti "defisit anggaran", "penyesuaian fiskal", "restrukturisasi pengeluaran", atau "optimalisasi belanja modal" merupakan eufemisme yang menyamarkan realitas sosial dari sebuah kebijakan yang berpotensi menyakiti kelompok miskin dan termarginalkan. Bahasa teknis ini digunakan bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk mengaburkan, sebuah bentuk *strategic vagueness* yang mempersulit publik dalam mengakses makna kebijakan secara substantif.

Foucault (1978) menekankan bahwa kekuasaan modern tidak lagi beroperasi secara represif, melainkan melalui pengaturan wacana yang membentuk apa yang dapat dikatakan, siapa yang dapat berbicara, dan bagaimana makna dibingkai. Dalam hal ini, bahasa akuntansi menjadi bagian dari apa yang ia sebut sebagai *regime of truth*, sistem produksi kebenaran yang menentukan batas apa yang sah

untuk dipercaya. Ketika bahasa fiskal dimonopoli oleh teknokrat, maka partisipasi warga dalam proses kebijakan menjadi ilusi belaka. Rakyat tidak lagi memiliki akses ke makna, hanya kepada bentuk.

Konsep ini diperkuat oleh Gramsci (1971) dalam gagasan *hegemoni*, di mana dominasi terjadi bukan melalui paksaan, melainkan melalui konsensus yang dibentuk oleh pengendalian makna dan simbol. Dalam laporan anggaran, ketika pemotongan bantuan sosial disebut sebagai "efisiensi belanja negara", maka yang sedang terjadi bukan hanya penghematan, tetapi pengaburan tanggung jawab negara atas hak-hak dasar warganya. Pendidikan akuntansi yang tidak menyadari ini berisiko melanggengkan teknokratisme buta yang abai terhadap dimensi etis dan sosial.

### 3. Akuntansi dan Ilusi Representasi

Bahasa akuntansi menciptakan ilusi representasi dengan menyamakan pelaporan angka dengan kenyataan sosial. Namun sebagaimana ditunjukkan oleh Cooper dan Puxty (1994), representasi dalam akuntansi tidak pernah bebas nilai. Ia selalu bersifat selektif: apa yang diukur adalah apa yang dinilai penting oleh struktur kekuasaan. Dalam laporan keuangan, hanya aktivitas yang dapat dimonetisasi yang dianggap relevan. Kontribusi sosial non-moneter seperti kerja sukarela, swadaya masyarakat, atau kontribusi gotong royong sering kali tidak diakui dalam sistem akuntansi formal.

Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dalam laporan keuangan desa di mana kegiatan pembangunan berbasis partisipasi warga (seperti kerja bakti atau swakelola warga adat) tidak tercermin dalam nilai uang. Hal ini menciptakan ketimpangan epistemologis: realitas sosial komunitas dihilangkan dari catatan negara. Bourdieu (1991) menyebut fenomena ini sebagai bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*), di mana bahasa formal digunakan untuk menyingkirkan praktik sosial yang tidak sesuai dengan logika dominan.

Fenomena ini juga diperkuat oleh pandangan Lyotard (1984) dalam *The Postmodern Condition*, yang mengkritik narasi besar (*grand narratives*) dalam sistem modern yang menyederhanakan kompleksitas realitas sosial demi efisiensi sistem. Dalam hal ini, bahasa akuntansi menjadi bagian dari narasi besar pembangunan yang menyembunyikan ketimpangan dan menegaskan dominasi pusat atas lokal, negara atas komunitas.

#### **4. Kritik Filosofis terhadap Simbolisme Angka**

Dalam filsafat klasik, Plato melalui *The Republic* telah mengingatkan tentang bahaya penggunaan retorika dan simbolisme dalam mengaburkan kebenaran. Ketika angka-angka digunakan tidak sebagai alat penalaran, tetapi sebagai simbol prestise dan legitimasi kekuasaan, maka angka telah berubah menjadi mitos. Dalam praktik akuntansi modern, hal ini terjadi ketika indikator kinerja seperti "serapan anggaran", "WTP" (Wajar Tanpa Pengecualian), atau "IKU" dijadikan parameter tunggal keberhasilan birokrasi, tanpa mempertanyakan dampak sosial yang ditimbulkan.

Power (1997) menyatakan bahwa masyarakat modern telah berubah menjadi masyarakat audit, di mana segala sesuatu harus dapat diaudit, diukur, dan ditampilkan dalam angka. Akibatnya, akuntansi tidak hanya menjadi teknik pelaporan, tetapi menjadi bahasa otoritatif dalam menyusun realitas sosial. Hal ini selaras dengan gagasan Baudrillard (1981) tentang *simulacra*, yakni ketika representasi tidak lagi merujuk pada kenyataan, tetapi menjadi kenyataan itu sendiri yang dikonsumsi publik. Ketika laporan keuangan dinyatakan "baik" karena sesuai format, meskipun substansinya menutupi praktik eksklusif atau korupsi, maka akuntansi telah jatuh ke dalam wilayah hiperrealitas.

#### **5. Membongkar Netralitas: Menuju Literasi Akuntansi Publik**

Untuk menghadapi realitas ini, pendidikan akuntansi publik di Indonesia perlu bertransformasi menjadi arena pembebasan wacana. Mahasiswa perlu dilatih untuk menjadi

pembaca kritis, bukan hanya menghafal prosedur. Mereka perlu memahami bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga teks ideologis yang membawa implikasi moral dan politik.

Gagasan Freire (1970) menjadi fondasi penting bagi pendekatan ini. Freire menyerukan agar pendidikan menjadi tindakan sadar, di mana siswa diajak memahami dunia bukan untuk menerima, tetapi untuk mengubahnya. Dalam konteks akuntansi, ini berarti membongkar "narasi netral" yang membungkam ketidakadilan. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan *capability* dari Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan sejati harus menciptakan kebebasan substantif—termasuk kebebasan untuk memahami dan menilai pengelolaan fiskal negara.

Oleh karena itu, kurikulum akuntansi publik harus dilengkapi dengan komponen literasi wacana, studi kasus kritis, dan praktik analisis naratif atas laporan anggaran. Mahasiswa harus belajar untuk bertanya: siapa yang dibungkam oleh angka ini? Siapa yang tidak terlihat dalam laporan ini? Dan nilai apa yang secara sistematis dihapus oleh prosedur teknis?

Bahasa akuntansi bukan sekadar alat teknis, melainkan medan pertempuran naratif. Dalam angka yang terlihat objektif, sering tersembunyi pilihan-pilihan moral, keputusan politis, dan bias struktural. Tugas pendidikan akuntansi publik adalah mengungkap kedalaman ini, membentuk generasi profesional yang tidak hanya cakap menghitung, tetapi juga cakap bertanya: untuk siapa angka-angka ini ditulis, siapa yang diabaikan, dan nilai apa yang dibungkam oleh bahasa teknis.

#### **F. Pendidikan Akuntansi dan Pancasila: Integrasi Nilai dalam Keputusan Fiskal dan Audit Sosial**

Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan akuntansi publik tidak dapat dipisahkan dari fondasi ideologis negara, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya

bingkai politik atau hukum, melainkan juga rujukan etika dan orientasi nilai dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang akuntansi dan keuangan publik. Sayangnya, integrasi Pancasila dalam pendidikan akuntansi selama ini cenderung bersifat simbolik dan normatif, tidak diinternalisasi ke dalam struktur kurikulum maupun praktik profesional. Bab ini akan mengupas secara kritis dan konstruktif bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan fiskal dan audit sosial, serta memperbandingkannya dengan kerangka keadilan yang ditawarkan oleh filsuf-filsuf kontemporer seperti John Rawls dan Martha Nussbaum.

### **1. Sila Keadilan Sosial dan Prinsip Distributif**

Sila kelima dari Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan sila yang paling dekat dengan semangat akuntansi publik yang berkeadilan. Dalam prinsip ini, sistem fiskal dan anggaran negara harus diarahkan untuk menjamin distribusi yang adil, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam praktik audit sosial, nilai ini menuntut bahwa pelaporan keuangan tidak hanya menunjukkan saldo dan serapan anggaran, tetapi juga menjelaskan siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, dan bagaimana keuangan publik digunakan untuk memperluas keadilan sosial.

Rawls (1971) mengemukakan prinsip *difference*, yakni bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini sangat sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila. Oleh karena itu, indikator evaluasi fiskal tidak boleh terbatas pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga harus memasukkan dimensi keadilan, yakni seberapa jauh anggaran mampu menyentuh dan memperbaiki posisi kelompok marjinal.

## **2. Sila Kemanusiaan dan Akuntansi Berbasis Martabat**

Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menekankan pentingnya memperlakukan manusia bukan sebagai objek statistik, tetapi sebagai subjek bermartabat. Dalam pendidikan akuntansi, prinsip ini harus mengubah cara pandang terhadap angka dan laporan keuangan: bukan sekadar data, tetapi representasi kondisi hidup manusia. Nussbaum (2010) melalui *capabilities approach*-nya, menekankan bahwa pembangunan (termasuk fiskal) harus dinilai berdasarkan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang bermakna dan bermartabat.

Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah harus menyampaikan lebih dari sekadar realisasi anggaran; ia harus menggambarkan bagaimana anggaran mendukung perluasan kebebasan substantif warga, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Etika akuntansi dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengakuan atas martabat manusia sebagai dasar dari semua kebijakan.

## **3. Sila Persatuan dan Transparansi Fiskal Partisipatif**

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", secara filosofis mewajibkan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik tidak menciptakan fragmentasi, baik secara vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (kelas sosial, etnis, agama). Dalam praktik akuntansi publik, ini menuntut mekanisme pelaporan dan audit yang inklusif dan merangkul keberagaman.

Prinsip transparansi fiskal harus dilandaskan pada kesetaraan akses informasi dan partisipasi lintas kelompok. Hal ini selaras dengan pemikiran Young (2000), bahwa demokrasi yang adil harus menyediakan ruang bagi semua suara, terutama yang selama ini terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, ini dapat diterjemahkan dalam praktik audit sosial berbasis komunitas adat, perempuan, dan kelompok disabilitas yang secara historis kurang terwakili dalam proses fiskal formal.

#### **4. Sila Ketuhanan dan Etika Spiritualitas Akuntansi**

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan dimensi spiritual terhadap semua bentuk pengambilan keputusan publik. Dalam konteks akuntansi, ini menuntut pengakuan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah bentuk amanah, bukan hanya tanggung jawab administratif. Dalam perspektif ini, akuntan publik adalah penjaga nilai, bukan sekadar penyusun laporan.

Etika spiritual ini memiliki kemiripan dengan gagasan Jonas (1984), yang menekankan bahwa setiap tindakan teknologis dan administratif harus mempertimbangkan tanggung jawab terhadap masa depan umat manusia. Dalam konteks Indonesia, nilai ini dapat diejawantahkan dalam audit berbasis integritas dan akuntabilitas spiritual, seperti sumpah jabatan auditor, kode etik profesi, serta pendidikan karakter dalam kurikulum.

#### **5. Sila Permasyarakatan dan Praktik Akuntansi Deliberatif**

Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," mengandung makna bahwa proses pengambilan keputusan harus dijalankan secara deliberatif dan inklusif. Dalam praktik akuntansi, hal ini berarti bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan harus melalui proses dialogis yang melibatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek.

Konsep ini sejalan dengan demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1984), di mana legitimasi kebijakan hanya dapat diperoleh melalui komunikasi rasional dan setara antarwarga. Dalam pelaksanaan musyawarah desa, pembacaan laporan keuangan secara terbuka bukan hanya menjadi prosedur formal, tetapi perwujudan nilai deliberatif Pancasila.

#### **Pendidikan Akuntansi sebagai Medan Pembumian Pancasila**

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan akuntansi publik, kita tidak hanya membentuk profesional yang kompeten secara teknis, tetapi juga aktor moral yang memahami peran etis dan sosial dari keuangan negara.

Kurikulum akuntansi harus dikembangkan bukan hanya berdasarkan standar teknis (seperti PSAK atau SAP), tetapi juga pada basis nilai yang hidup dalam konstitusi moral bangsa.

Pancasila, dalam hal ini, bukan sekadar semboyan, tetapi sumber norma substantif yang dapat memandu cara kita mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan uang publik. Pendidikan akuntansi publik masa depan harus menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai materi PPKn, tetapi sebagai fondasi epistemologis, etis, dan pedagogis.

### **“Mendidik untuk 2045: Akuntansi sebagai Pilar Kepercayaan Publik”**

#### **1. Dari Kompetensi ke Karakter**

Bagian terakhir dari buku ini tidak lagi bicara tentang teori atau praktik semata, tetapi tentang masa depan. Visi Indonesia 2045 hanya akan tercapai jika akuntabilitas fiskal menjadi nilai, bukan sekadar prosedur. Pendidikan akuntansi memegang peran kunci di sini: ia adalah *penjaga memori kolektif* dan *penentu arah moral* dari setiap keputusan anggaran.

#### **2. Literasi Fiskal sebagai Literasi Demokrasi**

Pelaporan keuangan harus bisa dibaca oleh rakyat. Maka literasi fiskal bukan hanya soal memahami format laporan, tetapi soal kemampuan kritis untuk bertanya: “Apakah ini adil?”, “Apakah ini transparan?”, dan “Apakah ini berpihak?”

Universitas harus menjadi pusat produksi *literasi fiskal demokratis*, yang menggabungkan filsafat publik, data anggaran, dan empati sosial.

#### **3. Akuntansi Publik sebagai Pendidikan Karakter Bangsa**

Dalam semangat Ki Hajar Dewantara, pendidikan akuntansi publik adalah proses memanusiakan angka. Ia bukan hanya tempat belajar SAP dan PSAK, tetapi ruang pembentukan manusia yang berpikir kritis, jujur, dan berani berkata “tidak” ketika prosedur mengabaikan keadilan.

Transisi ini menjadi titik kulminasi: pendidikan bukan lagi tentang “mengajar”, tetapi tentang *membangun integritas kolektif*. Sebuah tugas yang tidak selesai dalam satu semester, tapi harus dibangun lintas generasi.

# BAB 5

## AKUNTANSI PUBLIK SEBAGAI GERAKAN NILAI: AGENDA INTELEKTUAL, INSTITUSIONAL, DAN INTERGENERASIONAL

### A. Intelektual Organik dalam Dunia Angka: Peran Akademisi dan Mahasiswa

Dalam dunia yang semakin ditentukan oleh logika teknokratis, pendidikan tinggi, termasuk pendidikan akuntansi public, sering kali terjerembab dalam fungsi reproduktif: memperkuat struktur kekuasaan yang ada alih-alih menantanginya, melatih keterampilan teknis tanpa membangun keberanian moral, dan mencetak lulusan yang patuh alih-alih sadar. Hal ini tercermin dari orientasi kurikulum yang menitikberatkan pada kepatuhan administratif, kelulusan berbasis standar, dan kompetensi sertifikasi, tetapi minim dalam pembentukan daya reflektif, sikap kritis, dan keberpihakan sosial terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan fiskal negara.

Dalam konteks ini, perlu dihidupkan kembali gagasan intelektual organik sebagaimana dikemukakan oleh Gramsci (1971). Menurutnya, intelektual sejati bukanlah mereka yang hanya hidup dalam dunia akademik dan ide-ide abstrak, melainkan mereka yang terlibat dalam perjuangan kelas, yang menggunakan pengetahuan untuk mendampingi dan menguatkan kesadaran kolektif masyarakat tertindas. Gramsci membedakan antara *intelektual tradisional*, yang beroperasi dalam kerangka dominasi hegemonik, dan *intelektual organik*, yang menjadi bagian dari perjuangan historis kelompok sosial tertentu, dalam konteks ini, rakyat.

Akademisi dan mahasiswa dalam bidang akuntansi publik sesungguhnya menempati posisi strategis untuk menjadi intelektual organik dalam dunia kebijakan fiskal. Mereka memiliki akses terhadap ilmu, data, dan forum diskusi, namun selama peran ini tidak digunakan untuk menginterogasi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, atau untuk membela suara kelompok yang tidak terwakili dalam laporan keuangan negara, maka posisi itu kehilangan legitimasi etis.

Pendidikan akuntansi publik di Indonesia sering kali menutup ruang politik dalam laporan keuangan. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Habermas (1984), rasionalitas teknis harus diimbangi oleh rasionalitas komunikatif, yakni ruang diskursif di mana kebenaran dibentuk melalui deliberasi yang terbuka, setara, dan etis. Laporan keuangan bukan hanya dokumen, tetapi wacana; bukan hanya arsip, tetapi alat legitimasi. Maka, ketika kurikulum akuntansi publik tidak mengajarkan bagaimana mengkritisi anggaran pendidikan yang tidak menyentuh daerah tertinggal, atau bagaimana menyuarakan kelompok miskin dalam narasi fiskal, maka ia sedang memproduksi keheningan sistematis dalam bahasa angka.

Menjadi intelektual organik dalam akuntansi publik berarti membangun peran ganda: sebagai pengajar/pembelajar teknis, dan sekaligus sebagai agen pembebasan. Mahasiswa tidak cukup diajak untuk menghafal SAP dan PSAK, tetapi harus diajak membaca laporan keuangan sebagai teks sosial. Dosen tidak cukup menjadi fasilitator SKS, tetapi juga penggerak wacana keadilan fiskal. Auditor tidak hanya sebagai pelapor kerapian administratif, tetapi juga sebagai saksi sosial yang peka terhadap ketimpangan.

Dalam praktiknya, gerakan ini telah memiliki pijakan. Di beberapa universitas seperti UGM, Unpad, UNY, dan Universitas Brawijaya, telah lahir inisiatif kampus dalam bentuk *social audit mahasiswa*, *kelas kolaboratif dengan inspektorat*, dan *pengabdian anggaran desa berbasis data*. Proyek seperti Community Budget Lab, Forum Transparansi Desa-Kampus, serta audit

berbasis warga (citizen audit) menunjukkan bahwa ruang untuk peran intelektual organik sudah ada, hanya perlu dikonsolidasikan secara sistemik dan ditopang oleh visi kurikulum yang progresif.

Nussbaum (2010) menegaskan pentingnya pendidikan yang mampu membentuk “citizen of the world”, yakni manusia yang memiliki kapasitas berempati, berargumentasi kritis, dan bertindak untuk kebaikan bersama. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini bersenyawa dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai “pembimbing batin untuk mencapai kemerdekaan sejati”. Maka menjadi akademisi atau mahasiswa akuntansi publik bukan hanya persoalan profesi, tetapi panggilan moral untuk menyuarakan keadilan fiskal dalam bahasa yang sistematis dan dapat diverifikasi.

Dengan demikian, peran intelektual dalam akuntansi publik harus ditulis ulang: bukan sebagai pengamat sistem, melainkan sebagai bagian dari sistem yang sedang diperjuangkan agar lebih adil. Dalam dunia angka, mereka menjadi suara. Dalam dunia laporan, mereka menjadi nurani. Dan dalam dunia kebijakan, mereka menjadi pengingat bahwa negara tidak hanya dikelola dengan hukum dan data, tetapi juga dengan hati dan keberpihakan.

### **Intelektual Organik dan Pendidikan Akuntansi**

Gramsci membedakan antara dua tipe intelektual: *intelektual tradisional*, yang cenderung mempertahankan status quo dan bekerja dalam institusi konservatif seperti universitas; dan *intelektual organik*, yang terlibat dalam proses sosial-politik, membentuk kesadaran kolektif dan berupaya mengubah struktur dominan. Dalam konteks pendidikan akuntansi publik, dosen dan mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjalankan peran sebagai intelektual organik, yakni sebagai agen etis dan politis yang mampu menghubungkan ilmu akuntansi dengan perjuangan keadilan sosial.

Namun kenyataannya, banyak institusi pendidikan akuntansi di Indonesia masih membatasi fungsi mahasiswa dan dosen pada penguasaan teknis. Mahasiswa diajarkan untuk

menyusun laporan keuangan yang sesuai SAP dan PSAK, tetapi jarang diajak merenungkan siapa yang diuntungkan oleh laporan tersebut, siapa yang dirugikan, dan bagaimana angka dapat menyembunyikan ketimpangan.

Freire (1970) mengkritik model pendidikan seperti ini sebagai *banking education*, yakni pendidikan yang melihat peserta didik sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh pengetahuan dari otoritas. Dalam model ini, tidak ada dialog kritis; tidak ada kesadaran; hanya transmisi. Padahal, Freire menekankan pentingnya *conscientization*, kesadaran kritis sebagai syarat emansipasi sosial.

Pendidikan akuntansi yang hanya mencetak pelapor angka, tanpa membekali keberanian moral dan imajinasi etis, hanya akan melestarikan sistem fiskal yang timpang. Sebaliknya, pendidikan yang membangkitkan kesadaran akan ketimpangan dan memberdayakan mahasiswa untuk bertindak adalah jalan menuju akuntansi yang memihak keadilan. Dalam bahasa Nussbaum (2010), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang membentuk *capabilities* substantif, termasuk kemampuan untuk membuat penilaian moral, berpikir kritis, dan memiliki empati sosial.

### **Dosen dan Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Fiskal**

Dalam lanskap birokrasi Indonesia yang sarat tekanan administratif dan praktik simbolik, dosen akuntansi publik dapat memainkan peran strategis sebagai penggerak nilai dan kesadaran. Dosen yang sekadar menyampaikan materi teknis berkontribusi pada reifikasi sistem. Sebaliknya, dosen yang mampu membangun dialog reflektif, menyajikan studi kasus nyata, dan mendorong pemikiran kritis, berkontribusi pada penciptaan *intelektual kolektif* yang siap mengubah wajah pelaporan keuangan publik.

Aristoteles menekankan pentingnya *phronesis*, atau kebijaksanaan praktis, sebagai ciri manusia bijak. Pendidikan bukan hanya melatih keterampilan (*techne*) atau memberikan pengetahuan teoretis (*episteme*), tetapi harus menghasilkan kebijaksanaan dalam bertindak secara etis dalam situasi

kompleks. Dalam hal ini, mahasiswa akuntansi publik perlu dilatih untuk mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga berdasarkan keberpihakan pada nilai-nilai publik dan kemaslahatan bersama.

Di Jepang, misalnya, pendekatan etika kolektif dalam pendidikan akuntansi dilandaskan pada prinsip *giri* (kewajiban moral) dan *on* (rasa terima kasih sosial), yang diturunkan dari Konfusianisme. Confucius dalam *Analects* menyatakan bahwa pemimpin sejati bukan hanya patuh aturan, tetapi menjadi teladan moral. Maka, dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini bisa dijembatani dengan semangat *ing ngarso sung tulodho*, bahwa dosen dan pemimpin pendidikan harus memberi teladan integritas dan keberanian etis (Dewantara, 1937).

### **Studi Mini: Inisiatif Kampus dan Akuntansi Transformatif**

Beberapa kampus di Indonesia mulai membangun kesadaran ini melalui inisiatif yang menjanjikan. Di Universitas Gadjah Mada, program *Social Audit Berbasis Mahasiswa* dijalankan dalam kerja sama dengan desa-desa binaan. Mahasiswa tidak hanya membantu menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa, tetapi juga memberikan pelatihan literasi fiskal kepada warga. Dalam proses ini, mereka belajar langsung bahwa laporan keuangan bukan hanya soal keakuratan, tetapi juga tentang bagaimana data digunakan untuk memberdayakan warga (UGM Fiscal Transparency Report, 2022).

Contoh lain adalah program *Anggaran Partisipatif Mahasiswa* di Universitas Andalas, di mana mahasiswa akuntansi diminta merancang simulasi APBD berbasis prinsip Rawlsian, bagaimana anggaran dapat dirancang untuk menguntungkan kelompok paling rentan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa mulai belajar bahwa keadilan fiskal adalah hasil dari deliberasi etis, bukan hanya dari pemenuhan kuota.

Sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1984), komunikasi yang rasional dan terbuka adalah prasyarat demokrasi deliberatif. Dalam pendidikan akuntansi, ini berarti membuka ruang diskusi yang tidak hanya menilai format

laporan, tetapi juga mempertanyakan substansi keadilan dan keberpihakan di dalamnya. Dengan model pembelajaran seperti ini, mahasiswa bukan hanya disiapkan untuk menjadi akuntan yang profesional secara teknis, tetapi juga *civic accountants*, profesional yang bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

### **Penutup Reflektif**

Pendidikan tinggi di bidang akuntansi publik bukan hanya sarana pencetak tenaga kerja profesional, tetapi medan pembentukan *intelektual organik* yang berpihak pada keadilan fiskal. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi, kita tidak hanya membutuhkan pelapor yang jujur, tetapi pemikir yang berani. Dosen dan mahasiswa yang menjalankan peran ini akan mengubah pelaporan keuangan dari sekadar produk administrasi menjadi tindakan etika yang menjawab kebutuhan zaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, ilmu yang tidak membawa maslahat sosial hanyalah kesia-siaan. Maka pendidikan akuntansi publik yang sejati adalah pendidikan yang memanusiakan angka, memaknai pelaporan, dan membebaskan masyarakat dari ketidaktahuan fiskal. Dengan spirit ini, akademisi dan mahasiswa menjadi penjaga nurani keuangan negara, bukan sekadar operator, tetapi pemikul amanah publik.

## **B. Membangun Ekosistem Etika: Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat**

Dalam menghadapi kompleksitas tata kelola keuangan publik kontemporer, pendekatan yang semata-mata menekankan pembenahan teknis, penyusunan ulang standar operasional, atau pengetatan regulasi, terbukti tidak cukup untuk membentuk sistem yang benar-benar akuntabel dan berkeadilan. Banyak kegagalan akuntabilitas di sektor publik justru bukan disebabkan oleh kurangnya aturan, melainkan oleh rapuhnya integritas dan keteladanan di tingkat implementasi. Di sinilah pentingnya membangun ekosistem etika: suatu lanskap

sosial-institusional yang menumbuhkan praktik-praktik fiskal berbasis nilai, bukan hanya kepatuhan formalistik.

Konsep ekosistem etika ini menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah hasil dari keterhubungan antar aktor dalam sistem: pemerintah sebagai pemangku kebijakan, perguruan tinggi sebagai pusat pembentuk kesadaran kritis, dan masyarakat sipil sebagai pengawas sekaligus mitra dalam kontrol sosial. Ketiganya harus membentuk jaringan kolaboratif yang berlandaskan saling percaya, kesetaraan informasi, dan orientasi pada keadilan sosial. Jika salah satu komponen dilemahkan, misalnya masyarakat tidak diberdayakan, atau kampus hanya menjadi pelatih teknokrat, maka sistem akan pincang dan cenderung reproduktif terhadap ketimpangan lama.

OECD (2021) melalui kerangka *Ecosystem of Accountability* menyatakan bahwa sistem akuntabilitas publik yang berkelanjutan adalah sistem yang tumbuh dalam relasi antar institusi, bukan hanya berdiri pada perangkat internal lembaga pemeriksa. Dalam kerangka ini, pemerintah berperan bukan hanya sebagai pengatur dan penindak, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan kolaborasi. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan profesional, tetapi juga aktor reflektif yang mampu menginterogasi sistem. Masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai penerima laporan, tetapi juga sebagai *co-producer of accountability*, yakni produsen bersama informasi, tekanan moral, dan legitimasi sosial.

Sejalan dengan pendekatan ini, Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa kebebasan substantif dalam kehidupan publik hanya dapat dicapai jika warga memiliki kemampuan untuk memahami, berpartisipasi, dan memengaruhi kebijakan yang menyentuh hidup mereka. Hal ini hanya mungkin jika ekosistem politik dan kelembagaan memberikan ruang dialog terbuka dan keterlibatan bermakna. Maka akuntabilitas fiskal harus dilihat sebagai bagian dari demokrasi deliberatif, bukan sekadar birokrasi pelaporan.

Dari sudut pandang filsafat klasik, Aristoteles dalam *Politics* mengingatkan bahwa *polis* (negara) adalah tempat manusia mewujudkan *eudaimonia*—kehidupan yang baik dan bermakna. Oleh karena itu, lembaga-lembaga publik tidak hanya wajib efisien, tetapi juga adil secara moral. Negara tidak boleh membangun sistem fiskal yang tertutup dan elitis, karena keadilan hanya dapat ditegakkan melalui partisipasi aktif warga dan pengetahuan bersama atas apa yang diperbuat negara dengan dana kolektif.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekosistem etika ini juga harus menyentuh akar budaya dan sistem nilai lokal. Konsep *musyawarah*, *gotong royong*, *tepo seliro*, dan *ngayomi* adalah prinsip-prinsip yang relevan untuk membentuk arsitektur kolaboratif antara pemerintah, kampus, dan masyarakat. Nilai-nilai ini bisa menjadi pelengkap dan bahkan pengimbang terhadap arus teknokrasi yang sering kali mengabaikan relasi sosial.

Sinergi antara akademisi dan pemerintah juga tidak bisa dibangun dalam relasi satu arah. Kampus tidak boleh sekadar menjadi subkontraktor riset atau pelatih auditor negara. Sebaliknya, mereka harus dilibatkan dalam perumusan nilai, kritik konstruktif atas instrumen pelaporan, dan pengembangan kurikulum bersama. Sinergi antarlembaga seperti pemerintah, kampus, dan masyarakat sipil merupakan prasyarat munculnya tata kelola fiskal yang etis dan partisipatif, sebagaimana tercermin dalam berbagai studi tentang governance kolaboratif.

Lebih jauh, sinergi ini juga menuntut pembentukan *ruang Bersama*, baik fisik maupun digital, yang memungkinkan diskusi lintas batas, pembelajaran kolaboratif, dan refleksi etik antar pihak. Forum warga kampus-desa, audit sosial terbuka, kelas kolaboratif dosen-auditor, serta kanal pelaporan publik yang terintegrasi, semuanya adalah bentuk dari ekosistem etika yang konkret.

Dengan demikian, membangun ekosistem etika bukan sekadar agenda normatif, tetapi syarat struktural bagi keberlangsungan akuntabilitas publik yang berpihak. Di tengah

fragmentasi kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan meningkatnya politisasi laporan keuangan, ekosistem ini menjadi jangkar moral yang tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan, kesetaraan, dan harapan baru terhadap demokrasi fiskal di Indonesia.

### **Sinergi Strategis: Pemerintah, Kampus, dan Masyarakat**

Salah satu terobosan penting dalam memperkuat etika publik adalah membangun peta kerja sama yang fungsional dan berkesinambungan antara:

1. Perguruan Tinggi – Sebagai pusat pengembangan kurikulum etika fiskal, riset kebijakan, dan pelatihan kader profesional yang etis.
2. BPK dan BPKP – Sebagai lembaga pengawasan utama yang dapat menyediakan data audit, kebutuhan pelatihan, dan kanal bagi pengawasan partisipatif.
3. Inspektorat Daerah – Sebagai aktor pengawasan internal yang dekat dengan praktik dan rentan terhadap dilema struktural.
4. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) – Termasuk LSM akuntabilitas, kelompok pemuda desa, dan forum warga yang aktif dalam transparansi anggaran.

Kemitraan ini bukan hal baru secara normatif, namun praktiknya masih sangat terbatas. Berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka partisipasi fiskal secara formal, kapasitas aktor lokal dan koordinasi lintas sektor masih belum optimal. Oleh karena itu, transformasi ini membutuhkan kerja sama lintas institusi yang bersifat horizontal, bukan hierarkis.

### **Model Sinergi: Audit Berbasis Warga dan Kelas Kolaboratif**

Beberapa inisiatif eksperimental telah menunjukkan bahwa ketika mahasiswa, dosen, dan warga dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan anggaran, hasilnya bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan sosial dan kepemilikan bersama atas sumber daya publik.

### **1. Audit Sosial Mahasiswa di Desa**

Di Kabupaten Sleman, sejak tahun 2020, UGM bekerja sama dengan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan *Social Accountability Internship Program*. Mahasiswa akuntansi dan kebijakan publik diterjunkan ke desa-desa untuk mendampingi pelaporan keuangan dana desa. Mereka tidak hanya membantu teknis pelaporan, tetapi juga memfasilitasi forum warga untuk memahami isi laporan.

Dampaknya signifikan: menurut laporan internal UGM (2022), sebanyak 70% warga yang terlibat dalam forum menyatakan baru pertama kali mengetahui isi laporan keuangan desa, dan lebih dari 50% merasa memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis.

### **2. Kelas Kolaboratif Dosen-BPKP di Kampus**

Universitas Airlangga dan Universitas Andalas telah memulai kelas kolaboratif yang menghadirkan auditor BPKP sebagai *co-lecturer* dalam mata kuliah Audit Sektor Publik. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa melihat secara langsung dinamika lapangan: konflik kepentingan, dilema etis, dan strategi mitigasi penyimpangan.

BPKP dalam Rencana Strategis 2020–2024 telah menyebutkan penguatan *pengawasan kolaboratif* sebagai bagian dari transformasi kelembagaan (BPKP, 2020). Keterlibatan dalam kelas seperti ini bukan hanya memberi pengayaan materi, tetapi membentuk jejaring profesional antara kampus dan auditor negara.

### **3. Pendidikan Fiskal Partisipatif di Komunitas Desa**

Yayasan Pattiro dan Seknas FITRA telah menjalankan berbagai inisiatif seperti *Sekolah Anggaran Desa* sejak 2017, melibatkan akademisi dari IPB, UI, dan UIN Jakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga terhadap siklus anggaran desa dan membekali mereka dengan kemampuan membaca serta mengevaluasi laporan keuangan. Mahasiswa kerap dilibatkan sebagai fasilitator, pendamping monitoring, dan pengumpul data.

Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk memperkuat literasi fiskal dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan anggaran. Keterlibatan kampus sebagai jembatan pengetahuan berperan dalam menciptakan ruang akuntabilitas horizontal yang lebih bermakna di tingkat desa.

### **Analisis Kritis: Keberhasilan dan Tantangan Kolaborasi**

Keberhasilan model-model di atas memberi gambaran bahwa sinergi antara kampus dan lembaga publik bukanlah utopia. Namun terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu dikritisi dan diantisipasi secara strategis:

#### **1. Fragmentasi Institusional dan Ego sektoral**

Salah satu kendala utama dalam membangun kolaborasi lintas aktor adalah rendahnya koordinasi dan kecenderungan sektoralistik. Dosen cenderung fokus pada beban akademik; auditor pada target pemeriksaan; dan LSM pada agenda donor. Tanpa adanya kerangka kerja jangka panjang, kerja sama cenderung sporadis dan personal.

#### **2. Ketimpangan Kapasitas dan Bahasa**

Kampus sering berbicara dalam bahasa akademik yang sulit diakses masyarakat, sementara warga berbicara berdasarkan pengalaman. Diperlukan *peran mediasi* dalam bentuk *civic translators*, mahasiswa dan dosen yang mampu menerjemahkan angka menjadi narasi yang komunikatif, serta menjembatani kerangka berpikir antara negara dan rakyat.

#### **3. Kelemahan Institusionalisasi Program**

Banyak program sinergi berhenti karena tidak terintegrasi dalam kurikulum atau tidak masuk dalam indikator kinerja lembaga. Inisiatif mahasiswa bersifat sukarela dan tidak mendapatkan pengakuan SKS atau pembimbingan yang layak.

Oleh karena itu, diperlukan *kerangka desain kurikulum kolaboratif* yang memungkinkan pengabdian masyarakat berbasis audit sosial atau penyuluhan fiskal sebagai bagian resmi dari program pendidikan tinggi akuntansi publik.



**Gambar 5.1** Alur Sinergi Ekosistem Etika Publik

Gambar “Alur Sinergi Ekosistem Etika Publik” menggambarkan lima tahap kolaboratif yang membentuk fondasi ekosistem etika dalam tata kelola keuangan publik. Proses dimulai dari pemetaan kepentingan para aktor: kampus berkontribusi melalui riset dan desain kurikulum, BPK/BPKP menyediakan data serta pelatihan praktik, inspektorat daerah menyampaikan kebutuhan nyata dari lapangan, dan masyarakat sipil hadir melalui literasi serta penguatan partisipasi warga.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dilakukan penyesuaian kurikulum kolaboratif. Di tahap ini, audit sosial diintegrasikan ke dalam SKS praktik akuntansi, dosen dan auditor menjadi pengajar bersama melalui metode team teaching, dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian berbasis data anggaran riil. Selanjutnya, program dilaksanakan dengan menurunkan mahasiswa ke desa-desa bersama LSM dan inspektorat untuk melaksanakan audit sosial dan pelatihan fiskal warga, yang hasilnya kemudian dibahas dalam forum warga dan forum kampus. Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi dan umpan balik secara partisipatif; laporan mahasiswa menjadi bagian dari refleksi akademik, kampus dan inspektorat menyusun perbaikan kebijakan teknis, serta warga memberikan masukan atas mekanisme pelaporan. Langkah terakhir adalah institusionalisasi dan publikasi, di mana hasil kolaborasi dijadikan materi kuliah dan jurnal ilmiah, program dimasukkan ke dalam kurikulum tetap, dan rekomendasi kebijakan disampaikan ke pemerintah daerah atau pusat. Alur ini menunjukkan bahwa etika publik hanya dapat bertumbuh jika dibangun melalui kerja sama lintas lembaga yang terus-menerus, terstruktur, dan berdampak nyata.

### **Penutup Reflektif**

Sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil bukan sekadar proyek kebijakan, tetapi sebuah panggilan etis untuk membangun keuangan negara yang bermartabat. Ketika mahasiswa belajar bersama warga, ketika dosen menjadi fasilitator transparansi, dan ketika lembaga negara membuka diri terhadap kritik kolaboratif, di situlah akuntansi menemukan kembali jati dirinya sebagai tindakan publik yang berpihak.

Sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen (1999), keadilan tidak hanya diukur dari desain sistem, tetapi dari kemampuan nyata orang untuk berpartisipasi dalam menentukan hidup mereka. Sinergi dalam ekosistem etika fiskal harus menjadi arena pembentukan kapabilitas tersebut,

kapabilitas untuk memahami, untuk terlibat, dan untuk mengubah.

### C. Etika Lintas Generasi: Pendidikan untuk Keuangan Negara yang Berkelanjutan

"Yang tidak kita tanam hari ini, akan ditagih oleh anak-anak esok." Ungkapan ini mencerminkan esensi dari etika lintas generasi: bahwa keputusan fiskal hari ini tidak semata berdampak pada saat ini, melainkan menorehkan konsekuensi yang panjang, dalam, dan terkadang tak terbalikkan terhadap generasi mendatang. Dalam wacana etika publik, tanggung jawab sering dipahami secara horizontal, ditujukan kepada lembaga pengawas, atasan birokrasi, atau masyarakat sebagai pemilik kedaulatan fiskal. Namun di era krisis ekologis, ketimpangan global, dan akumulasi utang negara, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dimensi tanggung jawab vertikal: tanggung jawab kepada generasi yang belum lahir, kepada masa depan yang belum berbicara.

Jonas (1984) merumuskan prinsip moral baru dalam era teknologi dan kekuasaan sistemik. Ia menyatakan bahwa kekuatan manusia modern dalam memengaruhi dunia telah berkembang jauh melampaui kapasitas moral konvensional yang hanya berfokus pada akibat langsung dan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan prinsip etika baru: "*Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life.*" Dalam konteks kebijakan fiskal, hal ini berarti bahwa anggaran negara, utang publik, subsidi sumber daya, dan alokasi pendidikan bukan sekadar instrumen anggaran tahunan, melainkan ekspresi keberpihakan kita kepada kelangsungan hidup anak-cucu bangsa.

Dalam filsafat klasik, gagasan tanggung jawab terhadap masa depan juga dapat ditemukan. Aristoteles (2009) menyebut bahwa kebaikan sejati (*eudaimonia*) melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan *phronesis*, kebijaksanaan praktis yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan sesaat, tetapi juga konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks

negara, *phronesis* menuntut agar setiap kebijakan publik mengutamakan kemaslahatan kolektif yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa etika lintas generasi bukanlah gagasan baru, melainkan bagian dari warisan moral peradaban yang terus relevan.

Konsep serupa juga terdapat dalam ajaran Islam klasik, seperti dalam karya Al-Ghazali yang menekankan pentingnya *masalah mursalah*, kebaikan umum yang bersifat jangka panjang dan tidak terikat kepentingan golongan atau periode tertentu. Ia menyebut bahwa “amal yang tidak bermanfaat bagi umat di masa depan, walau tampak baik hari ini, dapat berubah menjadi fitnah kelak” (*Ihya' Ulum al-Din*, 2004). Dalam pengelolaan keuangan negara, ini bermakna bahwa praktik defisit yang tidak produktif, penghapusan subsidi yang mengorbankan kelompok rentan, atau kegagalan mengalokasikan dana untuk pendidikan dan lingkungan akan menjadi warisan negatif yang diwariskan kepada anak-anak bangsa.

Di dunia modern, etika lintas generasi mendapat landasan kuat dari kerangka sustainability accounting dan green fiscal policy. Laporan *Fiscal Monitor* IMF (2023) menyoroti pentingnya mengukur beban utang jangka panjang dengan mempertimbangkan proyeksi demografi dan dampak lingkungan. Begitu pula OECD (2023) dalam *Long-Term Fiscal Sustainability Framework* menegaskan bahwa reformasi anggaran harus memperhitungkan keberlangsungan sistem pensiun, perubahan iklim, serta hak generasi mendatang untuk hidup dalam masyarakat yang adil secara fiskal.

Namun, tantangan besar muncul ketika akuntansi publik tetap terkungkung dalam paradigma jangka pendek. Audit difokuskan pada satu tahun anggaran, indikator keberhasilan diukur dari serapan atau defisit tahunan, dan pendidikan akuntansi hanya menekankan kepatuhan teknis. Padahal, kebijakan fiskal bersifat intertemporal, ia menunda akibat, menyimpan biaya, dan kadang memindahkan risiko ke generasi berikutnya. Ketika negara menghapus subsidi bahan bakar tanpa membangun sistem transportasi publik berkelanjutan,

maka generasi muda yang akan menanggung polusi dan ketimpangan akses. Ketika pendidikan dan riset tidak mendapat alokasi memadai, maka masa depan inovasi nasional dikorbankan secara diam-diam.

Untuk itu, pendidikan akuntansi publik harus dirancang dengan kesadaran antargenerasi. Mahasiswa perlu dilatih untuk membaca laporan keuangan bukan hanya dari sisi "siapa yang membayar" dan "berapa yang diserap", tetapi juga "apa yang diwariskan" dan "siapa yang akan menanggung akibatnya". Mereka harus diajak mengenali hubungan antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan ekologis, antara pelaporan defisit dan keadilan intergenerasi.

Etika lintas generasi juga menuntut perubahan cara berpikir dalam lembaga publik. Anggaran pendidikan tidak boleh dilihat sebagai beban, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Belanja untuk perlindungan lingkungan tidak boleh dikategorikan sebagai pengeluaran tak langsung, tetapi sebagai modal sosial dan ekologis. Evaluasi anggaran harus mengukur sejauh mana program memberikan dampak pada kapasitas hidup generasi mendatang, bukan sekadar pencapaian indikator teknis.

Dengan memahami akuntansi sebagai instrumen moral yang menjembatani generasi, maka kita dapat memulihkan kembali dimensi spiritual dan filosofis dari praktik keuangan negara. Dalam tradisi Nusantara, konsep *warisan leluhur dan titipan anak cucu* bukanlah sekadar ekspresi budaya, tetapi filosofi tanggung jawab. "Apa yang tidak kita tanam hari ini akan ditagih oleh anak-anak esok"—bukan hanya secara ekonomi, tetapi secara etika.

### **Akuntansi Ekologis dan Keadilan Fiskal Antargenerasi**

Dalam dua dekade terakhir, pendekatan *ecological accounting* berkembang pesat untuk menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pendekatan ini menempatkan dampak ekologis sebagai bagian integral dari proses akuntansi, termasuk dalam konteks sektor publik. Standar pelaporan seperti Environmental, Social, and

Governance (ESG) Reporting mulai diadopsi oleh lembaga-lembaga publik di berbagai negara sebagai upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Di Indonesia, terdapat inisiatif awal untuk mengembangkan kerangka anggaran hijau (*green budgeting*) guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Namun, inisiatif ini belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan akuntansi publik. Padahal, generasi mahasiswa hari ini akan menjadi penentu masa depan tata kelola fiskal, mereka akan menyusun dan menilai anggaran yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekologis dan sosial.

Lebih jauh, keadilan fiskal antargenerasi mencakup isu utang publik, investasi jangka panjang, dan penyusutan sumber daya. Pemerintah yang mengabaikan transparansi pengelolaan utang atau fokus pada pengeluaran jangka pendek berisiko mewariskan beban struktural kepada generasi mendatang.

Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan *capability* yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum: bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, seharusnya berorientasi pada perluasan kapabilitas manusia dalam jangka panjang. Maka, pendidikan akuntansi publik harus tidak hanya menanamkan kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran ekologis dan tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang.

### **Pendidikan Etika untuk Masa Depan: Mencetak Penjaga Nilai, Bukan Sekadar Operator**

Transformasi pendidikan akuntansi publik harus memuat dimensi keberlanjutan sebagai bagian integral dari kurikulum. Mahasiswa tidak hanya perlu mempelajari SAP, PSAK, atau teknik audit, tetapi juga kemampuan untuk menilai *apakah laporan keuangan hari ini membangun atau menghancurkan masa depan bersama*. Hal ini mengharuskan kampus untuk mengembangkan kompetensi etik lintas waktu yang berpijak pada tiga ranah utama:

### **1. Kompetensi Evaluatif**

Kemampuan menilai laporan dan kebijakan fiskal dengan indikator keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini mencakup analisis anggaran hijau, pelacakan pengeluaran jangka panjang, serta risiko utang dan ketimpangan generasional.

### **2. Kompetensi Normatif**

Mahasiswa diajak merumuskan standar etika berdasarkan prinsip keadilan antargenerasi. Misalnya: apakah alokasi pendidikan saat ini cukup untuk menjamin akses anak-anak miskin di tahun 2040? Apakah dana pensiun dan jaminan sosial cukup dikelola untuk populasi lansia yang terus meningkat?

### **3. Kompetensi Imajinatif**

Dalam merancang masa depan yang berkeadilan, dibutuhkan kompetensi imaginative, kemampuan untuk membayangkan dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal yang diambil hari ini. Kompetensi ini memadukan literasi fiskal dengan imajinasi etis: kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi generasi mendatang dan mempertanyakan bagaimana keputusan saat ini memengaruhi hak, akses, dan keberlanjutan hidup mereka.

Beberapa universitas global telah mulai merespons kebutuhan ini dengan mengembangkan kurikulum akuntansi berkelanjutan yang mengintegrasikan isu lingkungan, demografi, dan ketimpangan sosial dalam simulasi fiskal jangka panjang. Pendekatan ini mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menyusun anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang.

Di Indonesia, sejumlah inisiatif awal mulai muncul, seperti pengembangan modul berbasis anggaran hijau dan kolaborasi kampus dengan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun audit sosial dan lingkungan. Meskipun inisiatif ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi arus utama dalam kurikulum nasional, mereka mencerminkan

arah transformasi pendidikan akuntansi publik yang lebih berpihak pada masa depan.

### **Penilaian Keberlanjutan Anggaran: Dari Akuntabilitas Menuju Amanah**

Dalam sistem demokrasi, laporan keuangan seharusnya bukan sekadar alat administratif, tetapi representasi dari *amanah fiskal* antargenerasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan indikator keberlanjutan anggaran yang menggabungkan:

1. Rasio investasi sosial terhadap konsumsi birokrasi
2. Keseimbangan fiskal jangka panjang terhadap tren pertumbuhan penduduk
3. Indeks keberlanjutan fiskal lokal (ISFL) yang memperhatikan ketahanan fiskal daerah dalam 10–20 tahun ke depan

OECD (2023) mengembangkan kerangka kerja *Long-term Fiscal Sustainability* yang merekomendasikan keterlibatan publik, proyeksi multidekade, serta transparansi atas konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal saat ini. Indonesia dapat mengadopsi kerangka ini melalui pendekatan kontekstual, dengan melibatkan mahasiswa dan akademisi sebagai bagian dari proses penilaian keberlanjutan.

### **Penutup Reflektif**

Membangun keuangan negara yang berkelanjutan adalah tanggung jawab moral dan politik, bukan sekadar tugas teknokratik. Pendidikan akuntansi publik yang tidak memikirkan keberlanjutan hanya akan menghasilkan generasi operator angka yang mewariskan utang moral dan fiskal kepada cucu-cucu bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang membangkitkan kesadaran antargenerasi akan membentuk *penjaga nilai*—mereka yang mencatat, menghitung, dan melaporkan bukan demi sekadar keteraturan, tetapi demi masa depan yang adil.

Seperti diungkapkan Jonas: "Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life." Dalam akuntansi publik, ini berarti bahwa setiap lembar

laporan keuangan adalah pernyataan moral terhadap generasi yang belum bisa berbicara, tetapi akan menanggung akibatnya.

#### **D. Menuju Akuntansi Pembebasan: Imaginasi Etis dan Rekonstruksi Sistem**

Dalam sejarah pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak pernah ada pendidikan yang sepenuhnya netral. Pendidikan selalu merupakan tindakan yang berpihak, entah pada pelanggaran kekuasaan dan status quo, atau pada emansipasi dan transformasi sosial. Pendidikan yang membungkam cenderung melatih kepatuhan tanpa pemahaman, dan mencetak profesional yang terampil tetapi tidak peduli. Sebaliknya, pendidikan yang membebaskan mendorong pertanyaan kritis, mengasah nurani, dan membentuk insan yang berpikir serta bertindak untuk perubahan. Dalam konteks pendidikan akuntansi publik, pertanyaan ini menjadi sangat mendesak: apakah sistem pendidikan kita saat ini mencetak pelapor yang patuh secara teknis, atau justru agen etis yang sadar akan perannya dalam membentuk keadilan sosial fiskal?

Disiplin akuntansi publik tidak dapat direduksi menjadi proses administratif yang netral. Ia adalah bagian dari sistem yang menentukan siapa mendapat apa, bagaimana dan kapan. Artinya, akuntansi publik merupakan alat yang sangat terkait dengan kekuasaan, politik alokasi sumber daya, dan legitimasi institusional. Setiap laporan anggaran mengandung narasi: apakah negara ini berpihak pada rakyat miskin, atau pada elit ekonomi? Apakah dana pendidikan dialokasikan secara adil, atau hanya menjadi pembenaran formal atas ketimpangan struktural?

Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan harus dilandaskan pada kesadaran kritis (*conscientização*), yakni kemampuan untuk membaca realitas sebagai struktur yang bisa diubah. Bagi Freire, pendidikan bukan hanya alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi alat untuk membebaskan pikiran dan tindakan dari ketundukan yang membungkam. Ia

menyebut pendidikan konvensional sebagai *banking model of education*, di mana guru (atau dosen) adalah pihak yang menabungkan pengetahuan ke dalam pikiran pasif murid. Model ini hanya menciptakan kepatuhan, bukan kesadaran.

Dalam konteks pendidikan akuntansi, model banking ini sangat terasa. Mahasiswa diajarkan standar akuntansi, sistem pelaporan, dan teknik audit tanpa didorong untuk bertanya: siapa yang menentukan standar itu? Untuk siapa laporan ini dibuat? Siapa yang tidak terwakili dalam angka-angka ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti dari *akuntansi pembebasan*, suatu pendekatan yang tidak memisahkan antara kompetensi teknis dan keberpihakan etis.

Gagasan tentang akuntansi sebagai tindakan moral juga berkembang dalam tradisi pedagogi kritis, seperti yang dipengaruhi oleh pemikiran Paulo Freire (1970), yang mendorong pendidikan untuk membentuk kesadaran etis dan kemampuan mempertanyakan struktur ketidakadilan yang tersembunyi di balik praktik teknokratis. Akuntansi pembebasan menuntut mahasiswa untuk mampu membaca laporan sebagai teks sosial, yang dapat menutup atau membuka ruang keadilan.

Nussbaum (2010) juga menyatakan bahwa pendidikan yang berfokus semata-mata pada keuntungan ekonomi dan efisiensi administratif akan melahirkan generasi yang dangkal secara moral. Ia mengusulkan agar pendidikan publik (termasuk akuntansi) mengintegrasikan pelatihan empati, kesadaran etis, dan kemampuan berargumentasi kritis. Dalam hal ini, pendidikan akuntansi yang membebaskan adalah pendidikan yang membentuk kepekaan terhadap penderitaan dan ketimpangan, bukan hanya kemampuan membaca saldo dan neraca.

Penting pula untuk menengok pada pemikiran lokal seperti Ki Hadjar Dewantara, yang menyebut pendidikan sebagai upaya memerdekakan jiwa. Dalam *Pendidikan* (1937), beliau menulis bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia merdeka lahir batin, bukan sekadar tenaga kerja bagi

pasar. Dalam semangat itu, akuntansi publik harus dipandang bukan hanya sebagai alat kontrol fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dan memperkuat demokrasi.

Dengan mengadopsi pendekatan akuntansi pembebasan, kampus bukan lagi sekadar “pabrik” pencetak pelaksana anggaran, tetapi menjadi ruang dialog kritis tentang keadilan fiskal. Mahasiswa tidak hanya diajak hafal peraturan, tetapi juga diajak merenungkan siapa yang tak terlihat di balik laporan. Dosen tidak hanya menguji kerapian laporan, tetapi juga menantang narasi-narasi resmi yang menutup penderitaan sosial. Auditor tidak hanya mencari kesalahan angka, tetapi menyuarakan kebenaran struktural.

Rekonstruksi sistem pendidikan akuntansi menuju pembebasan memerlukan perubahan struktur kurikulum, metode pengajaran, hingga relasi kekuasaan dalam ruang kelas. Praktik pengajaran kolaboratif, studi kasus berbasis masyarakat, audit sosial partisipatif, dan narasi fiskal reflektif adalah sebagian dari metodologi yang dapat diadopsi. Pendidikan akuntansi harus menyatukan teknik dan hati, data dan nilai, angka dan empati.

Dengan pendekatan ini, akuntansi publik menjadi medan etis, bukan sekadar domain administratif. Ia menjadi ruang untuk membela yang tak bersuara, menyusun ulang narasi negara, dan menumbuhkan warga negara yang bertanggung jawab. Inilah hakikat dari akuntansi pembebasan, membangun kesadaran, memupuk keberanian, dan mencipta sistem yang adil melalui pendidikan.

### **Menafsir “Akuntansi Pembebasan”: Sintesis Freire, Nussbaum, dan Dewantara**

Gagasan “akuntansi pembebasan” yang ditawarkan dalam bab ini bukanlah istilah retorik, tetapi suatu proyek konseptual yang bersumber dari tiga tokoh utama: Paulo Freire, Martha Nussbaum, dan Ki Hajar Dewantara.

Freire menolak model pendidikan “gaya bank” (banking model), di mana guru dianggap sebagai pemilik pengetahuan yang menyuapi peserta didik yang pasif. Dalam konteks akuntansi, model ini terefleksi dalam pengajaran yang mengedepankan hafalan standar, teknis pengisian laporan, dan latihan soal, tanpa memberi ruang bagi pertanyaan: “untuk siapa angka ini disusun?”, “apa makna keadilan fiskal?”, atau “mengapa sebagian warga tidak terwakili dalam laporan?”

Nussbaum (2010) menyebut bahwa pendidikan yang demokratis dan etis membutuhkan pelatihan imajinasi moral (*moral imagination*) dan kemampuan untuk melihat persoalan dari sudut pandang kelompok tertindas. Dalam pendidikan akuntansi, ini berarti menciptakan ruang di mana mahasiswa tidak hanya melihat dokumen fiskal, tetapi juga merasakan bagaimana anggaran atau defisit memengaruhi ibu tunggal, anak-anak marginal, atau masyarakat adat yang kehilangan tanahnya karena proyek negara.

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara melalui asas *tut wuri handayani*, *ing madya mangun karso*, dan *ing ngarso sung tulodo*, meletakkan dasar pendidikan sebagai pembebasan batin dan tindakan. Pendidikan, menurut beliau, adalah “menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.” Dalam konteks ini, akuntansi sebagai pendidikan harus menuntun mahasiswa menjadi manusia yang utuh, yang berani, jujur, dan berpihak pada keadilan sosial.

Maka, akuntansi pembebasan adalah pendidikan akuntansi publik yang memungkinkan mahasiswa untuk menyadari bahwa angka bukanlah entitas netral. Ia adalah ekspresi dari nilai, keberpihakan, dan ideologi. Dengan kesadaran ini, mahasiswa dibimbing untuk membaca laporan sebagai narasi sosial, menyusun dokumen fiskal sebagai pernyataan etika, dan menjadi bagian dari rekonstruksi sistem keuangan negara yang adil.

## **Strategi Kurikulum Kritis: Dari Banking ke Dialogis**

Untuk membangun akuntansi pembebasan, langkah pertama adalah merekonstruksi kurikulum. Kurikulum yang membebaskan harus berpijak pada prinsip-prinsip berikut:

### **1. Pendidikan sebagai dialog, bukan transmisi**

Setiap perkuliahan menjadi forum dua arah, di mana dosen dan mahasiswa menjadi subjek. Kasus nyata, dilema etika, dan dokumen publik digunakan sebagai bahan pembelajaran, bukan hanya contoh hafalan.

### **2. Kritik terhadap struktur, bukan hanya penguasaan Teknik**

Mahasiswa diajak memahami bagaimana sistem akuntansi dapat melegitimasi kekuasaan (Funnell & Cooper, 1998) atau membungkam kelompok tertentu (Neu, 2006). Tujuannya adalah membangun kepekaan terhadap dimensi ideologis dari laporan keuangan.

### **3. Evaluasi berbasis refleksi, bukan hafalan**

Tugas kuliah mencakup esai reflektif, proyek audit sosial, dan analisis etika anggaran. Mahasiswa diminta tidak hanya menghitung dengan benar, tetapi menjawab apakah yang dihitung itu adil, bermanfaat, dan bermoral.

### **4. Mengganti peran “pengawas” menjadi “pembebas”**

Dosen tidak lagi menjadi penguji hafalan, tetapi fasilitator dialog etis. Mahasiswa yang sebelumnya menjadi peserta pasif, kini dilatih menjadi aktor perubahan melalui proyek nyata di masyarakat.

Model ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk di sejumlah universitas dunia. Beberapa universitas di Global South, seperti University of Cape Town, telah mengembangkan pendekatan *critical accounting* yang mengaitkan praktik akuntansi dengan ketimpangan ekonomi dan sejarah kolonialisme. Pendekatan ini sejalan dengan literatur seperti Tinker (1985) dan Cooper (2005), yang menekankan bahwa akuntansi tidak netral, melainkan produk dari relasi kekuasaan dan sejarah institusional. Di University of Sydney, mata kuliah *Accounting and Society* mendorong mahasiswa untuk menilai implikasi etis dari setiap kebijakan fiskal dan praktik pelaporan.

## Kampus sebagai Ruang Demokrasi Fiskal

Akuntansi pembebasan tidak hanya membutuhkan kurikulum yang baru, tetapi juga ekosistem kampus yang mendukungnya. Kampus harus menjadi ruang demokrasi fiskal, tempat di mana anggaran kampus dibuka kepada mahasiswa, pelibatan warga dalam riset dikuatkan, dan pelaporan keuangan universitas disusun dengan prinsip partisipatif.

Beberapa praktik baik telah muncul di Indonesia. Universitas Indonesia melalui BEM UI pada 2022 berhasil mendorong transparansi dana kegiatan kemahasiswaan dan penyusunan *budget statement* terbuka untuk mahasiswa. Universitas Negeri Yogyakarta melalui program *Community Budget Lab* mengajak mahasiswa untuk menyusun simulasi APBD partisipatif bersama warga desa.

Namun masih banyak kampus yang belum mengakses dokumen anggaran secara terbuka. Padahal, jika mahasiswa tidak belajar berpartisipasi dalam anggaran kampus, mereka akan kesulitan membayangkan partisipasi fiskal di level negara. Kampus harus menjadi *laboratorium keadilan fiskal*, tempat nilai dan praktik bertemu dalam bentuk nyata.

## Model Perguruan Tinggi Etika Fiskal

Berikut kerangka konseptual *Model Perguruan Tinggi Etika Fiskal* yang bisa dijadikan acuan pengembangan institusi pendidikan akuntansi:

Dimensi	Deskripsi	Implementasi Praktis
Kurikulum Kritis	Mengintegrasikan etika, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap mata kuliah	Mata kuliah Audit, Pelaporan, dan Anggaran disisipkan modul etika reflektif
Keterlibatan Warga	Mahasiswa dan dosen terjun dalam proyek audit sosial dan pendidikan fiskal	Kolaborasi dengan desa dan LSM melalui program KKN-Akuntabilitas

<b>Dimensi</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Implementasi Praktis</b>
Transparansi Kampus	Anggaran kampus dibuka dan dibahas bersama mahasiswa	Forum Anggaran Mahasiswa setiap semester
Evaluasi Partisipatif	Penilaian berbasis proyek kolaboratif dan refleksi nilai	Proyek akhir berbasis narasi perubahan sosial dan audit warga
Keberpihakan Sosial	Misi kampus berpihak pada kelompok termarjinalkan	Beasiswa berbasis kebutuhan fiskal keluarga, bukan sekadar prestasi akademik

### **Penutup Reflektif**

Akuntansi pembebasan bukanlah sekadar proyek kurikuler, tetapi proyek moral. Ia mengubah cara kita melihat angka, sistem, dan pendidikan. Ia meminta keberanian untuk berpikir di luar format, merasakan di luar dokumen, dan bertindak di luar prosedur.

Dalam dunia yang dihuni oleh angka-angka, kita membutuhkan suara. Dalam dunia yang penuh prosedur, kita membutuhkan kesadaran. Dalam pendidikan akuntansi, kita tidak hanya sedang mendidik pelapor, tetapi juga sedang menyiapkan penjaga nurani republik.

### **E. Manifes Moral Akuntansi Publik: 10 Prinsip untuk Indonesia 2045**

Tahun 2045 bukanlah sekadar simbol peringatan seabad Indonesia merdeka. Ia adalah horizon sejarah yang menuntut perenungan moral atas arah bangsa, sekaligus proyeksi kritis tentang bagaimana sistem sosial, ekonomi, dan politik kita akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Visi Indonesia 2045, menjadi negara maju yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan, harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga luhur secara etik.

Dalam kerangka itu, akuntansi publik memegang peran yang sangat krusial. Ia bukan hanya alat untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara, tetapi juga medium moral yang menunjukkan bagaimana negara memperlakukan warganya: siapa yang diperhatikan, siapa yang diabaikan, dan bagaimana kekuasaan fiskal digunakan, untuk membebaskan atau menindas.

Selama ini, praktik akuntansi publik di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang, cenderung dikonstruksi sebagai ranah teknokratik: disiplin yang netral, terukur, dan tunduk pada regulasi. Undang-Undang Keuangan Negara, sistem SAP dan LKPP, serta evaluasi oleh BPK, membentuk rangkaian sistem yang rapi namun belum tentu adil. Seperti yang diingatkan oleh Sen (1999), keadilan bukan hanya soal institusi dan prosedur, tetapi kemampuan manusia untuk menjalani hidup bermartabat. Oleh karena itu, laporan keuangan publik yang sah secara formal tetapi membiarkan kesenjangan sosial tetap menganga adalah bentuk kejahatan etika yang terselubung.

Demikian pula, Ha-Joon Chang (2010) menekankan bahwa tidak ada kebijakan ekonomi yang bebas nilai. Sistem fiskal, subsidi, pajak, dan anggaran pendidikan tidak dibentuk oleh logika pasar semata, tetapi oleh nilai-nilai moral dan kepentingan ideologis yang hidup dalam masyarakat. Maka, akuntansi publik adalah medan konflik wacana dan arena pertarungan naratif. Setiap angka mencerminkan pilihan nilai, dan setiap laporan adalah konstruksi politik yang menampakkan atau menyembunyikan wajah nyata keadilan.

Dalam konteks ini, menuju Indonesia 2045 memerlukan sesuatu yang lebih fundamental dari sekadar reformasi regulasi atau digitalisasi laporan. Kita memerlukan manifesto etik: seperangkat prinsip moral yang menuntun arah pembaruan tata kelola fiskal dan pendidikan akuntansi publik di Indonesia. Prinsip-prinsip ini harus bersifat universal tetapi kontekstual, terinspirasi dari pemikiran filosofis, baik klasik maupun

kontemporer, namun tetap relevan dengan kenyataan lokal Indonesia.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Rawls (1971), suatu sistem yang adil bukan hanya ditentukan oleh hasil, tetapi oleh proses yang memungkinkan semua pihak memiliki posisi setara dalam menyusun norma dasar. Oleh karena itu, akuntansi publik yang adil adalah yang memberi ruang partisipasi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kelompok rentan. Ini juga sejalan dengan prinsip *musyawarah* dalam budaya Indonesia yang menempatkan kesepakatan sosial sebagai basis keputusan publik.

Lebih lanjut, Young (2000) mengingatkan bahwa wacana teknokratik sering kali mengecualikan suara minoritas melalui prosedur netral yang bias. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang “benar” secara prosedur tetapi gagal menyebutkan siapa yang tertinggal, perempuan miskin, anak disabilitas, petani pinggir, adalah laporan yang cacat secara etis. Maka perlu ada reorientasi: dari akurasi ke keberpihakan, dari kepatuhan ke kepedulian.

Bab ini menyajikan sepuluh prinsip normatif yang dapat menjadi fondasi baru bagi reformasi akuntansi publik Indonesia menuju 2045. Prinsip-prinsip ini disusun berdasarkan:

1. Refleksi atas praktik dan kegagalan sistem saat ini,
2. Teori etika dan keadilan dari filsuf dunia,
3. Nilai-nilai lokal dari tradisi Nusantara, dan
4. Praktik kebijakan fiskal progresif dari berbagai negara.

Manifes ini bukan perangkat teknis, tetapi kerangka moral. Ia ditujukan untuk para dosen akuntansi yang ingin mengubah cara mengajar. Untuk mahasiswa yang ingin menjadikan angka sebagai alat keberpihakan. Untuk auditor dan pejabat publik yang ingin menjadikan laporan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dan untuk masyarakat luas yang ingin menjadikan laporan keuangan negara sebagai ruang perjuangan bersama.

Dengan mengusung semangat *dari angka ke amanah*, manifesto ini menandai arah baru akuntansi publik: sebagai praktik yang memanusiakan, bukan mensterilkan; sebagai narasi pembebasan, bukan membenaran sistem. Tahun 2045 harus menjadi milik semua anak bangsa, dan itu dimulai dari prinsip yang kita pilih hari ini.

### **Manifes Moral Akuntansi Publik: Sepuluh Prinsip Etika untuk Indonesia 2045**

#### **1. Akuntansi adalah tindakan moral, bukan sekadar prosedur administratif.**

Setiap laporan keuangan adalah cerminan keputusan etis, apa yang dilaporkan, siapa yang dicatat, dan siapa yang dilupakan. Seperti dikatakan oleh Derrida (1994), “setiap arsip adalah seleksi,” dan seleksi selalu berisiko menghapus yang lemah. Maka setiap angka yang disusun harus dimaknai sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, bukan sekadar hasil pengisian formulir.

#### **2. Rakyat adalah pengguna utama laporan keuangan, bukan hanya auditor atau pejabat.**

Akuntansi publik harus dipahami dalam kerangka *citizen-oriented accounting* (Guthrie & Parker, 1990). Laporan keuangan bukan ditulis hanya untuk memenuhi kewajiban formal kepada lembaga pengawas, melainkan untuk memastikan rakyat tahu ke mana uang mereka dibelanjakan, dan bagaimana dampaknya pada kehidupan mereka.

#### **3. Pendidikan akuntansi harus membebaskan, bukan membelenggu dalam angka.**

Mengikuti Freire (1970), pendidikan akuntansi publik harus membentuk kesadaran kritis, bukan sekadar keterampilan teknis. Kurikulum harus menyertakan etika, konteks sosial, dan narasi publik dalam setiap aspek pelaporan dan pengawasan keuangan.

**4. Evaluasi harus mengukur keberpihakan sosial, bukan hanya kerapihan format.**

Sistem evaluasi keuangan publik tidak boleh hanya fokus pada kepatuhan prosedur, tetapi juga pada keadilan hasil. Indikator keberhasilan anggaran harus mencerminkan perubahan dalam hidup warga miskin, akses terhadap layanan dasar, dan pengurangan ketimpangan.

**5. Laporan keuangan harus terbuka, dapat dibaca, dan dapat dipertanyakan oleh publik.**

Prinsip ini sejalan dengan tuntutan *transparency 2.0* (OECD, 2022), yakni transparansi yang bukan hanya menyediakan data, tetapi juga memastikan data itu dapat dimengerti, ditafsirkan, dan digunakan oleh warga. Literasi fiskal publik menjadi prasyarat keuangan negara yang etis.

**6. Akuntan publik adalah penjaga nurani fiskal negara.**

Profesi akuntansi publik bukan profesi netral. Ia mengandung kekuasaan representasi atas realitas sosial. Maka setiap akuntan publik, baik sebagai auditor, dosen, birokrat, maupun konsultan, harus memegang amanah moral sebagai *guardian of fiscal ethics* (Cooper, 2015).

**7. Sistem akuntansi harus memperhitungkan generasi mendatang.**

Menyusun anggaran hari ini tanpa memikirkan dampaknya pada anak cucu adalah bentuk pengkhianatan moral. Prinsip ini sejalan dengan *long-term fiscal responsibility framework* (IMF, 2023) dan pemikiran Jonas (1984) mengenai tanggung jawab terhadap yang belum lahir.

**8. Data keuangan harus memuat suara yang tak terdengar.**

Angka tidak boleh mengaburkan keberadaan kelompok marjinal. Sistem pelaporan fiskal harus dikembangkan untuk menangkap data tentang kelompok miskin, penyandang disabilitas, komunitas adat, dan mereka yang seringkali tidak masuk dalam sistem formal.

**9. Kampus adalah ruang demokrasi fiskal dan etika publik.**

Universitas harus menjadi tempat di mana laporan keuangan kampus dibuka, dipertanyakan, dan diajarkan secara partisipatif. Pendidikan tinggi adalah arena

pembentukan etika fiskal, bukan hanya pencetak tenaga kerja.

#### **10. Keuangan negara adalah amanah, bukan milik birokrasi.**

Prinsip terakhir menegaskan bahwa APBN dan APBD bukan milik lembaga negara, melainkan milik rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Laporan keuangan bukan hanya pelaporan administratif, tetapi perwujudan dari kepercayaan publik yang diberikan melalui pajak dan suara.

#### **Penutup Reflektif**

Manifes ini bukan dokumen final. Ia adalah *living document* yang dapat diperkaya, dikritisi, dan dikembangkan sesuai konteks. Namun yang utama, ia merupakan ajakan untuk berpikir ulang tentang akuntansi sektor publik sebagai medan perjuangan moral.

Dalam dunia yang semakin terotomatisasi, di mana algoritma dan regulasi mendominasi keputusan, kita membutuhkan ruang untuk menyisipkan nilai, mengingat manusia, dan menjaga suara mereka yang lemah. Dalam dunia keuangan negara, di mana angka menjadi bahasa kekuasaan, kita membutuhkan keberanian untuk menyisipkan etika ke dalam setiap laporan.

Manifes ini dapat dijadikan pegangan oleh dosen dalam mengembangkan kurikulum, oleh mahasiswa dalam menulis refleksi, oleh auditor dalam menjalankan tugasnya, dan oleh warga dalam menuntut transparansi. Karena pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, “pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia.” Maka akuntansi publik, bila ia adalah bagian dari pendidikan bangsa, harus memanusiakan angka.

#### **Dari Angka ke Amanah: Warisan dan Tantangan**

Bagian ini ditutup dengan suatu kesadaran mendalam bahwa akuntansi sektor publik bukan sekadar aktivitas pengelolaan angka atau pelaporan administrasi. Ia adalah ruang etis yang menyimpan konsekuensi sosial, keberpihakan

kebijakan, dan warisan antargenerasi. Reorientasi besar diperlukan, dari semata-mata pengisian dokumen ke penghayatan dedikasi; dari prosedur menuju amanah; dari pelaporan kepada lembaga menjadi tanggung jawab kepada rakyat.

Laporan keuangan publik harus dipahami sebagai bentuk kontrak sosial yang penuh makna. Ia bukan hanya mencatat aliran dana, tetapi mencerminkan cara negara menghargai kepercayaan warganya. Setiap angka yang dicantumkan, setiap kebijakan anggaran yang diputuskan, adalah bagian dari amanah publik yang mengandung nilai moral. Maka, mereka yang mengelola, mengajar, dan mempelajari akuntansi publik memikul tugas yang jauh lebih besar dari sekadar akurasi dan kepatuhan, yakni menjaga nilai, memperjuangkan keterbukaan, dan menyuarakan keadilan fiskal.

Profesionalisme dalam bidang ini tidak cukup ditentukan oleh sertifikasi teknis, tetapi oleh keberanian moral untuk mempertanyakan yang mapan, membela yang dilemahkan, dan membayangkan sistem yang lebih adil. Dalam semangat itu, pendidikan akuntansi publik harus melahirkan pelayan masyarakat yang bukan hanya pandai menghitung, tetapi juga berani bersaksi. Dan pada akhirnya, dari angka yang kita susun hari ini, akan lahir masa depan keuangan negara yang bermartabat, jika profesi ini dijalankan dengan nurani, dengan cinta pada keadilan, dan dengan tekad menjaga amanah publik sepanjang zaman.

#### **F. Akuntansi sebagai Bahasa Keadilan: Menulis Ulang Narasi Fiskal**

Dalam dunia yang semakin didefinisikan oleh angka dan indikator, akuntansi memainkan peran yang jauh lebih besar dari yang sering dibayangkan. Ia bukan sekadar sistem teknis untuk mencatat transaksi atau menyusun laporan; ia adalah bentuk bahasa. Dan sebagaimana setiap bahasa, akuntansi mengandung pilihan, tentang apa yang disebut, apa yang

disembunyikan, siapa yang dimasukkan, dan siapa yang dikecualikan.

Dalam konteks keuangan negara, narasi fiskal yang tercipta melalui laporan keuangan bukan hanya menyampaikan informasi; ia membentuk persepsi publik, meringkai legitimasi kebijakan, dan menyusun citra institusi. Namun di balik format standar dan kerangka regulasi, tersembunyi pertanyaan mendasar: apakah narasi ini adil? Apakah ia mewakili semua suara dalam masyarakat, atautkah hanya memperkuat suara yang sudah dominan?

### **Akuntansi sebagai Bahasa dan Representasi**

Akuntansi publik tidak hanya berfungsi sebagai sistem informasi finansial, tetapi juga sebagai alat representasi sosial. Ia membentuk realitas melalui struktur angka dan laporan, dan dengan demikian memainkan peran epistemologis, menentukan apa yang dianggap "nyata", "sah", dan "layak diketahui" oleh publik. Di titik inilah akuntansi berfungsi sebagai bahasa, sebuah sistem simbolik yang tidak netral, melainkan mengandung kekuasaan, ideologi, dan tafsir.

Derrida (1994) menegaskan bahwa arsip bukanlah sekadar tempat penyimpanan data, melainkan struktur kekuasaan yang menentukan "apa yang dapat diingat" dan, secara implisit, "apa yang boleh dilupakan". Dalam konteks akuntansi publik, laporan keuangan berperan sebagai bentuk arsip modern yang menyusun narasi negara atas dirinya sendiri: bagaimana ia mengelola pajak, mendistribusikan anggaran, dan menyampaikan akuntabilitas. Laporan-laporan tersebut menciptakan "ingatan fiskal kolektif", namun pada saat yang sama dapat dengan mudah menghapus kenyataan sosial yang tidak masuk dalam sistem pelaporan.

Neu (2006) mengembangkan kritik ini melalui studinya tentang *accounting for public space*. Ia menunjukkan bahwa praktik akuntansi seringkali mengorganisasikan ruang publik melalui pilihan representasi: siapa yang dimasukkan ke dalam laporan, siapa yang ditulis sebagai penerima manfaat, dan siapa yang dibiarkan tetap tak terlihat. Proses ini bukanlah proses

pasif, melainkan tindakan politik yang menentukan siapa yang memiliki tempat dalam narasi keuangan negara. Maka, akuntansi adalah bentuk *wacana kekuasaan*, ia tidak hanya mencatat, tetapi juga mengkonstruksi.

Dalam perspektif Foucault (1977), kekuasaan modern bekerja bukan melalui represi terbuka, tetapi melalui sistem pengetahuan dan administrasi yang tampak netral. Akuntansi, sebagai bentuk pengetahuan administratif, memiliki kapasitas untuk membentuk subjek dan objek kebijakan: warga menjadi "target bantuan", sekolah menjadi "satuan biaya", dan desa menjadi "kode anggaran". Di sinilah letak kekuatan, dan sekaligus risiko—akuntansi sebagai bahasa: ia bisa mengaburkan kenyataan manusiawi di balik statistik.

Pemikir ekonomi dan etika seperti Sen (1999) dan Nussbaum (2010) menekankan pentingnya *representational justice*, yakni keadilan dalam bagaimana realitas sosial digambarkan. Sen menolak ukuran kesejahteraan yang hanya berbasis produk domestik bruto atau pendapatan, dan justru mengusulkan pendekatan *capabilities*: sejauh mana seseorang benar-benar memiliki kebebasan untuk menjalani hidup yang ia nilai bermakna. Dalam logika ini, laporan keuangan yang hanya mencerminkan efisiensi belanja tanpa menyinggung akses, keberagaman, atau dampak nyata bagi kelompok rentan adalah laporan yang gagal secara etis.

Filsuf kontemporer Iris Marion Young (2000) juga relevan untuk dikutip dalam konteks ini. Ia menyebut bahwa ketidakadilan struktural muncul ketika institusi, termasuk bahasa dan sistem administrative, tidak mampu menampung pluralitas suara dalam masyarakat. Laporan keuangan yang menormalkan angka-angka aglomeratif tanpa membuka ruang pertanyaan tentang *siapa yang tidak tercakup, siapa yang tertinggal, dan siapa yang tidak diwakili* adalah bentuk pengecualian simbolik yang perlu disadari dan dilawan.

Bahasa akuntansi, jika hanya ditentukan oleh logika regulasi dan kepatuhan administratif, akan cenderung homogen, eksklusif, dan tidak komunikatif. Ia berisiko

membungkam suara minoritas, mengabaikan pinggir, dan membenarkan ketimpangan dalam istilah “kepatuhan” atau “efisiensi”. Sebaliknya, jika akuntansi disusun dengan kesadaran etis, empati sosial, dan keberpihakan terhadap yang termarginalkan, maka ia dapat menjadi alat perjuangan moral yang kuat. Ia dapat menjadi *bahasa keadilan* yang merepresentasikan secara jujur dan utuh realitas sosial, termasuk luka-lukanya.

Oleh karena itu, membangun kesadaran tentang akuntansi sebagai bahasa adalah bagian penting dari reformasi pendidikan akuntansi publik. Mahasiswa dan praktisi harus didorong untuk bertanya tidak hanya “apakah laporan ini benar secara teknis?”, tetapi juga “apa yang tidak dikatakan oleh laporan ini?”, “siapa yang tidak tertulis?”, dan “apa dampaknya bagi yang tak bersuara?”. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah titik masuk menuju akuntansi yang lebih manusiawi, akuntansi yang menyadari bahwa angka bukan hanya data, tetapi juga cerita; bukan hanya hasil, tetapi juga harapan.

### **Mengapa Kita Perlu Menulis Ulang Narasi Fiskal?**

Laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, selama ini telah terstruktur dalam format administratif yang kaku: status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), capaian serapan anggaran, saldo anggaran lebih (SAL), serta efisiensi dan efektivitas belanja. Metrik-metrik tersebut dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan akuntabilitas fiskal dari sudut pandang birokratis. Namun, ketika akuntansi publik berhenti pada wilayah formalistik ini, muncul risiko besar: hilangnya makna sosial.

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik. Anggaran pendidikan dapat meningkat dari tahun ke tahun, tetapi sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru dan fasilitas. Belanja kesehatan mengalami kenaikan, tetapi distribusi layanan tetap timpang, bahkan di dalam satu provinsi. Pemerintah memperoleh opini WTP berturut-turut, tetapi desa-desa tetap tak memiliki akses sanitasi atau listrik. Maka yang perlu

diajukan bukan hanya pertanyaan "berapa yang dibelanjakan?", tetapi juga "apa hasil yang dirasakan warga?", "siapa yang belum tersentuh?", dan "bagaimana laporan ini merepresentasikan kenyataan sosial secara etis?"

Nussbaum (2011), dalam kerangka *capability approach*, menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak dapat diukur hanya dengan output statistik, melainkan dari kapabilitas riil yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai bermakna. Dengan kata lain, akuntansi publik harus beralih dari sekadar perhitungan input dan output menuju pengukuran kemampuan warga dalam mengakses hak-hak dasarnya: pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, dan rasa aman.

Pendekatan ini menekankan pentingnya dimensi etika dalam pelaporan fiskal. Laporan keuangan yang menyebutkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebesar 5% PDB tetapi tidak mencerminkan distribusi geografis atau dampaknya pada kelompok miskin dan difabel, adalah laporan yang cacat secara normatif. Ia mungkin sah dalam logika administratif, tetapi gagal dalam menyuarakan keadilan substantif.

Narasi fiskal yang selama ini dominan bersifat teknokratik, disusun untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas formal terhadap entitas pemeriksa, bukan terhadap publik sebagai pemilik anggaran. Padahal, demokrasi deliberatif mensyaratkan agar informasi fiskal dapat diakses, dipahami, dan dipertanyakan secara luas oleh warga. Laporan yang hanya dapat dibaca oleh auditor dan teknokrat, tetapi tidak dapat dimengerti masyarakat umum, telah gagal memenuhi prinsip keadilan prosedural. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Rawls (1971), yang menyatakan bahwa keadilan sosial mewajibkan agar institusi dasar masyarakat, termasuk sistem fiskal, dirancang untuk memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung.

Kita memerlukan narasi fiskal baru yang tidak hanya menghitung rupiah demi rupiah, tetapi juga memperhitungkan nilai dan dampak. Narasi yang tidak berhenti pada logika

pelaksanaan anggaran, tetapi sampai pada penciptaan keadilan sosial. Narasi yang menyatakan bukan hanya apa yang dilakukan negara, tetapi juga siapa yang belum dijangkau dan bagaimana perasaan mereka yang tertinggal.

Dalam konteks Indonesia, narasi fiskal seperti ini sangat penting. Banyak desa menuliskan laporan Dana Desa dalam bentuk tabel pengeluaran, tanpa menyebutkan apakah kegiatan tersebut menjawab aspirasi warga marginal atau memperkuat relasi sosial di komunitas. Banyak kabupaten menyampaikan realisasi anggaran melalui dokumen statistik, tanpa menyisipkan penjelasan tentang bagaimana program itu dirasakan oleh perempuan kepala keluarga, pemuda penganggur, atau warga lansia.

Menulis ulang narasi fiskal berarti menulis ulang cara kita memahami fungsi negara. Laporan keuangan harus menjadi ruang representasi keadilan, bukan sekadar arena pembuktian ketaatan prosedur. Ia harus bersuara bagi yang diam, menulis bagi yang tidak terjangkau, dan mencerminkan keadilan sebagai cita bersama. Dan ini dimulai dari kesediaan untuk mengubah akuntansi menjadi bukan hanya sistem informasi, tetapi sistem empati.

### **Studi Naratif: Representasi dan Ketiadaan**

Mari kita bayangkan dua laporan:

1. **Laporan Desa A**, menyebut bahwa 97% anggaran infrastruktur telah terserap dan digunakan untuk membangun jembatan desa.
2. **Laporan Desa B**, menyatakan bahwa pembangunan jembatan telah menghubungkan wilayah yang selama ini terisolasi, memudahkan anak-anak ke sekolah, dan membuka akses pasar warga tani.

Dua laporan ini mungkin identik dalam angka, tetapi berbeda secara etis. Laporan kedua memiliki narasi keadilan: ia menyebut yang terdampak, menjelaskan konteks, dan memberi ruang bagi makna. Sementara laporan pertama tetap dalam kubu teknokrasi, tepat, ringkas, tetapi sunyi dari nilai.

Akuntansi publik harus belajar dari pendekatan *storytelling for public accountability*, yang saat ini berkembang di beberapa LSM dan kota transparansi dunia seperti Seoul dan Barcelona. Mereka mulai menulis ulang laporan dengan format naratif yang bisa diakses warga: bukan dengan istilah akuntansi semata, tetapi dengan kisah manusia di balik angka.

### **Strategi Menuju Narasi Keadilan dalam Akuntansi Publik**

Untuk menciptakan bahasa fiskal yang adil, ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pendidikan dan praktik akuntansi publik:

#### **1. Mengintegrasikan dimensi naratif dalam laporan keuangan**

Tidak cukup hanya dengan angka. Sertakan cerita, testimoni warga, dampak kebijakan secara sosial. Bentuk ini bisa digunakan sebagai *lampiran naratif fiskal*.

#### **2. Melibatkan warga dalam penceritaan laporan**

Audit sosial berbasis warga tidak hanya mengoreksi angka, tetapi juga memberi narasi tandingan: bagaimana mereka mengalami kebijakan fiskal.

#### **3. Melatih mahasiswa akuntansi untuk menulis refleksi etik**

Laporan tugas akhir atau proyek audit desa dapat menggabungkan laporan teknis dan refleksi moral, termasuk dampak sosial dari kebijakan.

#### **4. Mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis bahasa warga**

Portal pelaporan keuangan pemerintah sebaiknya menyertakan versi naratif, infografis, atau audio visual agar mudah diakses oleh publik umum.

#### **5. Menulis ulang format pelaporan kampus**

Anggaran universitas, yang biasanya hanya dibahas di Senat atau rektorat, dapat ditulis ulang sebagai *narasi kepercayaan* antara kampus dan mahasiswa, disajikan dalam bahasa yang komunikatif.

### **Penutup Reflektif: Akuntansi sebagai Puisi Keadilan**

Di tengah dunia yang didominasi data dan format, kita harus kembali menyadari bahwa akuntansi sejatinya adalah bahasa moral. Ia bisa seperti puisi, menyusun kata, memberi makna, menyuarakan yang terdiam. Dalam buku ini, kita telah melihat bahwa pendidikan akuntansi harus membebaskan, bahwa profesi akuntan harus berani, dan bahwa laporan keuangan harus menjadi amanah.

Bab ini adalah undangan untuk menulis ulang. Bukan hanya laporan, tetapi seluruh cara kita memahami angka dalam ruang publik. Karena dalam setiap angka, ada jejak suara. Dan dalam setiap laporan, ada kesempatan untuk menyuarakan kembali kebenaran.

### **G. Estetika dan Spiritualitas dalam Akuntansi Publik**

Dalam sejarah panjang peradaban, angka tidak pernah sekadar simbol matematika. Ia adalah bentuk ekspresi manusia atas keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan hidup. Dalam peradaban-peradaban kuno, dari Mesir hingga Jawa, dari Yunani hingga Andalusia, angka dipahami sebagai bagian dari tatanan kosmik. Akuntansi, sebagai seni menyusun angka dan nilai, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan dari dimensi estetika dan spiritualitas.

Namun dalam kerangka modern, akuntansi publik telah direduksi menjadi sistem administratif yang teknokratik, rasional, dan steril dari makna batin. Estetika laporan keuangan diukur dari keteraturan kolom, bukan keindahan keadilan. Spiritualitasnya terpinggirkan oleh logika kepatuhan. Maka yang kita butuhkan hari ini bukan hanya reformasi teknis, tetapi juga rekonstruksi nilai yang menghidupkan kembali sisi manusiawi dan transendental dari profesi ini.

### **Angka Sebagai Representasi Makna: Perspektif Tradisi**

Dalam tradisi pemikiran klasik, baik di dunia Islam, Jawa, maupun filsafat Timur, angka tidak pernah dipahami sekadar sebagai simbol kuantitatif. Ia merupakan refleksi dari keteraturan kosmik, keseimbangan moral, dan keterikatan

spiritual antara manusia, masyarakat, dan alam. Dalam konteks ini, akuntansi, sebagai sistem yang menggunakan angka untuk mencatat dan mengatur, mendapatkan makna etis dan metafisis yang jauh lebih dalam dibanding kerangka administratif modern.

Dalam filsafat Islam klasik, Al-Farabi (1992) menguraikan bahwa masyarakat yang baik (*al-madina al-fadila*) adalah masyarakat yang diatur oleh akal, hikmah, dan keutamaan moral. Tugas pencatatan dan pelaporan, baik dalam bentuk perbendaharaan, zakat, maupun distribusi kekayaan, dipahami sebagai bagian dari "hikmah amaliyah", yakni kebijaksanaan dalam bertindak yang dilandasi oleh tujuan etik. Dalam *Ara Ahl al-Madina al-Fadila*, Al-Farabi menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat ditegakkan jika segala bentuk pengelolaan kekayaan tunduk pada prinsip kebaikan bersama (*maslahah 'ammah*), bukan kepentingan elite.

Sementara itu, Al-Ghazali (2004) dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyatakan bahwa setiap catatan, tulisan, dan dokumentasi akan menjadi saksi di hari perhitungan (hisab). "Ma yalfidzu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid" (QS Qaf: 18) sering dikutipnya untuk menunjukkan bahwa segala bentuk ekspresi, termasuk yang tertulis dalam laporan, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, bagi seorang *muhasib* (akuntan dalam terminologi klasik), aktivitas menyusun laporan bukan hanya demi atasan birokrasi atau pemegang jabatan, tetapi juga sebagai bentuk kesaksian moral kepada Tuhan, masyarakat, dan dirinya sendiri. Inilah inti dari *amanah*: kepercayaan yang disertai tanggung jawab spiritual.

Dalam konteks budaya Nusantara, khususnya tradisi Jawa, pemahaman terhadap angka dan pengelolaan sumber daya juga sangat sarat dengan nilai-nilai etik dan spiritual. *Serat Wedhatama* karya Mangkunegara IV (1851) mengajarkan pentingnya keseimbangan batin (*budi*) sebagai landasan segala tindakan, termasuk dalam pengelolaan harta benda negara. Dalam ajaran *Javanisme*, angka bukanlah sekadar alat hitung, tetapi simbol harmoni. Maka, ketika seorang abdi dalem atau

bendahara kerajaan menyusun laporan hasil panen, ia melakukannya bukan hanya untuk akurasi, melainkan dalam semangat *ngabekti*, pengabdian tulus kepada masyarakat dan alam semesta.

Kata-kata kunci seperti *berkah*, *amanah*, *ikhlas*, dan *nglakoni* dalam tradisi lokal bukan sekadar istilah keagamaan atau spiritualitas personal, melainkan landasan epistemik dalam memahami tanggung jawab profesi publik. *Berkah* tidak selalu identik dengan jumlah atau volume, tetapi dengan kebermanfaatan dan kelanggengan manfaat bagi masyarakat. *Ikhlas* adalah sikap batin yang menghindari kepentingan diri dalam pengelolaan dana publik. *Nglakoni* menandakan kesungguhan menjalankan tugas sebagai bagian dari laku hidup, bukan sekadar pekerjaan kontraktual. Maka, laporan keuangan publik dalam tradisi ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga cermin batin dari penyusun dan niat kolektif lembaga.

Praktik-praktik seperti *pembukuan mushaf desa*, laporan lumbung pangan adat, hingga tradisi *rembug warga* dalam menyusun catatan kolektif telah diwariskan sejak lama di banyak komunitas adat di Indonesia. Di pesantren, praktik *kitabah ma'hadiyah* sering digunakan untuk mencatat donasi dan distribusi zakat atau infak dengan prinsip transparansi yang berbasis spiritualitas. Dalam semua tradisi ini, terdapat kesadaran kolektif bahwa setiap angka menyimpan makna etis, dan setiap laporan adalah wujud pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

Dimensi ini juga sejajar dengan gagasan dari filsuf Timur seperti Confucius, yang dalam *Analects* menekankan pentingnya *li* (ritual, keharmonisan tatanan) dalam tata kelola. Ia menyebut bahwa “governance is not merely about rules, but about virtue.” (Confucius, *Analects* 2:3). Akuntansi publik, dalam perspektif ini, tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi keutamaan moral sebagai dasar praktiknya.

Dalam kerangka modern, pemikiran ini dapat dijumpai melalui konsep *spiritual accountability*, yakni akuntabilitas yang tidak hanya diukur melalui output administratif atau kepatuhan prosedural, tetapi juga melalui kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kebenaran. Konsep ini diperkenalkan oleh McPhail (2001) dalam konteks pendidikan akuntansi etis, yang mengusulkan bahwa etika profesi harus dipulihkan dari keasingan modernitas melalui dimensi spiritual dan reflektif.

Dengan demikian, membicarakan angka sebagai representasi makna adalah upaya untuk mengembalikan roh dalam praktik akuntansi. Ia bukan hanya soal menghitung, tetapi juga soal menghayati. Ia bukan hanya dokumentasi, tetapi juga pengakuan, bahwa setiap laporan membawa konsekuensi moral, dan setiap penyusunan laporan sesungguhnya sedang menyusun jejak hidupnya sendiri dalam sejarah profesi dan masyarakat.

### **Estetika dalam Praktik Akuntansi**

Dalam wacana modern, akuntansi sering kali dipisahkan dari dunia estetika. Ia diposisikan dalam ranah objektivitas, teknis, dan kuantitatif, seolah-olah tidak memiliki hubungan dengan nilai-nilai keindahan atau kehalusan ekspresi. Namun dalam refleksi filosofis yang lebih luas, estetika bukan hanya tentang seni atau visualisasi, melainkan juga tentang keteraturan, keharmonisan, dan kemampuan menyentuh makna manusiawi melalui bentuk dan struktur. Dalam konteks ini, akuntansi sebagai kegiatan penyusunan narasi finansial juga mengandung dimensi estetis—baik secara formal maupun substantif.

Estetika dalam akuntansi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menyusun angka dan narasi keuangan secara etis, jujur, dan manusiawi. Ia bukan sekadar keindahan tipografi atau grafik laporan, tetapi keterbacaan yang ramah bagi publik, penyusunan struktur informasi yang adil dan transparan, serta penggunaan bahasa yang membangkitkan empati. Akuntansi yang estetis adalah akuntansi yang

menjunjung tinggi keterhubungan antara bentuk dan makna, antara angka dan nilai.

Deleuze dan Guattari (1994) menyatakan bahwa estetika bukanlah soal indra semata, tetapi proses penciptaan makna melalui bentuk. Dalam kerangka ini, laporan keuangan yang hanya rapi secara kolom, tetapi menyembunyikan ketimpangan sosial, adalah bentuk keindahan semu. Sebaliknya, laporan yang menyajikan ketidakseimbangan fiskal sebagai persoalan moral, yang menampilkan representasi kelompok rentan secara eksplisit, adalah bentuk estetika etis, keindahan yang lahir dari keberanian menyuarakan kebenaran.

Dalam seni arsitektur klasik, keindahan sebuah bangunan ditentukan oleh keselarasan antara fungsi, struktur, dan lingkungan. Vitruvius, arsitek Romawi kuno, dalam *De Architectura*, menyebut tiga prinsip dasar keindahan: *firmitas* (kekuatan), *utilitas* (fungsi), dan *venustas* (keindahan). Prinsip ini dapat diparalelkan dalam laporan keuangan yang baik: ia harus kuat dalam akurasi, bermanfaat dalam penyampaian informasi, dan indah dalam kejujuran etis. Laporan yang memperlihatkan keterimbangan antara belanja pusat dan daerah, antara investasi jangka pendek dan perlindungan jangka panjang, antara kepentingan kelompok mayoritas dan minoritas, adalah laporan yang indah dalam arti sesungguhnya.

Namun, pendidikan akuntansi modern nyaris tidak memberi ruang bagi dimensi estetis ini. Ia terlalu fokus pada presisi teknis: debit dan kredit harus seimbang, dokumen harus sesuai SAP, dan hasil harus sesuai output yang diharapkan. Estetika direduksi menjadi presentasi data atau warna grafik. Padahal keindahan sesungguhnya dalam akuntansi terletak pada narasi yang ia bangun: apakah laporan tersebut menyuarakan rasa keadilan? Apakah ia transparan dan jujur? Apakah ia menyentuh persoalan nyata masyarakat?

Bahasa menjadi elemen kunci dalam estetika laporan. Dalam banyak dokumen keuangan publik, kita sering membaca istilah-istilah seperti “kegagalan realisasi anggaran”, “penghematan belanja”, atau “deviasi negatif” tanpa konteks.

Padahal di balik istilah teknis itu, terdapat kegagalan kebijakan, kelambatan distribusi bantuan, atau ketidakhadiran negara dalam situasi krisis. Penggunaan bahasa yang kering dan teknokratik adalah bentuk *kekerasan epistemic*, ia menutupi kenyataan sosial dan menjauhkan publik dari laporan yang seharusnya menjadi milik mereka.

Fanon (1961) menegaskan bahwa kekuasaan sering kali bekerja melalui bahasa, dengan mengatur apa yang boleh dikatakan dan bagaimana sesuatu dikatakan. Dalam akuntansi publik, kekuasaan bekerja melalui kosakata teknis yang membungkam rasa. Laporan yang menulis “belanja hibah tidak terserap” mungkin terlihat netral, tetapi bagi warga desa, itu berarti fasilitas air bersih tak jadi dibangun. Maka diperlukan keberanian untuk memulihkan dimensi bahasa sebagai jembatan komunikasi sosial, bukan sekadar instrumen legal.

Dalam filsafat Jawa, bahasa juga dipahami sebagai cerminan budi. Ungkapan seperti *tuturan yang ndalem*, *pangucap sing becik*, dan *rasa ing batin* mencerminkan bahwa penyampaian informasi harus mengandung rasa, bukan hanya isi. Maka dalam laporan publik, penggunaan istilah yang komunikatif, naratif, dan empatik adalah bagian dari estetika etis yang menyatukan angka dan nurani.

Di sinilah pentingnya mengembangkan *poetika akuntansi publik*, yakni cara menulis laporan keuangan yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh kesadaran publik, menjelaskan ketimpangan, dan menghubungkan kebijakan dengan kehidupan nyata. Praktik ini mulai berkembang di beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti laporan *narrative budgeting* oleh kota-kota progresif di Amerika Latin dan *citizen-centric reports* di Skandinavia, yang menyampaikan laporan fiskal dalam bentuk kisah, testimoni warga, dan dialog publik.

Estetika dalam akuntansi publik adalah upaya mengembalikan dimensi manusiawi ke dalam sistem angka. Ia mengajarkan bahwa akuntabilitas bukan hanya perihal logika, tetapi juga rasa. Bahwa kebenaran tidak hanya disusun dengan standar, tetapi juga dengan kejujuran. Dan bahwa laporan

keuangan publik, sejatinya, bukan hanya soal keterbacaan oleh auditor, tetapi keterhubungan dengan nurani rakyat.

### **Spiritualitas sebagai Rasa Tanggung Jawab**

Spiritualitas dalam konteks akuntansi publik tidak dapat direduksi menjadi sekadar praktik ritual keagamaan atau ekspresi religiositas formal. Ia adalah bentuk kesadaran terdalam bahwa pekerjaan profesional, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik, membawa konsekuensi moral yang tak dapat ditanggihkan oleh sekadar kepatuhan administratif. Dalam spiritualitas, angka bukan hanya data, tetapi amanah; laporan bukan hanya dokumen, tetapi kesaksian; dan profesi bukan hanya fungsi, tetapi panggilan.

Kesadaran spiritual ini bukan mistik dalam pengertian sempit, melainkan fondasi moral yang melekat pada hakikat tanggung jawab publik. Hans Jonas (1984) dalam *The Imperative of Responsibility* memperingatkan bahwa dalam dunia modern, tindakan manusia memiliki dampak jangka panjang yang melampaui waktu hidup pelakunya. Ia mengajukan prinsip moral: "Bertindaklah sedemikian rupa agar akibat dari tindakanmu kompatibel dengan kelangsungan kehidupan manusia yang otentik." Prinsip ini sangat relevan bagi akuntan publik, karena laporan yang mereka susun dapat membentuk, atau justru merusak, masa depan masyarakat.

Spiritualitas di sini berarti hadirnya kesadaran akan keterhubungan antara pekerjaan profesional dan kehidupan manusia yang lebih luas. Ketika seorang auditor menyusun opini, ketika seorang dosen mengajar prinsip akuntansi, ketika seorang mahasiswa mencatat belanja desa, semua itu bukan semata tindakan fungsional, tetapi ekspresi tanggung jawab atas kebaikan bersama. Inilah yang disebut oleh Buber (1958) sebagai hubungan "I-Thou", yakni interaksi yang memanusikan, bukan relasi objektif "I-It" yang memandang orang lain sebagai instrumen.

Freire (1970) menjelaskan bahwa pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang dibangun atas cinta dan harapan, *pedagogi kasih*. Pendidikan yang tidak memperlakuk peserta didik

sebagai wadah hafalan, tetapi sebagai subjek yang harus dibebaskan dan dipenuhi martabatnya. Dalam konteks akuntansi publik, pendekatan ini menuntut agar pendidikan profesi tidak hanya mengajarkan akurasi laporan, tetapi juga membangkitkan empati terhadap realitas sosial yang tersembunyi di balik angka.

Pendidikan yang berlandaskan spiritualitas menekankan bahwa keahlian menghitung harus berjalan seiring dengan kepekaan nurani. Seorang mahasiswa akuntansi tidak hanya dilatih mengenali kesalahan jurnal, tetapi juga dilatih untuk bertanya: “Apakah laporan ini adil?”, “Apakah laporan ini menyuarakan kebenaran?”, “Apakah laporan ini menyembunyikan penderitaan?” Melalui refleksi seperti itu, mahasiswa tidak hanya menjadi akuntan, tetapi menjadi *penjaga nurani public*, sebuah konsep yang telah diusulkan oleh McPhail (2001) dalam studi tentang rehumanisasi pendidikan akuntansi.

Spiritualitas juga mengandung kesadaran akan keterbatasan diri. Akuntan yang spiritual tidak sekadar percaya diri karena sertifikasinya, tetapi juga rendah hati dalam menyadari bahwa angka tidak pernah bisa sepenuhnya menangkap kompleksitas manusia. Inilah yang disebut oleh Laozi dalam *Tao Te Ching* (Bab 38): “The highest virtue is not virtuous. Therefore, it possesses virtue.” Artinya, kebaikan yang sejati muncul bukan dari peraturan, tetapi dari keikhlasan batin. Seorang akuntan publik yang sadar spiritual tidak menjalankan tugas karena SOP, tetapi karena tanggung jawab moral kepada kehidupan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, nilai spiritualitas ini tidak asing. Konsep *ibadah sosial*, *amanah publik*, *niat yang lurus*, dan *laku hidup* telah lama hidup dalam khazanah etika Nusantara. Di pesantren, aktivitas mencatat wakaf, zakat, atau dana masjid tidak pernah dianggap sekadar pekerjaan teknis, tetapi bagian dari *laku amal*. Di komunitas adat, menyusun laporan hasil bumi atau kekayaan desa disertai doa dan musyawarah, bukan hanya audit. Spiritualitas dan akuntansi tidak dipertentangkan, tetapi disatukan dalam rasa tanggung jawab kolektif yang hidup.

Maka, membangun pendidikan akuntansi yang spiritual bukan berarti menambahkan mata kuliah agama, melainkan membentuk kurikulum yang menumbuhkan kepekaan, perenungan, dan refleksi etis. Mahasiswa diajak untuk merenungkan dampak sosial dari laporan keuangan, untuk menyuarakan kelompok yang tak terwakili, dan untuk menghayati pekerjaan mereka sebagai kontribusi kepada keadilan.

Spiritualitas dalam akuntansi publik adalah tentang mengetahui kapan harus mencatat dan kapan harus bertanya; kapan harus diam dengan integritas dan kapan harus bersuara dengan keberanian. Ia adalah bentuk pengabdian diam-diam yang menjadi pijakan reformasi paling dalam—karena ia tidak digerakkan oleh pujian, tetapi oleh kesadaran moral yang tak bisa ditawar.

### **Jalan Menuju Akuntansi yang Bermakna**

Untuk menghidupkan kembali dimensi estetika dan spiritual dalam akuntansi publik, berikut langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan dan lembaga negara:

#### **1. Integrasi Nilai Luhur Lokal dalam Kurikulum Akuntansi**

Falsafah Ki Hadjar Dewantara, Serat Wedhatama, prinsip Islam tentang amanah dan hisab, serta nilai-nilai adat dijadikan bagian dari modul etika akuntansi.

#### **2. Latihan Kontemplatif dalam Pendidikan**

Mahasiswa diberi ruang untuk melakukan refleksi batin sebelum menyusun laporan, misalnya melalui jurnal etis, meditasi, atau diskusi nilai.

#### **3. Bahasa Laporan yang Humanistik**

Laporan keuangan publik harus menggunakan bahasa yang terbuka, empatik, dan komunikatif, tidak hanya akurat secara hukum, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan pembacanya.

#### **4. Visualisasi Estetik dan Simbolik**

Pelaporan fiskal dapat dirancang menggunakan elemen visual yang estetik dan mudah dipahami, seperti infografis naratif, ilustrasi komunitas, atau kutipan nilai.

#### **5. Pembentukan Etos Amanah dalam Profesi**

Dosen, auditor, dan pejabat publik dibekali pelatihan nilai untuk membangun rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap rakyat dan sejarah.

#### **Penutup: Akuntansi sebagai Jalan Pulang**

Di akhir buku ini, kita sampai pada kesadaran paling esensial: bahwa akuntansi, bila dijalankan dengan penuh kesadaran dan kasih, bukan hanya menjadi pekerjaan, tetapi jalan pulang menuju keutuhan manusia. Ia adalah upaya menyusun kembali dunia yang terpecah oleh ketimpangan, menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh sistem, dan merawat harapan dalam sunyi laporan.

Jika laporan keuangan adalah suara negara, maka marilah kita pastikan ia bernyanyi tentang kebaikan, kejujuran, dan harapan. Karena dalam setiap angka, jika disusun dengan cinta, tersembunyi kemungkinan dunia yang lebih adil dan lebih bermakna.

## EPILOG - MENJAGA ETIKA DI TENGAH SISTEM

Kita hidup dalam zaman yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap indikator, tetapi sering kali melupakan satu hal paling mendasar dalam profesi publik: nurani. Di tengah laju pelaporan, akumulasi data, dan tuntutan birokrasi, pendidikan akuntansi publik berada dalam risiko besar kehilangan jiwanya. Buku ini bukan ditulis sekadar sebagai catatan teoretis, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, bahwa di balik setiap angka terdapat kehidupan, dan di balik setiap laporan terdapat amanah kepada publik yang harus dijaga dengan integritas.

Akuntansi sektor publik bukanlah ruang netral. Ia adalah medan etika. Ketika laporan keuangan hanya digunakan untuk mengejar opini WTP, sementara kesenjangan sosial dibiarkan menganga; ketika dana pendidikan dipotong demi stabilitas fiskal yang steril dari keadilan; ketika angka-angka disusun rapi tanpa mencerminkan siapa yang tak terlayani, di situlah akuntansi kehilangan makna dan menjelma menjadi alat dominasi. Dalam kondisi seperti ini, profesi ini tidak bisa lagi dijalankan secara teknokratis semata; ia menuntut keberanian moral untuk bersuara, keberanian untuk menolak menjadi bagian dari kekuasaan yang membungkam.

Hans Jonas (1984) mengajukan prinsip tanggung jawab yang menembus waktu: "Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life." Prinsip ini sangat relevan dengan praktik akuntansi publik, karena laporan keuangan bukan hanya laporan tahunan, tetapi dokumen etika yang akan dikenang atau ditagih oleh generasi mendatang. Akuntansi publik harus memikirkan dampak antargenerasi: apakah sistem fiskal yang kita bangun hari ini memberi ruang hidup yang adil bagi anak cucu kita, atau justru mewariskan beban yang tak terucapkan?

Indonesia tidak pernah kekurangan sumber nilai. Falsafah lokal seperti *tepo seliro*, *gotong royong*, *rasa malu*, dan *musyawarah* merupakan modal budaya yang sangat kaya untuk membangun etika publik. Namun nilai-nilai ini akan tetap menjadi kearifan yang

tersimpan dalam arsip jika tidak dijadikan prinsip pengajaran, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan akuntansi. Pendidikan kita harus berani memformalkan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka epistemic, bukan sekadar sebagai ornamen budaya, tetapi sebagai perangkat etika yang hidup dan kontekstual.

Iris Marion Young (2000) mengingatkan bahwa keadilan sosial tidak akan pernah hadir jika sistem demokrasi hanya menyuarakan kehendak mayoritas dominan dan menyingkirkan suara minoritas yang tidak terdengar. Dalam konteks akuntansi publik, “minoritas yang diam” ini adalah warga yang tak terbaca dalam laporan, kelompok rentan yang tak disebutkan dalam penganggaran, dan generasi masa depan yang tidak dilibatkan dalam perencanaan hari ini. Laporan keuangan yang baik bukan hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga kepekaan terhadap siapa yang tertinggal.

Epilog ini adalah manifesto terbuka. Sebuah seruan etis bagi para dosen, mahasiswa, auditor, dan pembuat kebijakan. Profesi akuntan publik tidak boleh lagi dilihat sebagai pelaksana teknis; ia adalah panggilan untuk menjaga kepercayaan publik, membangun struktur keadilan, dan menyuarakan suara yang tak terdengar. Pendidikan akuntansi harus menjadi medan pembebasan: ruang bagi mahasiswa untuk tidak hanya menghafal SAP atau PSAK, tetapi juga untuk memahami ketidakadilan sosial di balik belanja tidak langsung, dan berani berkata *cukup* ketika prosedur mulai menggantikan kebenaran.

Kita memerlukan laporan keuangan yang tidak hanya sah secara format, tetapi adil secara isi. Kita memerlukan sistem pelaporan yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mendengar. Kita memerlukan kampus yang tidak hanya mengukur capaian akademik, tetapi juga keberpihakan sosial. Dan kita memerlukan akuntan yang tahu kapan harus mencatat, dan kapan harus bertindak.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai jawaban final, tetapi sebagai titik awal percakapan baru tentang profesi yang lebih etis, lebih manusiawi, dan lebih berpihak. Mari kita terus menjaga nurani dalam system, bahkan ketika sistem itu sendiri tidak

memberi ruang. Karena di tengah sunyi dokumen fiskal dan diamnya kolom laporan, sesungguhnya ada kehidupan yang menunggu untuk diakui, diperjuangkan, dan dipulihkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farabi. (1992). *Ara Ahl al-Madina al-Fadila (The Virtuous City)*. Beirut: Dar al-Mashreq.
- Al-Ghazali. (1981). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din* (M. Fakhry, Ed.). Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Anthony, R. N. (1989). *Management control systems*. McGraw-Hill.
- Aristotle. (1996). *Politics* (E. Barker, Trans.). Oxford University Press.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Armstrong, M. B. (1993). Ethics and professionalism in accounting education: A sample course. *Journal of Accounting Education*, 11(1), 77-92.
- As'ad, Mahrussad (2012). *Agama dan keadaban publik*. Millah, 11(2).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*. Diakses melalui <https://www.bpk.go.id>.
- Baudrillard, J. (1981). *Simulacra and simulation*. Semiotext(e).
- Bloom, A. (1991). *The Republic of Plato*. Basic Books.
- Bobbio, N. (1990). *L'età dei diritti (The Age of Rights)*. Torino: Einaudi.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Boyce, Gordon (2004). *Critical accounting education: teaching and learning outside the circle*, *Critical Perspectives on Accounting*, 15(4), 565-586.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. *Journal of Higher Education*, 67(2), 221-239.

- Broadbent, J., & Guthrie, J. (1992). Changes in the public sector: A review of recent "alternative" accounting research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 5(2), 3-31.
- Buber, M. (1958). *I and Thou*. New York: Scribner.
- Chang, H.-J. (2010). *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*. London: Bloomsbury.
- Confucius. (1861). *The Analects of Confucius* (J. Legge, Trans.). Oxford: Clarendon Press.
- Cooper, C. (2005). Accounting for the public interest: Public policy, corporate accountability and the quest for social justice.
- Cooper, D. J., & Hopper, T. M. (2007). Critical theorizing in accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(6), 805-816.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1994). *What Is Philosophy?* New York: Columbia University Press.
- Derrida, J. (1994). *Archive Fever: A Freudian Impression*. Chicago: University of Chicago Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123.
- Fanon, F. (1961). *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Fraser, N. (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a 'post-socialist' age. *New Left Review*, 212, 68-93.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Jonas, H. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press.
- Laozi. (2006). *Tao Te Ching* (D. C. Lau, Trans.). London: Penguin Classics.
- Mangkunegara IV. (1851). *Serat Wedhatama*. Surakarta.
- McPhail, K. (2001). The other objective of ethics education: Rehumanising the accounting profession. *Journal of Business Ethics*, 34(3–4), 279–298.
- Nataatmadja, N. (2010). *Etika dan Estetika dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nataatmadja, N. (2012). *Etika dan Laku Hidup dalam Tradisi Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Neu, D. (2006). Accounting for public space. *Accounting, Organizations and Society*, 31(3), 391–414.
- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton: Princeton University Press.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Harvard University Press.
- OECD. (2018). *The Future of Education and Skills 2030*. Paris: OECD Publishing
- OECD. (2021). *Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery: Accountability Ecosystems Framework*. Paris: OECD Publishing.
- Plato. (1991). *The Republic* (A. Bloom, Trans.). Basic Books.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

- Tinker, A. M. (1985). *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*.
- UCLG (United Cities and Local Governments). (2020). *Narrative Accountability: Rethinking Local Governance through Storytelling*. Barcelona: UCLG.
- Vitruvius. (1960). *The Ten Books on Architecture* (M. H. Morgan, Trans.). New York: Dover Publications.
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.

**LAMPIRAN**  
**REFLEKTIF ETIKA & PEDAGOGIS**

**1. Matriks Kompetensi Teknis vs Moral dalam Pendidikan Akuntansi Publik**

<b>Domain Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Teknis (Hard Skill)</b>	<b>Kompetensi Moral &amp; Reflektif (Soft Skill / Value-Based)</b>
Penyusunan Laporan Keuangan	Menguasai SAP/PSAK akrual, software pelaporan	Mampu menilai dampak sosial dari laporan, bertanya: <i>untuk siapa angka ini dibuat?</i>
Audit dan Pemeriksaan	Menyusun kertas kerja audit sesuai prosedur	Berani mempertanyakan penyimpangan walau tersembunyi secara administratif
Analisis Anggaran Publik	Menyusun APBD berbasis data	Menilai apakah alokasi berpihak pada kelompok marjinal, miskin, dan tidak bersuara
Kepatuhan Regulasi	Mengetahui UU Keuangan Negara, SOP pelaporan	Tidak menyembunyikan kesalahan demi "kepatuhan simbolik"
Pendidikan dan Pengajaran	Menyampaikan materi IFRS, standar, dan soal ujian	Menanamkan etika profesi, tanggung jawab publik, dan <i>reasoned judgment</i> mahasiswa
Tanggung Jawab Sosial Profesi	Mengikuti kode etik profesi	Merespons dilema sosial sebagai <i>public servant</i> , bukan sekadar teknokrat

## 2. Rancangan Mini-Kurikulum Etika Akuntansi Publik

**Nama Program** : *Etika dan Keadilan dalam Akuntansi Publik*

**Durasi** : 1 semester (16 sesi)

**Skema** : Campuran kuliah, diskusi, studi kasus, dan proyek reflektif

Sesi	Topik	Metode	Kompetensi Etis
1	Mengapa Etika dalam Akuntansi?	Kuliah interaktif	Kesadaran kritis terhadap dampak sosial akuntansi
2-3	Filsafat Moral (Kant, Aristoteles, Confucius, Sen)	Bacaan dan debat	Mengaitkan prinsip moral dengan praktik fiskal
4-5	Studi Kasus Fiktif dan Dilema Moral Akuntansi	Diskusi kelompok	Kemampuan mengambil keputusan etis di bawah tekanan
6-7	Teori Keadilan dan Anggaran Publik (Rawls, Nussbaum)	Simulasi perencanaan anggaran	Empati fiskal dan keberpihakan sosial
8-9	Akuntansi dan Kekuasaan (Foucault, Habermas)	Analisis naratif laporan keuangan	Kesadaran institusional dan pengaruh struktur dominan
10-11	Etika Profesi dan Whistleblowing	Role-play dan studi yurisprudensi	Keberanian moral dan akuntabilitas pribadi
12-13	Audit Sosial dan Anggaran Partisipatif	Proyek lapangan/ simulasi	Keterlibatan publik dan akuntansi sebagai aksi demokratis
14-15	Refleksi Etika Personal Mahasiswa	Esai dan forum refleksi	Internalisasi nilai dan suara nurani profesional

Sesi	Topik	Metode	Kompetensi Etis
16	Ujian Reflektif: Kasus Terbuka dan Rekomendasi	Penulisan dan presentasi	Integrasi teori, etika, dan konteks praktik nyata

### 3. Roadmap Naratif: Reformasi Etika dan Pendidikan Akuntansi Publik Indonesia

*Tahap 1: Kesadaran Akademik (Tahun 2025–2028)*

- a. Integrasi etika ke dalam setiap mata kuliah akuntansi (bukan mata kuliah tersendiri saja).
- b. Revisi kurikulum akuntansi publik berbasis filsafat keadilan fiskal.
- c. Penguatan kapasitas dosen sebagai *pendidik nilai*, bukan hanya pengajar teknis.

*Tahap 2: Pembelajaran Transformatif (2028–2035)*

- a. Pembelajaran berbasis kasus nyata, kolaborasi dengan BPK/BPKP.
- b. Praktikum mahasiswa dalam anggaran desa dan audit sosial partisipatif.
- c. Evaluasi berbasis esai reflektif, bukan hafalan format.

*Tahap 3: Ekosistem Etika Nasional (2035–2045)*

- a. Institusionalisasi pendidikan antikorupsi dalam program sarjana akuntansi.
- b. Pelibatan masyarakat sipil dalam evaluasi kinerja keuangan publik.
- c. Lahirnya generasi *akuntan publik-bijak* (*phronimos*), yang mampu berpihak kepada keadilan tanpa kehilangan kompetensi teknis.

**4. Daftar Kutipan Filosofis dan Penggunaan Kontekstualnya dalam Akuntansi Publik**

<b>Tokoh</b>	<b>Kutipan Kunci</b>	<b>Aplikasi dalam Akuntansi Publik</b>
<b>Aristoteles</b>	<i>"Phronesis adalah kebijaksanaan bertindak dalam situasi konkret."</i>	Membantu auditor memilih keputusan etis saat prosedur dan keadilan tidak selaras
<b>Immanuel Kant</b>	<i>"Perlakukan manusia sebagai tujuan, bukan alat."</i>	Akuntan tidak boleh mengorbankan warga demi efisiensi dokumen
<b>Freire</b>	<i>"Pendidikan sejati adalah pembebasan, bukan penindasan."</i>	Pendidikan akuntansi harus memerdekakan mahasiswa dari dogma teknokrasi
<b>Sen</b>	<i>"Keadilan bukan hanya hasil, tetapi tentang proses yang adil."</i>	Pelaporan keuangan harus transparan dan partisipatif, bukan hanya hasil anggaran
<b>Rawls</b>	<i>"Ketidakadilan hanya bisa dibenarkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung."</i>	Evaluasi alokasi anggaran: adakah keberpihakan fiskal terhadap kelompok miskin?
<b>Confucius</b>	<i>"Jika pemimpin bermoral, rakyat akan mengikuti."</i>	Dosen akuntansi harus menjadi teladan integritas, bukan penghafal aturan
<b>Ki Hajar Dewantara</b>	<i>"Tut wuri handayani."</i>	Mahasiswa dibimbing untuk menjadi agen perubahan etis, bukan sekadar teknisi angka
<b>Foucault</b>	<i>"Di mana ada sistem, di situ ada kekuasaan."</i>	Laporan keuangan bisa menjadi alat kekuasaan, maka harus disertai kesadaran institusional kritis

### **Penutup Lampiran**

Lampiran ini bertujuan melengkapi pembahasan utama dengan dimensi praktis-pedagogis. Ia menghubungkan nilai, teori, dan tindakan nyata yang dapat diterapkan oleh dosen, mahasiswa, hingga perancang kebijakan.

Seri Buku Selanjutnya:

<b>Volume</b>	<b>Judul</b>	<b>Fokus Utama</b>
II	<i>Etika dan Akuntabilitas: Membentuk Karakter Profesional Publik</i>	Etika akuntansi, moralitas, anti-korupsi
III	<i>Menciptakan Transparansi: Inovasi Teknologi dalam Akuntansi Sektor Publik</i>	E-government, digitalisasi, big data
IV	<i>Dari Kampus ke Kantor: Pendidikan Terapan dan Profesionalisme ASN Akuntansi</i>	Link & match pendidikan-praktik
V	<i>Riset dan Reformasi: Peran Akademisi dalam Mendorong Akuntansi Publik yang Lebih Baik</i>	Peran universitas dan riset kebijakan
VI	<i>Akuntansi Lokal, Akuntansi Global: Menyambut Tantangan Era Internasionalisasi</i>	Harmonisasi standar, SDGs, dan akuntansi global

## TENTANG PENULIS

**Khairudin** adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang akuntansi dan keuangan yang telah aktif menulis dan mempublikasikan berbagai karya ilmiah sejak lebih dari satu dekade terakhir. Fokus utama penelitiannya meliputi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, kinerja perusahaan, serta isu-isu seputar transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa artikelnya yang paling sering disitasi membahas analisis prediksi kebangkrutan, pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham, dan dampak merger serta akuisisi terhadap kinerja saham perusahaan di Indonesia.

Khairudin merupakan kontributor aktif pada berbagai jurnal nasional dan internasional dan juga turut serta dalam berbagai seminar ilmiah, baik sebagai penulis maupun pemateri.

Dengan minat yang luas dalam pengembangan tata kelola keuangan sektor publik dan swasta, Khairudin telah menghasilkan puluhan publikasi ilmiah dan menjadi salah satu peneliti yang cukup berpengaruh dalam bidangnya di lingkungan akademik Indonesia.

**Yanuaris Yanu Dharmawan** adalah akademisi lintas bidang yang menaruh perhatian besar pada hubungan antara bahasa, teknologi, dan pendidikan etis. Sebagai dosen dan peneliti, ia aktif mengkaji dinamika pendidikan tinggi, literasi kritis, linguistik terapan, serta inovasi pedagogi digital dalam konteks Indonesia. Karya-karyanya menjangkau berbagai isu berpijak pada gagasan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan dan memberdayakan, bukan sekadar mendisiplinkan.

Dharmawan memperlihatkan keberpihakan pada pendidikan akuntansi yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga reflektif, transformatif, dan bernilai kemanusiaan. Ia membawa perspektif bahasa sebagai jembatan makna dalam dunia angka, serta mendukung integrasi nilai-nilai etika, kebudayaan, dan keadilan sosial dalam pengembangan kurikulum akuntansi publik. Ia percaya bahwa literasi, baik linguistik maupun fiskal, adalah

kunci untuk membentuk warga negara yang tidak hanya memahami sistem, tetapi juga berani mempertanyakan dan memperbaikinya.

Dengan rekam jejak akademik yang kaya dan semangat lintas disiplin, Dharmawan menjadi penggerak penting dalam narasi bahwa pendidikan, termasuk dalam akuntansi publik, adalah medan etik dan pembentukan karakter yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan integritas